RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994) ;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);

DRAFT

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 468);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Luar Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Renstra Kementerian terdiri atas:

a. pendahuluan;
b. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
e. penutup.

DRAFT

Pasal 3

Renstra Kementerian digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam menyusun rencana strategis unit kerja pimpinan tinggi madya dan penyusunan kerja tahunan.

Pasal 4

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pimpinan tinggi madya melakukan pemantauan dan penyusunan rencana kerja unit kerja masing-masing sesuai dengan Renstra Kementerian.

Pasal 6

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunangan Perauran Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

DRAFT

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Periode lima tahun terakhir pada 2020 - 2024 membuka berbagai kesempatan dan tantangan baru bagi politik luar negeri Indonesia dengan adanya dinamika ekonomi dan politik pada tingkat domestik, regional, dan global. Dalam aspek ekonomi, periode dimaksud ditandai dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada resesi ekonomi. Krisis geoekonomi juga ditandai dengan krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial akibat konflik Rusia-Ukraina, serta maraknya pemberlakukan kebijakan unilateral, antara lain penerapan kebijakan tarif AS serta diberlakukannya *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) oleh Uni Eropa yang berpotensi mengganggu arus investasi dan perdagangan global, khususnya bagi negara berkembang penghasil komoditas. Seiring dengan berkembang pesatnya industri semikonduktor dan teknologi hijau, rivalitas antar kekuatan ekonomi besar pun semakin menajam dalam upaya menguasai industri masa depan tersebut.

Selain fokus pada upaya pemulihan sektor kesehatan dan perekonomian, periode tersebut juga melihat sejumlah krisis geopolitik di kawasan yang berdampak pada kerawanan energi dan pangan serta ketidakstabilan global. Hal ini termasuk krisis kemanusiaan di Afghanistan, perang Rusia-Ukraina, dan konflik di Gaza. Secara khusus, dinamika di ASEAN tidak hanya diwarnai dengan isu internal seperti krisis pengungsi Myanmar, tetapi juga dampak kolateral dari rivalitas AS-RRT. Sementara itu, kembali terdapat kemunduran multilateralisme dan penguatan minilateralisme melalui kemunculan forum-forum seperti AUKUS dan QUAD.

Tahun 2024 juga menjadi tahun historis politik yang ditandai dengan pemilu di lebih dari 50 negara dan melibatkan hampir setengah dari populasi dunia. Selain Indonesia, transisi politik dan pergeseran kekuasaan terjadi pada mayoritas pemilu seperti di AS, Pakistan, Meksiko, Inggris, Korea Selatan, Bangladesh, Botswana, dan Iran yang mengindikasikan adanya kekecewaan publik terhadap kondisi ekonomi dan jalannya demokrasi di berbagai negara.[1] Tren pemilu juga menunjukkan bertahannya agenda populisme sayap kanan dan polarisasi terhadap isu budaya dan identitas. Secara spesifik, konflik internasional seperti Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina turut memengaruhi opini masyarakat domestik dalam pemilu.

DRAFT

[1] "Global Elections in 2024: What We Learned in a Year of Political Disruption", *Pew Research Center* https://www.pewresearch.org/global/2024/12/11/global-elections-in-2024-what-we-learned-in-a-year-of-political-disruption/

Kondisi yang tidak kondusif dengan banyaknya disrupsi dan ketidakpastian ini merupakan tantangan bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya. Indonesia terus menjaga komitmennya untuk menjalankan Polugri Bebas Aktif, menghormati hukum internasional, dan berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran dunia sesuai mandat konstitusi. Terlebih lagi, Indonesia tengah mengejar target Indonesia Emas 2045 yang di antaranya mencapai pendapatan per kapita setara negara maju dan pengaruh di dunia Internasional meningkat.

Indonesia memiliki modalitas dalam menavigasi tantangan dan mengisi defisit kepemimpinan pada tatanan global saat ini. Diplomasi Indonesia dijalankan secara *well-measured*, *well-calculated*, *action-oriented*, *result-oriented*; tetapi di saat yang sama terus menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang tidak tergoyahkan dari Konferensi Asia-Afrika (KAA), yang meneguhkan kesetaraan antar negara; membangkitkan solidaritas "*the Global South*"; menjadi embrio Gerakan Non-Blok; dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional. Konsistensi ini memampukan Indonesia untuk mengemban antara lain keketuaan IORA 2017, keanggotaan di Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Presidensi G20 2022, keketuaan MIKTA 2023; keanggotaan ECOSOC 2023; keanggotaan Dewan HAM 2022 - 2023; dan Keketuaan ASEAN 2023.

Konsistensi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina berdasarkan *two-state solution* juga mendapatkan apresiasi dari dunia. Sebagai langkah nyata dalam membela kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa Palestina, Indonesia terus mengupayakan bantuan kemanusiaan, hibah, kerja sama teknis, dan pengembangan kapasitas, termasuk pemberian bantuan operasional bagi Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Prinsip bebas aktif Indonesia juga tercermin dalam upaya kemitraan dengan kawasan Pasifik yang memberikan kontribusi positif bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di tengah kontestasi politik kekuatan global lainnya di wilayah Pasifik. Oleh karena itu, prinsip polugri yang telah dimandatkan dalam UUD 1945 tetap relevan bagi Indonesia di tengah era baru kondisi global ini.

Dalam menjalankan politik luar negerinya selama periode 2020 - 2024, Indonesia memiliki prioritas 4+1 yang meliputi Penguatan Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Pelindungan, Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan, Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia, serta Penguatan Infrastruktur Diplomasi. Periode ini merupakan era penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia yang semakin intensif mendiversifikasi mitra ke pasar nontradisional (a.l. kawasan Afrika dan Amerika Latin) dan mendorong pemulihan ekonomi, memperkuat sistem pelindungan WNI pasca-pandemi Covid-19, serta mengambil peran kepemimpinan diberbagai forum internasional seperti pada Presidensi G20 2022, Keketuaan ASEAN 2023 dan Keketuaan MIKTA 2023.

1.2. Potensi, Permasalahan, dan Analisis SWOT

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, perkembangan pesat teknologi digital dan komputasi, terutama kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan semakin memicu perubahan transformatif yang berskala global, berjangka waktu panjang dan bersifat sangat masif. Pandemi COVID-19 yang terjadi di periode 2020-2022 juga berkontribusi pada perubahan pola kehidupan di berbagai sektor, khususnya sosial dan ekonomi.

Merujuk pada RPJPN 2025-2045, terdapat sepuluh *megatrend* global yang diperkirakan memunculkan tidak hanya sejumlah potensi kemajuan melainkan juga disrupsi yang perlu

DRAFT

diantisipasi. Sepuluh megatrend global tersebut mencakup perkembangan demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi global, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan *middle class*, peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim dan pemanfaatan luar angkasa.

1.2.1 Potensi

Pertumbuhan Ekonomi dan Kondisi Makroekonomi Kondusif

Terlepas dari beragam tekanan global, momentum pemulihan perekonomian nasional terus terjaga khususnya berkat permintaan dalam negeri yang kuat. Pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11% (y-o-y), setara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum masa pandemi COVID-19. Tingkat inflasi per April 2024 sebesar 3,0% (y-o-y), masih dalam kisaran target nasional, yakni 2,5%±1%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8%[2].

Indonesia juga merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan terbesar di ASEAN. Indonesia juga tercatat sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN yang menjadi anggota G20, dengan PDB sebesar USD 1,2 triliun di tahun 2022. Dengan ini, Indonesia diprediksikan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2045.



Presiden Prabowo didampingi Menlu pada KTT G-20 di Brasil, 18 November 2025
Sumber: Sekretariat Negara
https://setneg.go.id/gallery_photo/index/708

Pertumbuhan ekonomi positif tersebut juga didukung dengan kinerja positif pembangunan infrastruktur nasional, khususnya untuk mendukung konektivitas, kelistrikan, TIK, waduk dan saluran irigasi, serta sarana prasarana dasar. Kondisi ini juga ditopang dengan ketersediaan sumber daya alam yang besar dan beragam, khususnya cadangan Nikel, Timah, Bauksit dan Tembaga, potensi Energi Baru Terbarukan, maupun potensi produksi perikanan serta pertanian.

[2] Lampiran I PP No.12/2025 tentang RPJMN tahun 2025 - 2029

Indonesia juga mendapatkan rekognisi sebagai *full investment grade country* dari tiga lembaga pemeringkat internasional utama, dengan rating BBB/Stabil (Fitch), Baa2/Stabil (Moody's) dan BBB/Stabil (S & P Global) di tahun 2023-2024.

Sumber Daya Alam dan Manusia Memadai

Indonesia juga memiliki kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM), berupa populasi terbesar ke-4 di dunia, dengan usia median 29 tahun. Sejumlah indikator Kualitas SDM nasional juga memperlihatkan peningkatan. Hal ini antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 75,02, meningkat sebesar 0,85% dari tahun 2023, meningkatnya Umur Harapan Hidup dari semula 69,81 (2010) menjadi 79,93 (2023), penurunan prevalensi stunting dari 21,60% (2022) menjadi 21,50% (2023), serta membaiknya sektor pendidikan di tahun 2022, dimana rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 9,08 dan peningkatan harapan lama sekolah sebesar 13,10.

Faktor demografi Indonesia dinilai menjadi salah satu kelebihan dalam 5 tahun mendatang. Di tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, sebesar 277 juta jiwa. Dengan proyeksi tingkat fertilitas sekitar 2%, pertumbuhan penduduk diperkirakan melambat pada periode 2025-2045, yakni di bawah 1%. Di sisi lain, saat ini struktur penduduk Indonesia relatif menguntungkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi, dimana pada 15 tahun mendatang diperkirakan rasio ketergantungan di bawah 50%.

Indonesia juga memiliki kekuatan sumber daya alam yang berlimpah, baik hutan tropis yang luas, cadangan sumber daya energi dan mineral, energi terbarukan, keanekaragaman hayati dan ekosistem, sumber daya perikanan, maupun *bioprospecting*.

Kepemimpinan, Pengaruh, dan Citra Positif Indonesia

Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional juga memperlihatkan peningkatan. Indonesia menduduki peringkat 34 *Global Power Index* dan peringkat 3 di antara negara ASEAN. Di sisi lain postur pertahanan Indonesia juga terus meningkat dimana pemenuhan *Minimum Essential Force* mencapai 86,94% (2021) dan kontribusi industri pertahanan nasional terhadap pemenuhan kebutuhan alutsista tercatat sebesar 57,6% di tahun 2021.

Berdasarkan *E-Government Development Index* (EDGI) pada UN E-Government Survey tahun 2024, Indonesia telah meraih peringkat 64 dari 193 negara anggota PBB. Hasil tersebut membawa Indonesia naik 13 Peringkat dari tahun 2022 yang hanya mendapat peringkat 77.

Di tingkat kawasan, Indonesia berpotensi untuk terus menunjukkan kepemimpinannya di berbagai organisasi/forum regional. Untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika, penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia dapat diwujudkan antara lain dalam peningkatan ketahanan pangan, dukungan terhadap transisi energi bersih, dan pengembangan *Small and Medium Enterprises* (SME) dalam kerangka APEC, dan penanganan isu Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dalam kerangka IORA dengan diadopsinya IORA Principle Guidelines on Combating IUU Fishing pada pertemuan tingkat menteri IORA yang merupakan inisiatif Indonesia dan Prancis.

Merujuk kepada Asia Power Index 2024, Indonesia juga memiliki *diplomatic influence* terbesar di antara negara-negara kawasan dan terbesar keenam dari 27 negara indeks.

DRAFT

Hal ini diukur melalui jumlah Perwakilan RI di seluruh dunia, pengaruh dan partisipasi di fora multilateral, serta performa kebijakan luar negeri.

Keterwakilan Indonesia sebagai tuan rumah APEC dalam 5-10 tahun ke depan juga berpotensi meningkatkan kepemimpinan Indonesia dan karenanya patut untuk dipertimbangkan. Hal ini mengingat bahwa hampir semua ekonomi APEC telah menjadi tuan rumah APEC sebanyak 2 kali atau 3 kali. Sementara itu, Indonesia pernah menjadi ketua APEC pada tahun 1994 (menghasilkan Bogor Goals) dan tahun 2013. Kepemimpinan Indonesia pada forum regional akan membantu mendorong kemajuan posisi dasar nasional untuk pertumbuhan ekonomi dan menuju visi Indonesia emas 2045.

Indonesia juga perlu mengantisipasi munculnya kerja sama regional yang baru, antara lain, Indo-Pacific Economic Forum (IPEF), Arafuru and Timor Sea Economic Area (ATSEA), dan lainnya, sebagai respon dinamika dunia yang selalu berubah. Dalam hal ini, Indonesia perlu menjajaki, menilai, dan mempertimbangkan nilai manfaat yang diperoleh Indonesia dalam organisasi dimaksud; yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Mitra Pembangunan Baru yang Kredibel

Kredibilitas kepemimpinan dan citra positif di dunia internasional dimaksud dapat menjadi modalitas Indonesia sebagai *reliable partner* dalam kerja sama pembangunan internasional. Dengan Indonesia Aid, Indonesia dapat mengisi defisit kepemimpinan dalam kemitraan pembangunan yang mulai ditinggalkan.

Indonesia telah berinisiatif membentuk platform *Emerging Development Partners* (EDP) untuk mengumpulkan negara-negara berkembang yang tengah meningkatkan perannya sebagai negara donor baru dalam kerja sama pembangunan internasional. Hal ini menunjukkan reposisi peran Indonesia sebagai *bridge builder* menjadi *leader* bagi negara negara berkembang.

Pada 11 Juni 2024, Indonesia menyelenggarakan pertemuan EDP pertama di Bali yang bertujuan untuk membentuk kesamaan pandangan terkait pentingnya posisi negara berkembang dalam proses penyusunan norma kerja sama di tingkat global serta menggalang dukungan untuk melawan *discriminative policy* yang merugikan negara berkembang. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk mendorong disusunnya skema *matchmaking* dalam program pembangunan internasional.

EDP selanjutnya akan menjadi *building block* bagi negara-negara *emerging donor* untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam berbagai forum internasional terkait kerja sama pembangunan. EDP menjadi kendaraan kerja sama *beyond technical cooperation* seperti mengedepankan kepentingan negara berkembang terkait industri ekstraktif, energi, hilirisasi, pertanian/perikanan. Indonesia perlu menjaga keberlanjutan EDP sebagai wahana strategis dan inisiatif dan inisiatif politik Indonesia.

Modalitas Keterampilan Diplomat Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Diplomat yang terampil dalam *soft* maupun *hard skills.* Dalam memastikan pengembangan potensi SDM, Kemenlu melalui Pusdiklat mempersiapkan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk isu-isu yang menunjang tugas diplomat, di antaranya negosiasi, penguasaan bahasa asing, penulisan naskah dinas, dan keprotokolan.

Keterampilan dimaksud merupakan *competitive advantage* yang dimiliki oleh Kemenlu guna memastikan relevansi dan perannya sebagai koordinator hublu di tengah proliferasi

DRAFT

diplomasi trek II dan III. Keterampilan dan jejaring luar negeri yang memadai menjadikan Kemenlu aktor yang penting dalam mendukung aspek-aspek hublu pada K/L lainnya maupun pada masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah.

Pemanfaatan Data Analisis dan AI untuk Kemenlu yang Berbasis Data
Dalam era global yang dinamis ini, Kemenlu memiliki potensi besar untuk mentransformasi pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui pemanfaatan data analisis dan kecerdasan artifisial (AI). Pada 2024, telah disusun *Grand Design* dan *Roadmap* Strategi Diplomasi Berbasis Data, didalamnya menekankan pentingnya pendekatan berbasis data, yang memungkinkan Kemenlu untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai aspek hubungan internasional. Sistem AI dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis informasi secara cepat dan efisien, mengidentifikasi pola-pola tersembunyi, dan memberikan prediksi yang berharga. Beberapa tusi terkait koleksi dan olahan data yang selama ini dilakukan secara manual, seperti *market intelligence* ataupun penyusunan skenario perundingan, kini dapat menggunakan bantuan AI.

Lebih lanjut, pemanfaatan data analisis dan AI dapat memperkuat diplomasi publik dan keterlibatan dengan masyarakat internasional. Melalui analisis data media sosial dan *platform* daring lainnya, Kemenlu dapat memahami persepsi global terhadap Indonesia, mengidentifikasi narasi-narasi yang berkembang, dan merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. AI juga dapat digunakan untuk mengembangkan *platform* interaktif dan personalisasi informasi bagi WNI di luar negeri, memberikan layanan konsuler yang lebih responsif, dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam agenda pembangunan nasional.

1.2.2 Permasalahan dan Tantangan

Rivalitas Geopolitik dan Ketegangan di Kawasan
Dinamika geopolitik global, terutama meningkatnya eskalasi persaingan antar negara adidaya dalam meningkatkan peran dan pengaruhnya baik di kawasan tertentu maupun di tingkat global, berpengaruh cukup signifikan atas tataran global maupun posisi Indonesia di dunia internasional.

Ketegangan antar negara juga perlu diantisipasi ke depan, menyusul konflik bersenjata yang berkepanjangan baik antara Rusia dan Ukraina maupun antara Israel-Palestina. Di sisi lain potensi konflik di kawasan lain juga patut diwaspadai, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Demikian halnya dengan resiko konflik domestik yang mengarah pada perang saudara di sejumlah negara, seperti Afghanistan dan Myanmar.

Ketidakpastian Ekonomi
Tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi perekonomian dunia ke depan. Dalam publikasi *World Economic Outlook* April 2024, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2% pada periode 2024-2025, sama seperti tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi di negara maju diperkirakan mencapai 1,7% di 2024 dan 1,8% di 2025, meningkat dari 1,6% di tahun 2023. Perlambatan ekonomi terutama terjadi di negara berkembang yang diperkirakan menurun dari 4,3% di 2023, menjadi 4,2% di tahun 2024 maupun 2024. IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di 5 tahun mendatang sebesar 3,1%, tingkat paling rendah dalam 10 tahun terakhir.

DRAFT

Meskipun demikian, inflasi global diperkirakan lebih rendah dari 6,8% di tahun 2023, menjadi 5,8% (2024) dan 4,5 % (2025). Hal ini terutama atas kontribusi perekonomian negara maju yang diproyeksi dapat mencapai target inflasinya lebih cepat, dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Kondisi ini diluar perkiraan sebelumnya, dimana perekonomian global cenderung *resilient* meskipun banyak negara menerapkan kenaikan tingkat suku bunga bank sentral untuk mengatasi inflasi.

Pada 2 April 2025, Presiden Trump telah mengumumkan besaran tarif resiprokal yang dikenakan kepada 60 negara, termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% (sudah termasuk *baseline tariff* sebesar 10%) melalui *Executive Order* (EO) 14257 *Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits.* Faktor besarnya surplus perdagangan dan hambatan perdagangan non-tarif menjadi dasar utama penghitungan besaran tarif Amerika Serikat (AS). Dalam hal ini, defisit AS dengan Indonesia tahun 2024 adalah USD 17,9 miliar dengan nilai impor AS senilai USD 28 miliar.

Namun, pada 9 April 2025, Presiden Trump mengumumkan penangguhan pemberlakuan tarif selama 90 hari, sehingga tarif baru akan mulai berlaku pada 8 Juli 2025. Selama periode 90 hari tersebut, tarif *baseline* universal sebesar 10% tetap diberlakukan ke hampir seluruh negara mitra, kecuali Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tarif terhadap RRT akan dinaikkan secara signifikan menjadi total 145%, sebagai respons atas sikap retaliasi RRT.

Pada 11 April 2025, Presiden Trump mengumumkan Amandemen EO Nomor 14257 (tertanggal 2 April 2025) yang mengecualikan sejumlah produk yang diklasifikasikan sebagai bagian dari produk ‘semikonduktor’, seperti *smartphones, computers, chips,* dan produk elektronik lainnya.

Pengenaan tarif AS berpotensi menggerus daya saing sejumlah produk utama ekspor Indonesia di pasar AS. Industri alas kaki, tekstil dan pakaian Indonesia misalnya, akan sangat terdampak mengingat pasar AS menyumbang 30% dari total ekspor produk ini. Sedangkan bagi produk udang dan perikanan laut, AS menyerap hingga 10%.

Berdasarkan data US International Trade Commission (US ITC) tahun 2024, Indonesia di peringkat 15 penyumbang defisit perdagangan AS sebesar USD 17.9 milyar. 3 (tiga) kontributor defisit perdagangan terbesar AS adalah RRT (USD 295 milyar), Meksiko (USD 171 milyar) dan Viet Nam (USD 123 milyar). Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Malaysia berada di urutan ke-11 dan 14, masing-masing USD 44 milyar dan USD 24 milyar.

AS merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia setelah RRT. Sebaliknya, bagi AS, Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-22. Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi dan diplomasi dalam menanggapi kebijakan tarif AS.

Kebijakan tarif Trump pertama kali ditetapkan ke Kanada dan Meksiko pada 2 Februari 2025 sebesar 25%, dengan tambahan 10% untuk produk-produk energi dari Kanada, dan tambahan 25% untuk baja dan aluminium dari Kanada. Kanada memilih melakukan retaliasi. Selain Kanada, RRT juga melakukan retaliasi tarif hingga 125% terhadap produk-produk AS.

Disrupsi Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan tersebut antara lain *Internet of Thing* (IoT), *Blockchain*, dan *Artificial*

DRAFT

Intelligence (AI). Disrupsi teknologi yang perlu dicermati khususnya di industri jasa keuangan, khususnya dengan munculnya perusahaan *financial technology* seperti bank digital, yang meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses jasa keuangan namun belum didukung dengan regulasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

Selain keuangan, sektor pemerintahan juga mulai merasakan dampak dari disrupsi teknologi ini. Transformasi digital di sektor pemerintahan menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan aksesibilitas, namun juga memunculkan tantangan besar seperti keamanan data, integrasi sistem, dan kesenjangan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam hal keamanan data, ancaman seperti serangan siber dan pelanggaran data pribadi semakin meningkat, tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh negara. Berdasarkan laporan Ransomware Task Force, sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 6.500 serangan ransomware di 117 negara. Permintaan pembayaran atas serangan ransomware juga mencapai rekor USD 1,1 miliar atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya, mulai dari pelaku yang tergabung dalam kelompok kriminal hingga aktor yang didukung oleh negara. Kemampuan teknologi juga diperkuat oleh kecerdasan buatan (AI), yang membuat ancaman menjadi semakin canggih dan sulit dideteksi.

Adopsi teknologi seperti AI, IoT dan Blockchain dapat memberikan manfaat signifikan, namun tanpa kerangka regulasi dan kebijakan yang memadai, penerapan teknologi ini dapat menimbulkan risiko baru, termasuk kerentanan terhadap serangan siber dan penyalahgunaan teknologi.

Perubahan Iklim serta Kerawanan Energi dan Pangan

Perubahan iklim terjadi di tengah fragmentasi global dan konflik geopolitik yang memperburuk kerentanan, mempersempit akses pendanaan dan teknologi, serta mengganggu stabilitas sosial-ekonomi. Keluar-nya AS dari Perjanjian Paris pada Januari 2025 memperlemah kepemimpinan iklim global dan menegaskan pentingnya multilateralisme yang tangguh.

Negara berkembang seperti Indonesia sangat terdampak, terutama dalam ketahanan pangan dan energi akibat meningkatnya intensitas bencana iklim. Laporan Global Risk Report 2025 WEF menyoroti risiko penggunaan energi fosil terhadap banjir, kekeringan, dan badai ekstrem.

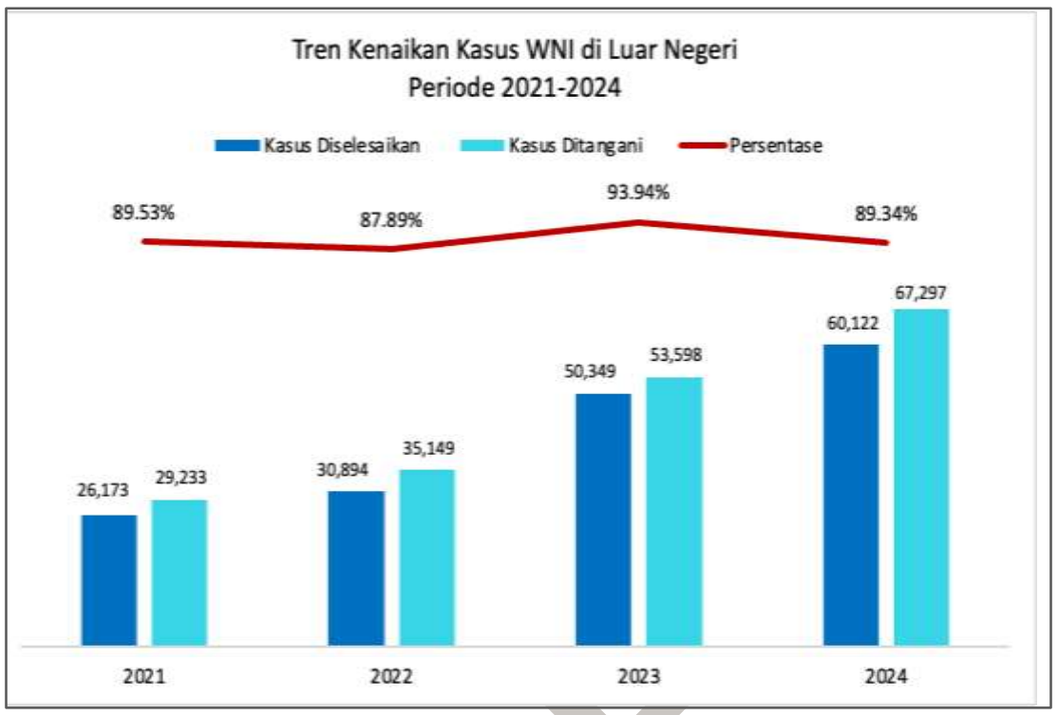
Isu keadilan iklim pun menjadi kunci, termasuk akuntabilitas negara maju serta pengakuan atas keragaman konteks nasional. Perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling rentan terutama terhadap bencana hidrometeorologi dampak dari perubahan iklim.

Arus Migrasi Global dan Pelindungan WNI

Faktor dinamika geopolitik global tersebut di atas dan diperparah dengan fenomena populasi menua (*aging population*) dan kekurangan tenaga kerja (*labour shortage*) di berbagai negara tujuan non-tradisional (faktor penarik/*pull factor*) serta tantangan bonus demografi Indonesia (faktor pendorong/*push factor*) menyebabkan meningkatnya arus perlintasan batas negara oleh WNI ke luar negeri menjadi semakin tak terelakkan. Kendati demikian eskalasi pergerakan lintas batas tidak diimbangi dengan kesadaran untuk mematuhi prosedur atau tata cara migrasi yang aman. Hal tersebut dibuktikan dengan

DRAFT

lonjakan eksponensial jumlah kasus WNI di luar negeri dari tahun 2021 sampai dengan pasca-endemi COVID19 dan tren ini masih tetap berlanjut tanpa menunjukkan pelemahan.



Mayoritas kasus-kasus berakar pada isu imigrasi dan ketenagakerjaan yang disebabkan oleh WNI yang berpergian untuk bekerja di mancanegara secara non-prosedural dengan keterampilan yang kurang memadai dan/atau penggunaan dokumen keimigrasian serta ketenagakerjaan yang tidak sah, termasuk pemalsuan. Dengan demikian, tindakan WNI tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran keimigrasian, yang selanjutnya meningkatkan kerentanan terhadap berbagai permasalahan di negara tujuan. Permasalahan mencakup tuntutan pidana serta sengketa ketenagakerjaan, mulai dari perlakuan kasar oleh pihak pemberi kerja, pengabaian hak-hak finansial, hingga keterlibatan kasus kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), baik dalam lingkup pekerjaan domestik maupun dalam ranah penipuan daring (*online scamming*) dan perjudian daring (*online gambling*).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, sepanjang periode 2021 hingga Februari 2025 mencatat total 7.027 kasus yang berkaitan dengan penipuan daring/*online scamming*. Sebanyak 6.964 kasus ditangani oleh berbagai Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara, sementara 63 kasus lainnya teridentifikasi di Belarus, Persatuan Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Kasus-kasus tersebut tidak semua tergolong kasus TPPO, dengan hanya sekitar 1.508 kasus atau 21.4% yang merupakan kasus TPPO.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh sejumlah Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara seperti KBRI Phnom Penh, KBRI Bangkok dan KBRI Yangon, mengungkapkan adanya fenomena residivisme (*Repeated Offender*/RO). Dalam banyak kasus, terindikasi bahwa WNI yang setelah dipulangkan ke Tanah Air, kembali terjerat dalam skema kejahatan serupa.

Situasi ini menjadi tantangan bagi Kementerian Luar Negeri dalam upaya kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga pemangku kepentingan terkait lainnya guna memperkuat arsitektur tata kelola migrasi yang mudah, terjangkau, cepat dan aman. Peningkatan

DRAF

prosedur dapat diimplementasikan melalui harmonisasi kebijakan dan regulasi serta intensifikasi edukasi melalui sosialisasi dan kampanye penyadaran publik yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Arus migrasi global juga berdampak kepada potensi kejahatan transnasional. Sebagai negara yang berbatasan darat langsung dengan 3 (tiga) negara dan berbatasan laut langsung dengan 10 (sepuluh) negara, Indonesia memiliki risiko dalam pengelolaan arus manusia pada titik-titik perbatasan. Sementara itu, masih terdapat *bottlenecks* dalam harmonisasi kebijakan pelindungan dalam negeri. Dengan adanya rezim baru dalam Pelindungan PMI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, diperlukan antisipasi koherensi kebijakan di antara pemangku kepentingan yang semakin bertambah.

Hasil survey *foresight* memprediksi megatren, tren, dan peristiwa global yang akan terjadi pada tahun 2025. Foresight ini sangat penting mengingat situasi global yang dinamis dan tidak menentu, sehingga Kemlu dapat lebih tangkas dalam menghadapi kondisi yang tidak sesuai ekspektasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan survei telah dilaksanakan pada periode 5-15 November 2024. Survei menggunakan metode purposive sampling, dengan responden yang terdiri dari diplomat berpengalaman, termasuk mantan Duta Besar RI, Kepala Perwakilan, Pimpinan Eselon I dan II, serta siswa Sesparlu dan Sesdilu.

Pada tahun 2025, 7 megatren yang diidentifikasi meliputi geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, demografi global, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, persaingan sumber daya alam, dan perubahan iklim. Top ten tren dan peristiwa penting yang diprediksi terjadi mencakup perubahan polugri AS di Indo-Pasifik Pasca Pemilu 2024; risiko serangan siber besar pada infrastruktur indonesia; risiko geopolitik dan geoekonomi terhadap rantai pasok global; pengakuan negara-negara terhadap Palestina; Indonesia menjadi anggota penuh BRICS di tahun 2025; peningkatan aktivitas militer Tiongkok di selat Taiwan; pemanfaatan AI dalam diplomasi di Kemlu RI; hilirisasi mineral kritis Indonesia melalui diversifikasi FDI; meningkatnya investasi asing di Indonesia; dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral Indonesia. Hasil open-ended question usulan saran masukan tren dan peristiwa tahun 2025 dari para responden mencakup isu krisis Timur Tengah, ketegangan geopolitik IndoPasifik, dan hasil pilpres Presiden AS tahun 2024, perubahan iklim, serta hubungan AS-Tiongkok.

Postur Diplomasi yang Belum Memadai

Postur Diplomasi yang belum memadai menjadi salah satu permasalahan/ tantangan antara lain jumlah SDM terbatas dan belum terimplementasinya *Human Capital Management Plan* (HCMP) secara penuh; postur anggaran yang belum optimal; serta Infrastruktur material dan nonmaterial lainnya. Selain itu juga terdapat tantangan berupa belum terintegrasinya manajemen risiko dan kinerja baik pada tataran fungsi substansi maupun tata kelola organisasi serta belum efektifnya pengendalian internal pada struktur dan proses yang telah dirancang.

1.2.3 Analisis SWOT dan Mitigasi Risiko

Berbagai potensi dan permasalahan dimaksud perlu dipetakan dalam analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) yang dihadapi oleh Indonesia dan Kemenlu RI. Dalam perencanaan kebijakan strategis, pemetaan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dapat membantu memahami keunggulan komparatif dan hal-hal yang perlu ditangani secara internal sebelum menyusun arah kebijakan luar negeri.

DRAFT

Sementara itu, kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dapat memberikan informasi terkait hal-hal yang dapat dimanfaatkan dan risiko eksternal yang harus diantisipasi Kemenlu dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

Strength	***Weakness***
a. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan kondisi makroekonomi stabil b. Kelimpahan sumber daya manusia dan alam c. Kepemimpinan dan peran Indonesia yang semakin meningkat di organisasi dan forum internasional (G20, ASEAN, MIKTA, BRICS, OKI dan forum terkait lainnya) d. Rekam jejak positif Indonesia dalam kontribusi perdamaian dan antikolonialisme e. Multi-identitas Indonesia sebagai negara berkembang, negara kepulauan/maritim, bonus demografi, negara demokrasi dan populasi Muslim terbesar di dunia f. Posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan global g. Konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Kemenlu h. Transformasi digital Kemenlu yang terpetakan i. Peran strategis Kemenlu sebagai triumvirat sesuai amanat UUD 1945 dan Korsindal sesuai Perpres 150/2024 j. Kredibilitas dan reputasi positif Kemenlu sebagai instansi negara k. Keterampilan SDM Diplomat yang memadai dalam penguasaan bahasa asing maupun spesialisasi isu/kawasan	● Kebijakan dalam negeri yang belum koheren ● Koordinasi antar lembaga/instansi dalam menyusun kebijakan ● Kerentanan terhadap situasi ekonomi global ● Keterbatasan engagement komunikasi global ● Isu HAM atau demokrasi yang dapat mengganggu kredibilitas di dunia internasional ● Postur diplomasi yang belum optimal (anggaran, infrastruktur fisik dan non fisik, SDM)
Opportunities	***Threats***
● Defisit kepemimpinan dalam kerja sama internasional dan multilateralisme menjadi peluang Indonesia sebagai emerging development partner melalui Indonesia Aid ● Peluang untuk memperluas kerja sama selatan-selatan, akses pembiayaan alternatif serta diplomasi pembangunan melalui keanggotaan di BRICS dan New Development Bank serta platform multilateral lainnya ● Peluang pengembangan soft power Indonesia ● Peluang peran strategis diaspora Indonesia, khususnya untuk diplomasi ekonomi dan budaya ● Naiknya minat pemuda dan stakeholder lainnya terhadap kebijakan luar negeri ● Ketertarikan dunia terhadap Indo-Pasifik	● Rivalitas geopolitik dan ketegangan di kawasan ● Ketidakpastian ekonomi dan krisis internasional (perang dagang dan inflasi global) ● Arus migrasi global yang berpotensi memicu kejahatan transnasional ● Pelemahan multilateralisme ● Non-traditional challenges, a.l. perubahan iklim, pandemi, disrupsi teknologi, dan keamanan siber serta terorisme lintas batas ● Rentannya Global Supply Chain termasuk sektor energi dan pangan ● Konflik maritim dan perbatasan ● Perubahan kebijakan domestik yang dapat berdampak pada konsistensi kebijakan luar negeri

DRAFT

● Masih adanya untapped market ● Perkembangan teknologi yang dapat diadopsi dalam mendukung diplomasi global Indonesia ● Peran mediasi dalam konflik regional maupun internasional	● Prinsip polugri bebas aktif Indonesia yang dapat dianggap 'tidak tegas' dalam isu-isu tertentu oleh konstituen domestik ataupun stakeholder internasional

Modalitas Kemenlu dan Indonesia dalam Menjalankan Polugri

Dari analisis di atas, dapat terlihat bahwa Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI memiliki berbagai modalitas untuk menjalankan polugri strategis. Indonesia memiliki situasi politik dan ekonomi domestik yang kondusif untuk menjalankan kebijakan luar negeri, salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi stabil dan didukung dengan kelimpahan SDA serta SDM. Indonesia juga memiliki multi-identitas yang memampukannya untuk menjadi representasi di forum internasional maupun bermitra dengan negara-negara serupa; yaitu negara berkembang, negara kepulauan/maritim, negara demokrasi ketiga terbesar dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Konsistensi Indonesia dengan prinsip bebas aktif dan rekam jejak positif dalam isu perdamaian dan antikolonialisme juga menjadi kredibilitas Indonesia sebagai *reliable partner* dalam pembangunan. Modalitas dimaksud dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan berbagai potensi yang telah dipetakan saat ini, antara lain mitra pembangunan, *soft power*, peran diaspora, serta peran strategis di kawasan Pasifik dan Indo-Pasifik.

Kemenlu RI juga memiliki peran strategis dalam pemerintah Indonesia. Kemenlu sebagai kementerian triumvirat melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang luar negeri untuk membantu Presiden, sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945 dan Perpres no.150/2024. Kemenlu juga memiliki reputasi baik sebagai instansi negara merujuk kepada Indeks Opini BPK, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenkeu, Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman, dan Survei Penilaian Integritas KPK. Peran strategis dan kredibilitas ini memampukan Kemenlu untuk membangun kepercayaan publik dan dukungan terhadap kebijakan luar negeri, seiring dengan meningkatnya minat pemuda dan *stakeholder* terhadap isu-isu luar negeri yang selama ini dinilai jauh dari kebijakan domestik. Hal ini salah satunya terindikasikan dari peningkatan animo publik terhadap penyelenggaraan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) dari tahun ke tahun.

Mengelola Kelemahan, Tantangan, dan Risiko ke Depan

Terlepas dari berbagai modalitas dimaksud, masih terdapat isu seperti HAM dan korupsi yang dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Posisi Indonesia yang cukup bergantung pada rantai pasok global juga menjadikan rentan terhadap volatilitas ekonomi global. Selain itu, meskipun memiliki peran meningkat di forum internasional dan presensi menguat dalam hubungan bilateral, Indonesia belum melakukan *engagement* komunikasi global secara optimal guna menyampaikan narasi kebijakan luar negerinya.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri tergolong dalam Kementerian Tipe Sedang yang memiliki anggaran kecil dari Rp10 triliun dan jumlah pegawai dibawah 7 ribu orang.[3] Hal ini menjadi tantangan bagi postur diplomasi yang membutuhkan peningkatan infrastruktur fisik dan nonfisik serta pengembangan SDM yang memerlukan spesialisasi isu-isu

[3] https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/spi-2024-skor-merah-jadi-pekerjaan-rumah-yang-harus-diselesaikan-pemda

DRAFT

tertentu. Padahal, saat ini mulai terdapat tren pengerahan misi diplomatik untuk isu global seperti teknologi/AI, kesehatan global, maupun perubahan iklim. Kemenlu juga masih menghadapi tantangan dalam penyusunan kebijakan luar negeri, utamanya untuk isu-isu sektoral yang memerlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis yang seringkali memiliki pandangan berbeda.

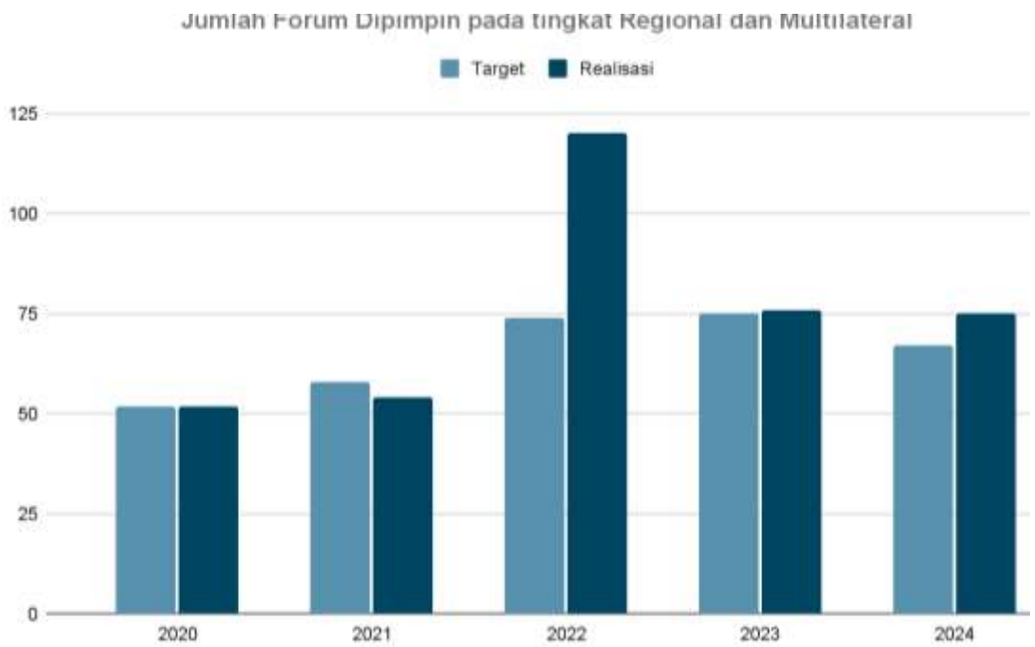
Kelemahan dan tantangan yang dihadapi Kemenlu berisiko menghambat optimalisasi pelaksanaan polugri dalam mencapai kepentingan nasional, apabila tidak dikelola secara tepat dan sistematis. Apalagi, dalam dunia yang semakin kompleks, Kemenlu dituntut untuk memperkuat kapasitas mitigasi terhadap berbagai risiko eksternal yang semakin dinamis dan bersifat nontradisional. Ancaman seperti rivalitas AS-RRT dan ketegangan di kawasan, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim yang dapat mengancam ketahanan pangan dan energi, arus migrasi global, serta disrupsi teknologi berdampak lebih berat terhadap negara berkembang. Untuk itu, Kemenlu perlu memastikan bahwa dukungan pemangku kepentingan domestik dan postur diplomasinya kondusif dan memadai guna menjalankan kebijakan luar negeri yang berorientasi *bridge-building*, tidak terjebak dalam kompetisi negara-negara, dan berpihak pada kesejahteraan negara berkembang.

1.1.1 Capaian Rencana Strategis Kemenlu 2020 - 2024

Dalam periode 5 (lima) tahun ke belakang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 memandatkan Kemenlu untuk berkontribusi pada Agenda Pembangunan ke-7, yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Kemenlu mengampu PP ke-2, yaitu “Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri” yang memiliki 4 (empat) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu (1) Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global, (2) Penguatan integritas NKRI dan pelindungan WNI di luar negeri, (3) Penguatan kerja sama pembangunan internasional, dan (4) Peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional. Dalam pelaksanaannya, Kemenlu telah mencapai, jika tidak melebihi, hampir seluruh target indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), maupun Proyek Prioritas (ProP) pada RPJMN.

Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global

Kegiatan Pembangunan (KP) Peningkatan Peran Indonesia diukur dengan indikator Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral yang ditargetkan pada RPJMN sebanyak 10 (2020), 11 (2021), 13 (2022), 14 (2023), dan 16 (2024). Target dimaksud diturunkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebanyak 52 (2020), 58 (2021), 74 (2022), 75 (2023), dan 67 (2024), yang berhasil tercapai sebanyak 52 (2020), 54 (2021), 120 (2022), 76 (2023), dan 75 (2024). Keberhasilan dalam mencapai target KP dimaksud terbangun dari capaian pada level ProP, yaitu (i) Peningkatan inisiatif/posisi Indonesia yang diterima, (ii) Keanggotaan Tidak Tetap pada Dewan Keamanan PBB, dan (iii) Optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 Besar negara kontributor MPP PBB.



Perbandingan target dan realisasi Indikator Jumlah Forum yang Dipimpin Indonesia pada tingkat Regional dan Multilateral (2020 - 2024)
Sumber: LKJ Kemenlu 2020 - 2024



Menlu RI Retno Marsudi Memimpin Rapat Dewan Keamanan PBB, 2019
Sumber: Kementerian Luar Negeri
https://galeri.kemlu.go.id/galleries/rangkaian-kunjungan-menlu-ri-pada-presidensi-indonesia-di-dk-pbb-new-york

Capaian ini dapat diartikan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan perannya pada tingkat regional dan multilateral pada periode 2020-2024, baik melalui inisiatif yang diterima, kepercayaan terhadap kepemimpinan Indonesia, maupun kontribusi bagi perdamaian dunia di tengah situasi geopolitik. Salah satunya adalah pada tingkat ASEAN, dengan

upaya diplomasi Indonesia untuk terus menjaga relevansi dan sentralitas kawasan dalam menavigasi dinamika geopolitik di kawasan serta membangun arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, yang mengedepankan paradigma kolaborasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.



ASEAN Day 2024 di Sekretariat ASEAN di Jakarta, 8 Agustus 2024
Sumber: Kementerian Luar Negeri
https://galeri.kemlu.go.id/galleries/menteri-luar-negeri-ri-menghadiri-asean-day-2024

Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia memprakarsai langkah awal menuju ASEAN Community Vision 2045 beserta dokumen turunannya (*attendant documents*) melalui adopsi *ASEAN Leaders' Statement on ASEAN Vision: Towards the ASEAN Community's Post-2025 Vision.* Inisiatif ini bertujuan membangun ASEAN yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berorientasi pada rakyat, agar mampu merespons tantangan masa depan secara efektif dan mempertahankan relevansinya di kawasan maupun global. Keketuaan Indonesia juga berhasil mengadopsi ASEAN Concord IV yang merupakan dokumen acuan utama menuju pencapaian visi tersebut.

Di 2019, atas inisiasi Indonesia, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) diluncurkan sebagai grand design kerja sama yang konkret dan inklusif, dan sebagai jawaban dinamika meningkatnya rivalitas di kawasan Indo-Pasifik. Negara mitra ASEAN mendukung *Outlook* tersebut dan bahkan siap mendukung kerja sama konkret implementasi AOIP. Di bawah keketuaan Indonesia, AOIP menjadi rujukan utama kerja sama, dan menjadi kendaraan bagi kolaborasi inklusif dan konkret yang berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Indonesia telah melihat kawasan Samudera Hindia sebagai bagian strategis yang tidak terpisahkan di kawasan Indo-Pasifik ke depan. Saat keketuaan di ASEAN, Indonesia berhasil mendorong kerja sama Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat IORA.

Hal ini dibuktikan dengan perjanjian RCEP yang berhasil ditandatangani pada 2020 yang merupakan inisiasi Indonesia pada keketuaan ASEAN 2011. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas kawasan terbesar di luar WTO yang berisi 30% GDP Dunia serta 30% Populasi Dunia. Selain itu RCEP juga merupakan platform terbuka dan inklusif yang

membangun strategic trust untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam lingkar yang lebih luas kawasan Pasifik didorong menjadi part and parcel dari arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif. Hal ini untuk menjamin agar Kawasan Pasifik tetap aman, damai, stabil dan berkontribusi menjadikan Indo-Pasifik sebagai *Epicentrum of Growth*. *Engagement* Indonesia dengan negara-negara di Pasifik terus ditingkatkan. Baik selama Presidensi Indonesia di G20 maupun Keketuaan di ASEAN, Indonesia mengundang wakil dari Pacific Islands Forum (PIF). Selama Keketuaan Indonesia di ASEAN, Sekretariat ASEAN juga telah menjalin kerjasama dengan Sekretariat PIF.

Selain itu, Indonesia juga menggagas kerja sama dengan negara kepulauan dan negara pulau. Setelah berjalan 5 tahun, untuk pertama kalinya pada 2023, diselenggarakan KTT AIS di Bali. KTT AIS menyepakati penguatan kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan negara kepulauan dan pulau di berbagai forum global dan mendorong kerja sama di sektor perubahan iklim, kemaritiman dan manajemen bencana.

Indonesia telah melakukan berbagai terobosan konkret terkait energi terbarukan. Bersama Jepang, Indonesia menjadi *co-initiator* Asia *Zero Emission Community* atau AZEC sebagai platform kerja sama kawasan untuk pencapaian net zero emission. Indonesia telah memiliki berbagai pembiayaan inovatif yang kredibel, seperti *Energy Transition Mechanism* dan *Just Energy Transition Partnership* atau JETP yang diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali maupun peluncuran Sukuk dan Obligasi Hijau serta Bursa Karbon.

Peningkatan status hubungan bilateral *Comprehensive Strategic Partnership* (CSP) RI-AS menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung program Asta Cita, termasuk ketahanan pangan dan transisi energi. Selain itu, peningkatan status kerja sama pertahanan melalui Defense Cooperation Agreement (DCA) RI-AS juga menjadi elemen strategis dalam diplomasi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan RI di tengah konstelasi kawasan Indo-Pasifik yang dinamis.

Di tengah tren situasi global yang memanas sejak 2022 dan potensi meluasnya konflik yang tengah terjadi, Indonesia ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam upaya mendukung diplomasi perdamaian di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta melakukan pemberian bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang mengalami konflik, seperti Palestina, Lebanon, Yaman, Sudan, dan Suriah.

Terkait upaya mendukung Palestina, melalui berbagai forum multilateral, Indonesia telah memberikan dukungan terhadap resolusi di PBB dan juga partisipasi Indonesia dalam grup dialog terkait isu Palestina seperti *Global Alliance on the Implementation of the Two – State Solution*, *Madrid Group*, dan *Gaza Contact Group* OKI. Selain itu Menlu RI telah berpartisipasi dalam sidang ICJ terkait permintaan Advisory Opinion yang berkaitan dengan isu Palestina, yaitu *Advisory Opinion on the "Legal Consequences arising from the policies and practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem"* pada Juli 2024.

Indonesia juga telah memberikan komitmen hibah USD 2 juta kepada UNRWA (UNRWA Pledging Conference di New York, 12 Juli 2024) untuk program ketahanan pangan serta air dan sanitasi, dan Hibah untuk Palestina melalui **ILO** sebesar USD 500.000 untuk pendanaan program *employment promotion* di Palestina.

- Hibah USD 2 juta ke UNRWA telah ditransfer pada 9 Desember 2024;

- Hibah USD 500 ribu ke ILO sudah ditransfer pada 24 Desember 2024.



Kunjungan Menlu Retno ke Batalyon Indonesia di Lebanon
Sumber: Kementerian Luar Negeri
https://galeri.kemlu.go.id/galleries/kunjungan-menlu-ri-ke-batalyon-indonesia-di-lebanon

Kepemimpinan Indonesia di tingkat global dan konsistensi politik luar negeri yang berprinsip telah meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia pada Indonesia. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Indonesia terpilih dalam sejumlah pencalonan keanggotaan Organisasi Internasional yang strategis, termasuk di antaranya:

- Tiga kali menjadi anggota Dewan HAM, yaitu periode 2015-2017, 2020-2022, dan 2024-2026. Khusus pencalonan Dewan HAM 2024-2026, Indonesia mendapatkan perolehan suara terbanyak, yaitu 186 dari 192 negara;
- Indonesia juga menjadi anggota tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020;
- ECOSOC 2021-2023;
- Dewan IMO sebanyak 5 kali;
- Sejumlah posisi kunci berbagai komisi penting PBB;
- Sekretaris Jenderal IORA 2022-2024;
- Ketua *Working Group on Blue Economy* (WGBE) IORA 2023–2025;
- Ketua *Core Group on Fisheries Management* (CGFM) IORA 2020-2023;
- Keanggotaan *policy-making bodies,* seperti FATF; serta
- Auditor organisasi internasional, termasuk di IAEA dan IMO; serta
- Ketua ASEAN Caucus di APEC sepanjang tahun 2024.

Menghadapi dinamika geopolitik global, Indonesia bersama dengan Brunei Darussalam dan Malaysia berhasil memanfaatkan KTT APEC 2023 dengan mengeluarkan Joint Statement mengenai “Meningkatnya Kekerasan yang dilakukan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina” menyusul Chair Statement mengenai konflik di Ukraina dan Gaza.

Peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di kawasan juga diwujudkan melalui partisipasi aktif pada berbagai forum regional. Di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Indonesia memanfaatkan forum kerja sama regional antara lain APEC, IORA, dan CTI-CFF untuk

mendorong pembahasan area prioritas seperti percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, upaya memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*, manajemen perikanan, ekonomi biru, perubahan iklim, pertumbuhan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, transisi energi, dan kerja sama pendanaan.

Terkait isu perubahan iklim, Indonesia perlu memperkuat solidaritas Global South, mendorong akuntabilitas negara maju, dan memimpin koalisi yang menjunjung keadilan, akses, dan pengakuan atas keragaman konteks nasional. Sebagai bridge builder, Indonesia dapat mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan Selatan-Selatan.

Dalam lima tahun kedepan, forum UNFCCC COP tetap akan menjadi ruang kunci untuk menentukan arah aksi iklim global pasca 1st Global Stocktake. Indonesia mengambil peran penting dalam tiga isu utama yaitu: Global Stocktake (GST), dimana Indonesia dapat terus mendorong agar GST tidak hanya menjadi alat evaluasi teknis, tapi juga sarana membangun kembali kepercayaan komunitas internasional, dan panduan yang konkret untuk penyusunan 2nd NDC; Pendanaan Iklim, dimana Indonesia dapat terus memperjuangkan agar pendanaan iklim tidak sekadar janji, tetapi direalisasikan secara adil, transparan, dan dapat diakses negara berkembang, termasuk untuk loss and damage; dan Transisi Berkeadilan, dimana Indonesia menekankan pentingnya pengakuan atas beragam jalur transisi energi, serta perlunya dukungan nyata bagi negara berkembang dalam bentuk pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Pada UNFCCC COP ke-27 Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) berdasarkan Lima Work Program on Gender (LWPG) yang telah ditentukan oleh Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).

Arah strategis Indonesia ke depan, yaitu dengan memegang prinsip bahwa ambisi harus dibarengi dengan implementasi nyata. Posisi Indonesia perlu terus menekankan:Realisasi pendanaan iklim oleh negara maju sesuai janji sebesar USD 100 miliar/tahun; Peningkatan kerja sama internasional yang setara, termasuk dalam transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan penguatan South-South Cooperation; Perlunya transisi energi yang adil dan bertahap, dengan pengakuan atas peran gas dalam fase transisi; Konsistensi lintas sektor dan kebijakan domestik agar komitmen iklim Indonesia saling menguatkan, bukan bertentangan; Menunjukkan kepemimpinan global melalui inisiatif seperti Bursa Karbon Indonesia sebagai contoh nyata kontribusi Indonesia dalam penurunan emisi secara berkelanjutan.

Selain itu, pada tahun 2023 Indonesia juga telah menegaskan peran aktif dalam komitmen penanganan dan pengendalian polusi asap lintas batas di kawasan ASEAN melalui pendirian *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACC THPC).

Indonesia juga akan terus mempererat kerja sama regional dengan kawasan Asia Tengah antara lain melalui *Asia Cooperation Dialogue* (ACD), Timur Tengah antara lain melalui Gulf Cooperation Council (GCC), serta kawasan Afrika antara lain melalui African Union (AU), Southern African Development Community (SADC), Economic Community of West African States (ECOWAS); dan East African Community (EAC).

Pada tahun 2022 Indonesia menyelenggarakan *Indonesia-Pacific Forum for Development* (IPFD). IPFD menjadi media kolaborasi guna menciptakan peluang kerja sama ekonomi

dan pembangunan, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menemukan solusi bagi tantangan bersama yang dihadapi komunitas Pasifik. IPFD menghasilkan Bali Message yang menjadi rujukan peta jalan (Roadmap) kerja sama pembangunan konkret mencakup strategi, prioritas mekanisme dan format program kegiatan.

Pada tahun 2023 Indonesia juga menjalankan Keketuaan MIKTA dengan mengampu tiga (3) prioritas, yaitu (1) *Strengthening Multilateralism,* (2) *Inclusive Recovery,* (3) *Digital Transformation.* Sejak dimulainya masa keketuaan MIKTA Indonesia 2023, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan dan diperoleh berbagai capaian termasuk:

- Menghasilkan 15 (lima belas) *joint statements* di berbagai forum internasional, termasuk pada tingkat Leaders, serta terkait isu-isu kesehatan, bencana alam, HAM, perempuan, dan ketenagakerjaan.
- Menyelenggarakan sejumlah kegiatan secara langsung termasuk 4th *MIKTA Policy Planning Consultation* di Yogyakarta, 3rd *MIKTA Development Cooperation Network* di Bali, 2nd *MIKTA Senior Officials' Meeting* di Bali, dan *MIKTA Parliamentary Speakers Consultation* di Jakarta.
- Melakukan kegiatan *outreach* untuk meningkatkan visibilitas MIKTA di Indonesia, termasuk di Balikpapan dan di Bali.
- Serta melalui Perwakilan RI di luar negeri, telah menyelenggarakan belasan kegiatan termasuk seminar, FGD, *business forum*, promosi budaya dan lain sebagainya.

Sebagai Ketua MIKTA tahun 2023, Presiden RI telah memimpin *MIKTA Leaders Gathering* di sela-sela KTT G20 New Delhi, India pada tanggal 9 September 2023. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan MIKTA pertama di tingkat *Leaders* sejak MIKTA dibentuk pada tahun 2013. Bertemakan "Membangun Kemitraan Global untuk Masa Depan yang Harmonis", pertemuan dihadiri oleh: (1) Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese; (2) Presiden Republik Korea, Yoon Suk Yeol; (3) Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan; dan (4) *Secretary of Economy* Meksiko, Raquel Buenrostro-Sánchez. Pertemuan berhasil mengadopsi *Joint Press Statement* yang menunjukkan komitmen MIKTA untuk:

- meningkatkan peran sebagai *bridge builder*;
- mengedepankan semangat dialog dan nilai demokrasi; serta
- memperkuat *spirit* multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Indonesia telah diterima menjadi negara anggota BRICS mulai tanggal 1 Januari 2025, setelah menjadi negara undangan pada sejumlah Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri BRICS dan berpartisipasi dalam sejumlah mekanisme BRICS ditahun sebelumnya. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global, sebab BRICS merupakan platform yang tepat untuk:

- membahas dan memajukan kepentingan negara-negara berkembang (*Global South*),
- mendorong dialog yang inklusif untuk membentuk sistem multilateral dan tatanan global yang lebih representatif,
- serta menjadi *bridge-builder* yang menjembatani perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang.
- Dukungan dari negara-negara BRICS juga menunjukkan bahwa Indonesia dipandang positif sebagai *middle power* yang berorientasi pada solusi global.

Indonesia memiliki peluang besar dalam keikutsertaannya di BRICS yakni untuk memanfaatkan beberapa kerja sama kongkret yang telah berjalan, yakni:

- New Development Bank (NDB) - Dibentuk pada 2014 dan bertujuan memobilisasi instrumen keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan

berkelanjutan di *emerging economies*, komplementer dengan berbagai skema lembaga finansial multilateral dan kawasan.

- BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA) - Dibentuk pada 2014 dan menjadi *framework* penyediaan dukungan likuiditas dalam merespon tekanan neraca pembayaran jangka pendek.
- Partnership for New Industrial Revolution (PartNIR) – Dibentuk pada 2018 dan merupakan *platform* BRICS untuk memaksimalkan peluang-peluang pembangunan yang terbuka dari Revolusi Industri 4.0
- Kerja sama yang erat di sektor teknologi tinggi, ketahanan pangan, dan transformasi digital juga dapat mendorong kemajuan di bidang-bidang strategis tersebut.



Menlu RI Sugiono menghadiri BRICS Plus Summit sebagai Utusan Khusus Presiden RI di Rusia, 24 Oktober 2024

Sumber: Kementerian Luar Negeri

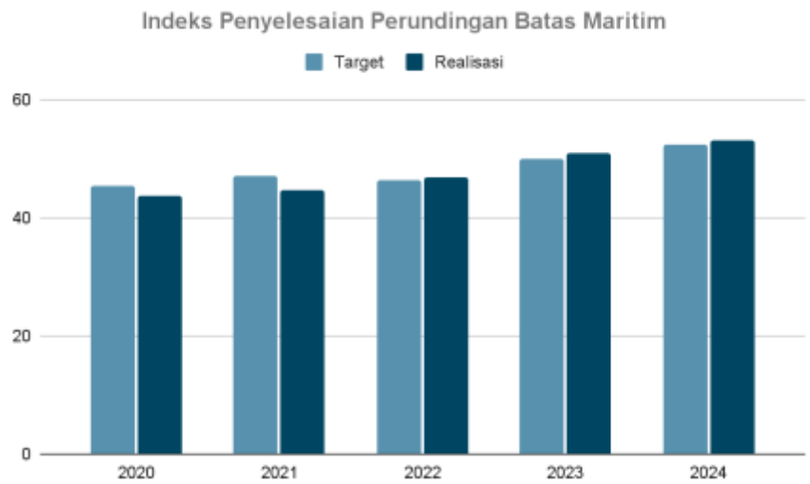
https://galeri.kemlu.go.id/galleries/pertemuan-ktt-brics-plus-di-kazan-rusia

Selain forum-forum tersebut di atas, Indonesia juga telah mengajukan permintaan untuk menjadi anggota OECD melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI kepada Sekretaris Jenderal OECD tertanggal 14 Juli 2023. Pada tahun 2024, permintaan tersebut secara consensus disetujui oleh negara anggota OECD dan proses aksesi Indonesia dimulai sejak Menko Perekonomian RI menerima Accession Roadmap dari Sekjen OECD di OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis pada bulan Mei 2024. Accession Roadmap mencakup syarat, kondisi dan proses aksesi untuk keanggotaan Indonesia. Dokumen tersebut menjadi referensi bagi setiap Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan identifikasi penyesuaian standar, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Sejak saat itu, Pemri memulai proses aksesi dengan Menyusun Initial Memorandum yang ditargetkan untuk disampaikan ke OECD pada tahun 2025. Pemri terus melakukan tindak lanjut untuk aksesi Indonesia ke OECD.

Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

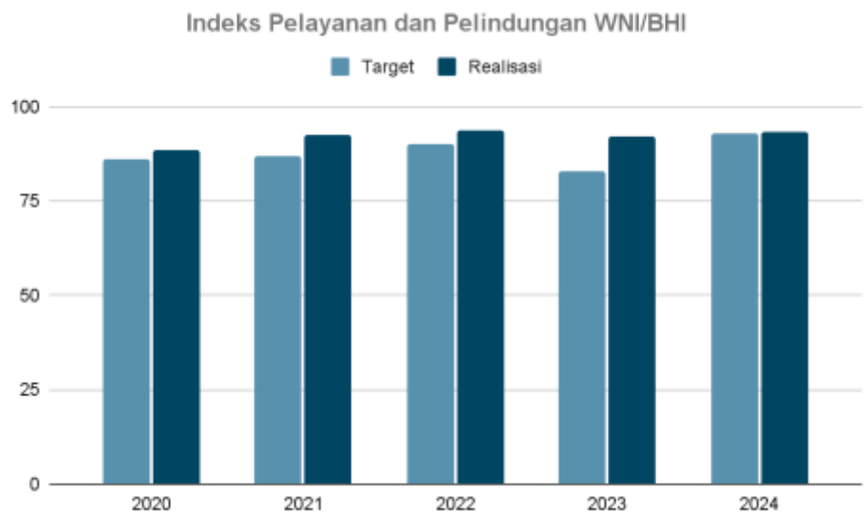
Kegiatan Pembangunan (KP) Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu Indeks kemajuan penyelesaian perundingan batas maritim (PBM) dan Indeks pelayanan dan pelindungan WNI dan BHI di luar negeri. Indeks PBM pada RPJMN ditargetkan senilai 43,2 (2020), 46,8 (2021), 50,5 (2022), 56,3 (2023), dan

57,8 (2024). Target dimaksud diturunkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) senilai 45,03 (2020), 47,17 (2021), 46,32 (2022), 49,99 (2023), dan 52,43 (2024), yang berhasil tercapai senilai 43,7 (2020), 44,58 (2021), 46,84 (2022), 50,96 (2023), dan 53,06 (2024).



Perbandingan target dan realisasi Indikator RKP Indeks Penyelesaian Perundingan Batas Maritim (2020 - 2024)
Sumber: LKJ Kemenlu 2020 - 2024

Sementara itu, Indeks pelayanan dan pelindungan pada RPJMN ditargetkan senilai 86,0 (2020), 87,0 (2021), 88,0 (2022), 89,0 (2023), 90,0 (2024). Target dalam RKP senilai 86 (2020), 87 (2021), 90 (2022), 83 (2023), dan 93 (2024), yang tercapai senilai 88,35 (2020), 92,61 (2021), 93,8 (2022), 92,17 (2023), dan 93,1 (2024).



Perbandingan target dan realisasi Indikator RKP Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI/BHI di Luar Negeri (2020 - 2024)
Sumber: LKJ Kemenlu 2020 - 2024

Keberhasilan dalam mencapai target KP dimaksud terbangun dari capaian pada level ProP, yaitu (i) Kepemimpinan dan peran Indonesia pada yang berpengaruh dalam forum multilateral di bidang HAM, (ii) Penguatan pelindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Capaian ini dapat diartikan bahwa Indonesia berhasil memperkuat eksistensinya ke dalam dan ke luar, baik melalui integritas kedaulatan maupun pelindungan bagi warga negara.

Dalam melindungi keutuhan NKRI, diplomasi dijalankan pada forum multilateral, untuk memperkuat pemahaman dan dukungan dunia internasional terhadap keutuhan wilayah Indonesia agar semakin baik dan semakin solid, yang salah satunya terlihat dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Selain itu, diplomasi kedaulatan juga dijalankan melalui perundingan penyelesaian batas negara, baik darat maupun laut. Perundingan tersebut memerlukan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan perundingannya, yang juga harus dilakukan berdasarkan hukum internasional yang berlaku, khususnya UNCLOS 1982 menyangkut batas laut.

Dalam periode Renstra 2020-2024, Indonesia telah menyelesaikan perjanjian batas maritim dengan negara sebagai berikut:

- Persetujuan Batas ZEE dengan Vietnam yang ditandatangani pada Desember 2022, setelah berunding selama 12 tahun. Persetujuan ini melengkapi batas maritim kedua negara, yang sebelumnya telah menyepakati batas Landas Kontinen di tahun 2003, dan menjadikan batas maritim kedua negara sebagai batas dual line pertama di antara negara Asia Tenggara.
- Perjanjian Batas Laut Wilayah Indonesia-Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Perjanjian Batas Laut Wilayah Indonesia-Malaysia di Selat Malaka bagian Selatan, yang ditandatangani pada Juni 2023, selesai setelah perundingan panjang selama 18 tahun.

Indonesia dan Filipina juga telah menyepakati Principles and Guidelines Batas Landas Kontinen, Oktober 2022, yang akan dijadikan rujukan penting dalam perundingan batas Landas Kontinen untuk melengkapi persetujuan Batas ZEE di Laut Sulawesi pada tahun 2014.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada 22–24 Januari 1990, Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea telah berperan sebagai forum 1,5 track diplomacy, yang terdiri dari negara anggota ASEAN dengan China dan China Taipe. Workshop telah menjadi wadah bagi para Pihak di LCS untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi, menciptakan atmosfer positif, serta mengurangi ketegangan melalui berbagai program pelatihan teknis kemaritiman. Workshop juga telah menghasilkan berbagai consensus dan proyek bersama sebagai masukan yang berharga bagi pertemuan ASEAN terkait LCS. Pada 2024, pada Workshop ke-33 terdapat 5 proyek yang telah diusulkan yaitu:

1. *Coral Reef Conservation and Crown-of-Thorns Starfish* (CoTS) Outbreak Roundtable Discussion in Southeast Asia – Chinese Taipei
2. Training Course and Roundtable on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) – Vietnam
3. Project Assessing the Roles of Mangrove Forests in People's Livelihoods and Proposing Community Based Mangrove Management Solutions: A Case Study of the Coastal Areas of Nam Dinh and Ninh Binh Province – Vietnam
4. Assessing the Marine and Coastal Ecosystem Interconnection between Bay of Bengal, Andaman Sea and Tidal in the South China Sea and Climate Change Impacts – Myanmar
5. Seminar on Capacity Building to Respond to Sea Level Rise Hazards - Indonesia

Diplomasi kedaulatan untuk memagari kedaulatan NKRI juga dilaksanakan melalui pendekatan secara bilateral, regional dan sub-regional kepada negara- negara Pasifik yang sejak lama dikenal memberikan perhatian terhadap isu-isu di wilayah timur Indonesia. Terdapat kecenderungan bahwa sikap negara-negara di kawasan ini semakin

positif terhadap Indonesia dan menghormati kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayahnya, khususnya atas Papua.

Dalam konteks regional dan sub-regional di Pasifik, diplomasi kedaulatan Indonesia dilaksanakan melalui kehadiran Indonesia sebagai mitra dialog pada Pacific Islands Forum (PIF) dan status Indonesia sebagai *Associate Member* pada Melanesian Spearhead Group (MSG). Terkait dengan penyelesaian perjanjian perbatasan, Indonesia juga melakukan perundingan dengan Palau sebagai negara tetangga yang berbatasan laut dengan Indonesia.

Sementara itu, isu pelindungan WNI menjadi prioritas politik luar negeri pada periode ini sehubungan dengan dampak pandemi, sehingga paradigma, pendekatan, dan pelayanan dikembangkan secara signifikan. Sistem pelindungan dibangun dan terus diperkuat, antara lain dengan memperkuat instrumen hukum dari undang-undang hingga Peraturan Menteri Luar Negeri, termasuk pembentukan perjanjian internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam memastikan pelayanan prima terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Indonesia berkomitmen untuk melakukan pencegahan serta upaya agar tidak ada PMI yang menjadi korban TPPO. Selain itu saat ini indonesia melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, berupaya secara lintas sektor untuk melakukan pemberantasan kasus TPPO.

Diplomasi Pelindungan WNI terus dikembangkan melalui penjajakan dan pembentukan perjanjian internasional yang mengatur migrasi WNI, utamanya penempatan Pekerja Migran Indonesia di tingkat profesional dan terampil, sebagai upaya proaktif memastikan terciptanya koridor migrasi WNI yang aman, tertib, dan teratur. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dinamika *aging population* dan *labour shortage* di berbagai negara tujuan non-tradisional (*pull factor*) dan tantangan bonus demografi Indonesia (*push factor*).

Kemlu bekerja sama dengan Kemenkopolhukam dan IOM Indonesia pada 6 - 9 November 2024 telah selenggarakan kegiatan *Experience and Best Practices Sharing Forum on Identifying, Screening, Investigating, and Protecting Human Trafficking Victims.*

Kegiatan melibatkan 10 (sepuluh) peserta dari aparat penegak hukum Kamboja, perwakilan K/L yang terkait isu *human trafficking*, utamanya dari Kemenkopolhukam dan Kementerian Luar Negeri RI, serta perwakilan dari International Organization for Migration (IOM).

Penyelenggaraan workshop memiliki nilai strategis, bukan hanya dari aspek berbagi pengalaman dan best practices penanganan human trafficking, akan tetapi dari aspek penguatan jejaring antar instansi terkait isu human trafficking Indonesia - Kamboja.

Selain itu, berbagai inovasi telah dilakukan, antara lain:
- Pembangunan Seafarer Corner di Cape Town, Montevideo dan Kaohsiung;
- Penunjukan Tim Hukum Pelindungan WNI yang kuat di semua negara dimana konsentrasi WNI;
- Penyusunan rencana kontijensi di semua negara yang memiliki resiko konflik dan bencana;
- Pelindungan WNI juga menjadi prioritas kurikulum pendidikan diplomat.

Inovasi digital juga terus diperkuat antara lain:
- Portal Peduli WNI menjadikan pelayanan pelindungan WNI satu pintu;
- Aplikasi bergerak Safe Travel untuk menghadirkan pelindungan melalui handphone.

Diplomasi Pelindungan WNI dilakukan di semua tingkatan:
- Di tingkat bilateral, MoU dengan negara lain guna memaksimalkan pelindungan antara lain: sistem penempatan satu kanal (*one channel system*) dengan Malaysia dan Arab Saudi sebagai negara tujuan tradisional terbesar untuk sektor domestik atau *less-skilled*;
- Di tingkat kawasan, pembentukan kerja sama ASEAN untuk penanganan kejahatan *online scam* dan pelindungan awal kapal perikanan migran;
- Di tingkat multilateral, berkontribusi aktif dalam pembentukan Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration sebagai instrumen internasional pertama yang mengatur mengenai isu migrasi secara komprehensif; dan menjadi salah satu co-sponsor dalam penyusunan Guidelines IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut.

Dalam kaitan dengan penanganan pelindungan WNI sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, tercatat:
- 212.916 kasus WNI berhasil diselesaikan;
- 211 WNI berhasil diselamatkan dari hukuman mati;
- 11 WNI korban penyanderaan berhasil dibebaskan;
- Fasilitasi Pemulangan melalui skema Repatriasi maupun Deportasi lebih dari 200.000 WNI
- Evakuasi sebanyak 1.760 WNI dari berbagai macam situasi darurat seperti konflik, bencana alam, maupun pandemi;
- Lebih dari Rp. 700 miliar hak-hak finansial WNI berhasil dikembalikan;
- Lebih dari 88.000 WNI di Luar Negeri telah difasilitasi pemberian vaksin Covid-19
- Pemberian sebanyak lebih dari 800.000 paket bantuan kepada WNI di Luar Negeri yang terdampak COVID-19.

Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional

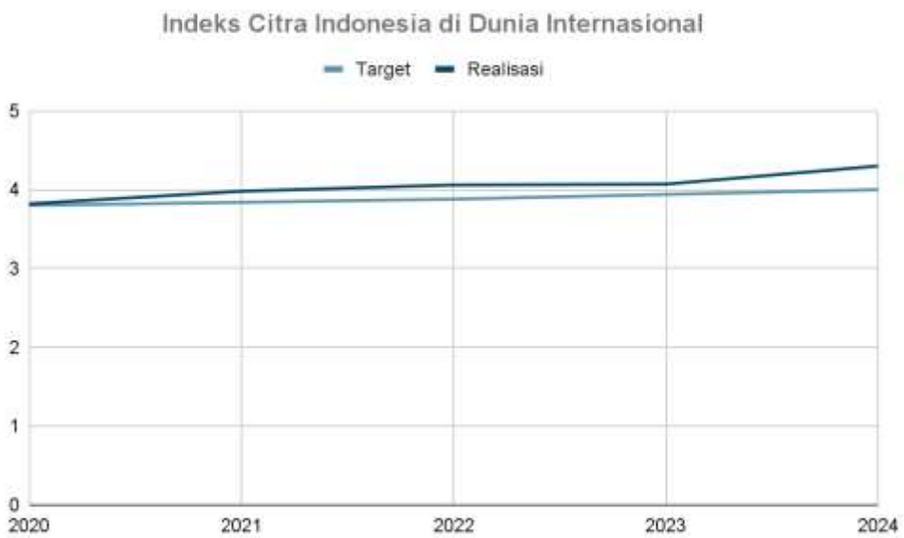
Kegiatan Pembangunan (KP) Penguatan kerja sama pembangunan internasional diukur dengan indikator Jumlah program/kegiatan kerja sama selatan-selatan/triangular yang ditargetkan pada RPJMN sebanyak 86 (2020), 100 (2021), 115 (2022), 133 (2023), dan 152 (2024). Capaian Kemenlu pada KP berikut bersumber dari keberhasilan capaian pada level ProP yang menyusun, yaitu Penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerjasama pembangunan internasional.

Pada periode ini, Indonesia Aid atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) mulai beroperasi sejak 2019 utamanya untuk mendukung kemitraan dengan negara-negara dari *Global South*. Beberapa kerja sama pembangunan yang sudah dilakukan antara lain:
- Pendanaan untuk pembangunan fasilitas kesehatan di Kepulauan Solomon dan vaksin bagi Nigeria dan Afghanistan;
- Pendanaan perbaikan fasilitas pendidikan dan infrastruktur publik di PNG ;
- Pendirian fasilitas olahraga di Kepulauan Solomon;
- Pendanaan untuk revitalisasi fasilitas ketahanan pangan di Fiji dan Gambia;

- Pendanaan proyek pembangunan Pasar Kuliner, Kerajinan dan Lainnya, Pusat Dokumentasi Migrasi Masyarakat Jawa di Suriname, dan Penerbitan Buku 130 Tahun Masyarakat Jawa di Suriname;
- Pengadaan bus sekolah di Saint Vincent dan Grenadines;
- Pendanaan proyek community connect di Antigua dan Barbuda; serta
- Berbagai pengembangan kapasitas di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, keuangan, digital dan pemberian beasiswa.

Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional

Kegiatan Pembangunan (KP) Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional diukur melalui indikator Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional yang memiliki target pada RPJMN sebesar 3,8 (2020), 3,84 (2021), 3,88 (2022), 3,94 (2023), dan 4 (2024). KP dimaksud selanjutnya diturunkan pada RKP setiap tahunnya dengan target sebesar 3,8 (2020), 3,85 (2021), 3,90 (2022), 3,95 (2023), dan 4,07 (2024). Pada pelaksanaannya, realisasi target Indeks tersebut sebesar 3,82 (2020), 3,98 (2021), 4,06 (2022), 4,07 (2023), dan 4,3 (2024).



Perbandingan target dan realisasi Indikator RKP Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (2020 - 2024)
Sumber: LKJ Kemenlu 2020 - 2024

Dapat diartikan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan citra positifnya melalui penyusunan kebijakan diplomasi publik dan turunannya. Hal ini dibuktikan juga dengan aspirasi sejumlah *think tank*, seperti Lowy Institute yang menyebutkan Indonesia sebagai "*middle power in Asia*" dengan *diplomatic influence* dan *comprehensive power* yang terus meningkat, dan diplomasi Indonesia yang berpengaruh tertinggi di Asia Tenggara pada tahun tahun 2023. Selain itu, International Chatham House juga menyebut Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang penting di Asia.

Indeks Citra sendiri merupakan Indikator Kinerja yang digunakan Kemenlu sejak 2017, mengacu pada model '*Nation Branding*' Simon Anholt yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Indeks ini diperoleh melalui hasil survei menggunakan kuesioner dengan Skala Likert 5, terdiri dari 3 dimensi, yakni Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya, Dimensi Ekonomi serta Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum. Survei tersebut dilaksanakan baik secara daring maupun luring oleh 128 Perwakilan RI di luar negeri (tidak termasuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk organisasi internasional), yang

ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di negara wilayah kerja masing-masing.

Tahun	Realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	Jumlah Responden
2017	3,81	7.035
2018	3,80	10.227
2019	3,78	12.896
2020	3,82	12.624
2021	3,98	10.356
2022	4,06	12.806
2023	4,07	19.481
2024	4,30	39.010

Berdasarkan tabel di atas capaian Indeks Citra Indonesia di dunia internasional selama periode 2017-2024 memperlihatkan tren yang terus meningkat, khususnya di 5 tahun terakhir. Hal ini diiringi dengan upaya penyempurnaan survei yang dilakukan, baik dalam hal metode pelaksanaan survei yang didukung dengan aplikasi https://citraindonesia.kemlu.go.id maupun penyempurnaan instrumen kuesioner, antara lain penyederhanaan pertanyaan survei pada tahun 2021, dari 6 menjadi 3 dimensi. Adapun jumlah responden tahun 2024 melonjak cukup besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meningkat sebesar 100% dibandingkan jumlah responden tahun 2023.

Apresiasi atas kinerja pelaksanaan diplomasi dan Politik Luar Negeri juga diperoleh dari pemangku kepentingan dalam negeri maupun internasional. Sebagai bentuk pengakuan dalam upaya pelindungan WNI khususnya pelaut dan/atau Awak Kapal di perairan internasional, Alumni dan Civitas Sekolah Tinggi Pelayaran memberikan penghargaan kepada Kementerian Luar Negeri atas dedikasi dan inovasi pelindungan WNI, salah satunya terobosan masif mencakup pendirian *seafarer* corner di tiga titik yaitu Uruguay, Afrika Selatan dan Taiwan.

Penghargaan juga diberikan oleh para Duta Besar Negara-negara Arab untuk Indonesia kepada Menteri Luar Negeri pada bulan April 2024, atas konsistensi dan keaktifan Indonesia dalam memperjuangkan Palestina di berbagai forum organisasi internasional.

Diplomasi Tematik Lainnya

Selain 4 (empat) KP yang diampu pada RPJMN, Kemenlu juga melakukan upaya diplomasi berdasarkan Prioritas 4+1 dan prioritas lainnya yang merupakan respon terhadap dinamika situasi global dan penguatan Infrastruktur Diplomasi.

1. Penguatan Perdagangan dan Investasi

Capaian perdagangan internasional Indonesia periode 2020-2024:

- Berdasarkan data BPS dan Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 ekspor total Indonesia adalah sebesar USD 264,7 miliar, dan impor sebesar USD 233,7 miliar. Hal ini menjadikan neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2024 sebesar USD 31 miliar, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan neraca perdagangan pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD 21,6 miliar.

DRAFT

- Pada tahun 2021, ekspor naik sebesar 42% dibanding tahun 2020, dan naik 26% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dunia mengalami penurunan perdagangan global, sehingga terdapat penurunan ekspor sebesar 11,34% pada perdagangan internasional Indonesia. Pada tahun 2024 nilai ekspor kembali naik 2,28% dibanding tahun 2023. Secara keseluruhan, terdapat kenaikan tren ekspor Indonesia dari tahun 2020 sebesar 62,2% pada tahun 2024.
- Tren volume perdagangan pada periode 2020-2024 juga memperlihatkan trend positif, meskipun terdapat penurunan perdagangan global yang berimbas pada Indonesia pada tahun 2023. Secara umum dibanding tahun 2020 terdapat kenaikan volume perdagangan sebesar 63,52% pada tahun 2024.

Capaian investasi:
- Realisasi investasi asing di Indonesia pada tahun 2024 mencapai USD 60 miliar; meningkat pesat jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020 yang tercatat sebesar USD 28.67 miliar, atau naik sebesar 109%.

Guna meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan sejumlah perjanjian perdagangan dan ekonomi berhasil diselesaikan baik dalam bentuk PTA, FTA, CEPA maupun RCEP, termasuk dengan Korea, Australia, Mozambik, PEA, Chile dan Kanada, serta tengah melakukan perundingan antara
lain dengan Peru. Beberapa negosiasi perjanjian perdagangan dan ekonomi lainnya juga telah dimulai, seperti dengan Tunisia, Mauritius, Tanzania dan Gulf Cooperation Council (GCC). Selain itu, sejumlah Protokol Perdagangan juga telah diselesaikan, terutama untuk produk pertanian dan perikanan.

Berbagai inisiatif baru juga dijalankan guna memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia di berbagai kawasan, termasuk dengan melibatkan sektor swasta. Di kawasan Afrika, telah diselenggarakan Indonesia-Africa Forum (tahun 2018), Indonesia-Africa *Infrastructure Dialogue* (tahun 2019) serta Indonesia-Africa Forum ke-2 yang *back to back* dengan *High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership* (HLF MSP) (2024) yang dihadiri oleh 6 Kepala Negara Afrika dan menghasilkan 32 kesepakatan B-to-B senilai USD 3,5 miliar di sektor energi, pertahanan, kesehatan, industri strategis, dan pangan serta 5 kesepakatan G-to-G di bidang energi, kekonsuleran, kesehatan, dan regulasi farmasi. Komitmen dengan Afrika dikuatkan kembali dengan kunjungan Presiden Widodo di tahun 2023 ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan, yang menghasilkan 33 kesepakatan senilai lebih dari USD 4 miliar. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama pembangunan internasional dengan Afrika pada sektor-sektor prioritas yang menjadi kepentingan kedua belah pihak yaitu pendidikan, energi dan mineral, kesehatan, pertanian dan *peace-building*.

Di kawasan Timur Tengah, Indonesia akan terus menjaga dan meningkatkan kerja sama investasi dengan negara-negara sumber investasi seperti Persatuan Emirat Arab (PEA), Arab Saudi, dan Qatar. Kerja sama investasi ini perlu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk lebih berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya di Indonesia, seperti proyek migas, Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta pertanian.

Sementara negara-negara di kawasan Afrika Utara memiliki cadangan fosfat yang strategis dan dibutuhkan bagi ketahanan pangan Indonesia. Terdapat potensi kerja sama baru RI dengan Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Mesir, yang dapat diarahkan dalam bentuk offtaker dan/atau kerja sama investasi produksi pupuk.

Inisiatif penguatan kemitraan ekonomi juga dilakukan di berbagai kawasan, termasuk melalui:

- Indonesia-Latin America and the Caribbean Business Forum (INA-LAC) untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia sejak tahun 2019 hingga saat ini;
- Pacific Elevation dan Indonesia-Pacific Forum for Development tahun 2022 untuk kawasan Pasifik;
- Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) untuk kawasan Eropa sejak tahun 2023;
- KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum untuk negara kepulauan dan pulau kecil tahun 2023; dan,
- Indonesia – South and Central Asia (INASCA) Business Forum tahun 2024.

Ke depannya, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama dengan negara-negara tetangga yang memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia, untuk membuka peluang optimalisasi potensi ekonomi di perbatasan, termasuk akses pasar. Selain menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan juga dapat meningkatkan penghidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Upaya untuk optimalisasi potensi ekonomi tersebut, dikembangkan melalui inisiatif-inisiatif bilateral atau sub regional dalam bentuk penguatan konektivitas ataupun pembentukan kawasan ekonomi khusus di wilayah perbatasan.

Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif seperti penjajakan pembukaan jalur laut Ro-Ro Batam - Johor Bahru, revitalisasi jalur laut Ro-Ro Davao City - *General Santos City* (Filipina) - Bitung (Indonesia), serta penjajakan pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia dan Timor-Leste.

Diplomasi ekonomi juga dijalankan untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit dan produknya serta untuk memperkuat hilirisasi industri. Upaya tersebut antara lain terkait analisa dan penyusunan strategi terhadap upaya peningkatan ekspor kelapa sawit serta mengatasi kebijakan diskriminatif terhadap kelapa sawit Indonesia tahun 2020; Kajian Kerjasama mengenai *Contribution of Vegetable Oils towards Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis* tahun 2021; penegasan pandangan Indonesia mengenai, khususnya menyangkut kampanye positif kelapa sawit dalam Pertemuan G20 *Trade*, *Investment, and Industry Meeting* tahun 2022; serta penyampaian rekomendasi dalam *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Ministerial Meeting* ke-11 tahun 2023.

Diplomasi ekonomi juga diperkuat di forum multilateral dan regional seperti PBB, G20 dan ASEAN, dengan melibatkan BUMN dan sektor swasta. Pada tahun 2023, untuk pertama kalinya pengiriman pasukan perdamaian PBB menggunakan maskapai Garuda Indonesia, sementara penggunaan berbagai produk asal Indonesia di berbagai misi PBB juga terus meningkat. Indonesia juga memprakarsai Resolusi SMU PBB 74/198 yang menetapkan 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Sementara pada forum G20 di tahun 2022, Indonesia menggagas Concrete Deliverables G-to-G dengan 361 proyek senilai lebih dari USD 71 miliar. Sementara proyek swasta tercatat senilai lebih dari USD 29 miliar, diantaranya di bidang energi, kesehatan, otomotif, sumber daya alam, dan *e-commerce*. Selama Keketuaan Indonesia di G20 juga dibentuk Kelompok Kerja untuk ekonomi digital.



Sumber: Kementerian Luar Negeri
https://galeri.kemlu.go.id/galleries/konferensi-tingkat-tinggi-ktt-g20-indonesia

Pada saat Keketuaan tersebut, telah diluncurkan pula *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang didukung oleh beberapa negara mitra yaitu Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Norwegia, Denmark, dan UE. Sebagai tindak lanjut, telah diluncurkan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) pada November 2023 yang menjabarkan peta jalan strategis menuju transisi energi di Indonesia, menekankan peluang investasi substansial serta tantangan dan hambatan yang harus diatasi, melibatkan area teknis, keuangan, kebijakan, dan transisi yang adil.

Sementara di tingkat regional ASEAN tahun 2023, Indonesia menggagas ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) yang merupakan implementasi konkret dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan menghasilkan 93 proyek kerja sama senilai lebih dari USD 38,2 miliar, dimana USD 13,5 miliar diantaranya di bidang kesehatan, pengolahan mineral, dan keuangan milik swasta Indonesia.

Upaya penguatan diplomasi ekonomi juga dilaksanakan melalui rangkaian program terkait startup pada tahun 2024, yakni Startup Talks, Startup Mission to Europe Chapter Belanda dan Prancis, dan Startup Connect, yang dirancang untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital Indonesia, serta mematangkan kesiapan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Adapun outcome yang terukur 3 (tiga) bulan pasca rangkaian kegiatan antara lain, Kecilin (startup data compression) sedang dalam proses bergabung dengan German Accelerator untuk memudahkan proses penjajakan peluang ekspansi bisnis di Eropa; dan Eratani (startup agritech) sedang dalam tahap studi kelayakan dengan Yield21 dari Prancis untuk mendanai salah satu program Eratani dengan potensi investasi sebesar USD 2 juta.

2. Penguatan Penetrasi Pasar Produk Industri Strategis Indonesia di Luar Negeri.

Sepanjang periode tahun 2020 - 2024 terdapat sejumlah upaya penguatan penetrasi pasar produk industri strategis Indonesia, antara lain:

- Ekspor produk perkeretaapian PT. INKA ke Bangladesh, Selandia Baru, Filipina dan Thailand;
- Pesawat produksi PT. DI ke Filipina, Senegal, dan Thailand;
- PT Ferron Pharmaceutical Indonesia ke Inggris, Belanda dan Polandia;
- Ekspor Kapal Perang jenis Landing Platform Dock (LPD) PT PAL Indonesia ke Filipina tahun 2022 dan 2024; dan
- Distribusi vaksin PT Bio Farma ke lebih dari 150 negara serta lembaga internasional UNICEF, GAVI, dan Pan *American Health Organization* (PAHO) untuk memenuhi kebutuhan vaksin global.
- Kerja sama farmasi antara Biofarma dengan perusahaan farmasi di Ghana, Nigeria, Kenya dan Zimbabwe
- Perluasan kerja sama pemasaran produk obat-obatan Dexa Medica ke Tanzania
- Perluasan kerja sama PT DI ke kawasan Afrika Barat

Selain itu, diplomasi ekonomi juga berkontribusi terhadap upaya memperkuat kegiatan bisnis BUMN Indonesia di berbagai negara antara lain:
- Pembangunan infrastruktur di Niger, Persatuan Emirat Arab dan Filipina;
- Eksplorasi sumber daya mineral dan gas di beberapa negara: di Aljazair untuk 35 tahun kedepan; di Mnazi Bay, Tanzania; dan di Nigeria;
- Proyek pengembangan panas bumi oleh Pertamina Geothermal Energy di Kenya dan Turki;
- Penjajakan kerja sama Kementerian Luar Negeri dengan PT Sarinah mengenai sinergi promosi produk unggulan dan TTI di luar negeri;
- Proyek penyediaan mata uang Soles Peru oleh Perum Peruri;
- Investasi Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi di Venezuela bidang migas;
- Perluasan kerja sama PT Dirgantara Indonesia ke kawasan Amerika Selatan termasuk Brasil, Peru, dan Chile;
- Ekspor obat-obatan dari PT Phapros ke Peru;
- Pembangunan infrastruktur Clarin Bridge di Bohol, Filipina dan San Juan Toll Road oleh PT WIKA;
- Proyek Produk persinyalan KA untuk jalur Kukuban-Alabang dilanjutkan jalur Alabang-Calamba di Filipina oleh PT LEN Railway System (LRS) Indonesia
- Pembangunan infrastruktur North-South Commuter Railway Project sebagai proyek joint venture antara PT PP, PT Adhi Karya dan Department of Transportation Filipina;
- Rencana pengembangan bandara internasional Nicolau Lobato, Dili, Timor-Leste;
- Pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung di Timor-Leste oleh PT. Waskita Karya;
- Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Kupang - Dili yang melibatkan Bus DAMRI dan Bagong sebagai operator asal Indonesia;
- Pemasangan fiber optik di Timor–Leste oleh Telkomcel dan Icon Plus Indonesia.

Indonesia House Amsterdam (IHA), selesai direnovasi akhir 2022, telah aktif digunakan untuk promosi sepanjang 2023 dan 2024. IHA merupakan eks-Gedung KJRI Amsterdam yang diarahkan untuk menjadi infrastruktur diplomasi RI di Eropa, dengan target jangka panjang sebagai hub dinamis yang memfasilitasi kerja sama Indonesia-Eropa guna mendukung diplomasi ekonomi Indonesia.

Selain itu di bulan Juni 2023, telah resmi berdiri Indonesia Incorporated di Hong Kong sebagai kantor bersama bagi Bank Himbara, Telkom, dan Garuda Indonesia.

Kedepannya, Indonesia Incorporated juga direncanakan hadir di London, Dubai, dan New York.

Diplomasi ekonomi juga menghasilkan sejumlah investasi proyek strategis di Indonesia, antara lain:

- Pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat;
- MRT Jakarta North - South line fase 2 dan East - West line
- Kereta cepat Jakarta-Bandung dengan RRT; dan
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung di Cirata dengan UAE.
- Mekanisme pembayaran jalan tol tanpa berhenti menggunakan sistem MLFF (Multi Lane Free Flow) dari Hungaria.
- Rencana investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa serta rencana kerja sama pembangunan jalan tol Rengat Junction - Pekanbaru dengan Turki.
- Pelabuhan Patimban, Subang Jawa Barat Tahap I telah selesai dan beroperasi, saat ini pembangunan Tahap II sedang berjalan;
- Pembangunan PLTS /Solar Power Plant Project 50 MW di IKN oleh Sembcorp Utilities Pte.Ltd. (Singapura) dan PT PLN Nusantara Power;
- Pembangunan fasilitas green hidrogen di Sumatera untuk produksi 100.000 ton kubik gh per tahun oleh Sembcorp Utilities (Singapura) bersama PT PLN (PLN Primer Energy Indonesia);
- Investasi proyek pembangunan pabrik perusahaan mobil listrik VinFast (Vietnam) di Subang, Jawa Barat senilai 3,2 triliun yang dapat berkontribusi untuk turut mengembangkan ekosistem kendaraan listrik Indonesia;

Diplomasi juga bekerja untuk memfasilitasi kerja sama sektor swasta Indonesia dengan mitra di luar negeri:

- Eksplorasi migas di Tanzania dan Mozambik;
- Penetrasi obat-obatan termasuk obat onkologi ke Tanzania;
- Penetrasi produk peralatan rumah tangga Indonesia ke Mongolia;
- Pembukaan pabrik rendang di Bulgaria;
- Penetrasi produk kontrasepsi ke Peru;
- Ekspansi jaringan hotel dan resor Indonesia ke Kuba; serta
- Pendirian Sentra Distribusi UMKM di Jepang.

3. Penguatan Diplomasi di bidang Kesehatan

Tahun 2020-2022, dunia internasional dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19. Diplomasi Indonesia berada di garis terdepan, dengan mengamankan pasokan lebih dari 516 juta dosis vaksin bagi kebutuhan domestik, dimana 26,5% diantaranya adalah hibah melalui kerja sama internasional.

Sejak terpilih sebagai Co-Chair COVAX AMC Engagement Group 2021, Indonesia juga aktif mendorong akses vaksin yang lebih berkeadilan bagi negara berkembang. Hingga kini, COVAX Facility telah berhasil menyalurkan vaksin 1,97 miliar dosis ke 146 negara. Penanganan pandemi COVID-19 di tingkat nasional mendapatkan apresiasi WHO. Dirjen WHO menyebut Indonesia sebagai salah satu negara terbaik dalam penanganan pandeminya.

KBRI Yangon menggelar forum bisnis yang bertema Enhancing Pharmaceutical and Medical Devices Cooperation for Improved Health Services Indonesia-Myanmar, 12 November 2024.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Himpunan Pengembangan Ekosistem Alkes Indonesia (HIPELKI), Myanmar Chamber of Commerce for Pharmaceutical and Medical Devices (MCCPMD), serta Federasi Kamar Dagang, dan Industri Uni Myanmar (UMFCCI).

HIPELKI bersama MCCPMD sepakati untuk memulai proses pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) untuk kerja sama pelatihan serta fasilitasi investasi alat kesehatan Indonesia di Myanmar.

Selain itu KBRI Phnom Penh pada 6-8 Juni 2024 telah menyelenggarakan Health Festival di Sihanoukville dengan melibatkan Perusahaan Farmasi Indonesia (Kalbe Farma, Sanbe dan Dexa Medica). Dalam kegiatan ini juga telah dilakukan penjajakan kerja sama antara Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Khmer Soviet Friendship Hospital.

Kondisi pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan di sejumlah negara Pasifik, membuka peluang bagi Indonesia untuk hadir sebagai mitra pembangunan. Saat pandemi Covid-19, Indonesia hadir memberikan bantuan bagi Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Fiji. Pasca pandemi, perhatian dari Indonesia untuk isu kesehatan di Pasifik terus berlanjut melalui program beasiswa bagi tenaga kesehatan maupun pelatihan dan peningkatan kapasitas.



Pemberian Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Papua New Guinea dan Afghanistan di Lanud Halim Jakarta, 8 Juli 2024
Sumber: Kementerian Luar Negeri
https://galeri.kemlu.go.id/galleries/pemberian-bantuan-papua-new-guinea-dan-afghanistan

Kerja sama kesehatan antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik diharapkan dapat menjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan pelaku usaha dan bisnis dari Indonesia di bidang farmasi dan alat-alat kesehatan.

Selain itu, diplomasi juga bekerja untuk memperkuat ketahanan kesehatan, antara lain:

- Peluncuran vaksin Indovac melalui kerja sama antara Bio Farma dan Baylor College of Medicine di Amerika Serikat;
- Penguatan mekanisme kesehatan kawasan melalui *One Health Initiative* saat Keketuaan Indonesia dan ASEAN Center Public Health Emergency and Emerging Diseases (ACPHEED) di mana Indonesia menjadi salah satu *host*;
- Peluncuran Pandemic Fund saat Presidensi G20 Indonesia;
- Penguatan kerja sama bilateral di bidang farmasi dan kerja sama penelitian dan kapasitas produksi vaksin, terapi, dan diagnostik (VTD);
- Inisiasi penguatan mekanisme ketahanan Kesehatan global lewat Pandemic Treaty;
- Terpilihnya Indonesia oleh WHO sebagai salah satu hub produksi vaksin berbasis mRNA di kawasan;
- Diterimanya prakarsa Indonesia dalam dokumen APEC Leaders Declaration tahun 2021 mengenai penguatan sistem kesehatan, serta mendorong akses yang merata terhadap vaksin COVID-19 dan keperluan medis lainnya;
- Diterimanya prakarsa Indonesia untuk melakukan pertukaran informasi dan best practices terkait penanganan Covid-19 melalui penyelenggaraan IORA Virtual Meeting of CSO-Dialogue Partner Engagement on Covid-19 pada tahun 2020;
- Menjadi tuan rumah APEC Workshop on Promoting Creative Industries in the Aftermath of COVID-19 di Bali pada 16-17 Oktober 2023; dan
- Mengusung resolusi pemulihan pandemi COVID-19 pada pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF).
- Diterimanya 3 (tiga) concept note Indonesia untuk peningkatan kapasitas di bidang kesehatan dengan menggunakan pendanaan APEC sebesar USD 400 ribu pada tahun 2024.

4. Infrastruktur Diplomasi

Dukungan infrastruktur diplomasi diperlukan di tengah tingginya ekspektasi terhadap diplomat Indonesia. Dukungan infrastruktur diplomasi merupakan sebuah keharusan. Pembenahan infrastruktur fisik terus dilakukan, antara lain:

- 13 Gedung Perwakilan dan Wisma Kepala Perwakilan telah dibeli dan dibangun;
- 224 Gedung Perwakilan telah direnovasi;
- Sarana dan prasarana di kantor Pusat Kementerian Luar Negeri Jakarta juga terus dikembangkan; dan
- Gedung Pancasila, sebagai salah satu bangunan bersejarah, telah dipugar dan akan selesai pertengahan tahun ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kehidupan para Pejabat Dinas Luar Negeri Kementerian Luar Negeri terus mendapatkan perhatian. Dalam rangka meningkatkan kelayakan hidup pegawai Kementerian Luar Negeri, terus dilakukan berbagai upaya kajian, usulan dan pembahasan dengan mitra terkait Kementerian Luar Negeri atas aspek-aspek terkait kesejahteraan pegawai.

Di sisi lain Kemlu juga terus menjalankan Reformasi Birokrasi dan prinsip *good governance* secara konsisten. Kementerian Luar Negeri senantiasa berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi tidak hanya melalui peningkatan nilai namun juga kualitas peningkatan profesional SDM, tata kelola dan layanan administrasi serta kualitas pelayanan publik yang prima dari Kementerian Luar Negeri. Komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan diplomasi diharapkan dapat menyikapi dinamika tantangan dan perubahan dunia guna menjalankan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan memiliki dampak yang dapat dirasakan

langsung oleh stakeholder Kementerian Luar Negeri. Dalam 5 tahun terakhir, Kemlu telah memperoleh sejumlah penghargaan, antara lain:

- Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam pemeriksaan BPK;
- Peringkat 1 Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK tahun 2024;
- Anugerah Meritokrasi 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara;
- Peringkat 1 Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 dan peringkat 3 Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 dari Ombudsman RI;
- Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif 2023 dari Komisi Informasi Pusat.

Selain sejumlah penghargaan yang diterima, komitmen Kemlu dalam mendorong transformasi digital sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi telah menunjukkan hasil yang signifikan. Selama periode 2020–2024, Kemlu secara konsisten mengembangkan berbagai inovasi digital guna mempercepat proses pelayanan publik dan pengambilan keputusan, perubahan budaya kerja dan tata kelola, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Transformasi ini tercermin melalui implementasi berbagai sistem elektronik dalam operasional Kemlu seperti AKSI (Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi), Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi SDM, e-Office, e-Disposisi Perwakilan, Office Management System (OMS), e-Klinik hingga Kemlu Chat. Selain itu dalam hal layanan publik yang responsif, Kemlu telah menerapkan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi Portal Peduli WNI, Aplikasi Exit Permit, Paspor & Rekomendasi Visa Online Kemenlu (AEPSILON), Layanan Protokol dan Konsuler (SitProtkons), Aplikasi KMILN, Aplikasi Flight Clearance Information System (FCIS) dan Aplikasi Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT).

Komitmen tersebut telah dibuktikan dengan peningkatan kinerja Kemlu di bidang transformasi digital, di antaranya:

- Meningkatnya Nilai Indeks SPBE dari penilaian yang dilakukan oleh KemenPANRB tahun 2021 sebesar 2,87 (Baik) menjadi sebesar 3,93 (Sangat Baik) pada penilaian yang dilakukan pada tahun 2024;
- Nilai Indeks Pembangunan Statistik yang dinilai oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 sebesar 2,05 (Cukup), pada penilaian tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi sebesar 2,68 (Baik); serta
- Terjadinya peningkatan pada penilaian Indeks Cyber Security Maturity yang dilakukan oleh BSSN pada tahun 2023 sebesar 4,04 (Implementasi Terkelola) menjadi 4,06 (Implementasi Terkelola) pada penilaian tahun 2024.

Selama lima tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri telah berhasil meningkatkan jumlah unit/satuan kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Terdapat 20 (dua puluh) unit/satuan kerja Kementerian Luar Negeri yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM dan 5 (lima) diantaranya adalah predikat WBBM.

Kementerian Luar Negeri juga ditetapkan sebagai salah satu dari 19 (sembilan belas) Kementerian/Lembaga yang mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri. Kepercayaan ini diperoleh karena capaian-capaian reformasi birokrasi seperti nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah mencapai kategori A, tingkat Kapabilitas APIP telah mencapai level 3, tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah juga telah mencapai level 3, dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mencapai nilai 85,73.

DRAFT



Pisah Sambut Menlu RI di Gedung Pancasila, 21 Oktober 2024
Sumber: Kementerian Luar Negeri
https://galeri.kemlu.go.id/galleries/pisah-sambut-menteri-luar-negeri-dan-wakil-menteri-luar-negeri

Pengarusutamaan Gender

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kementerian Luar Negeri secara konsisten melaksanakan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, untuk mendukung pengembangan profesionalisme dan lingkungan kerja berperspektif gender. Pelaksanaan PUG di Kementerian maupun di Perwakilan RI tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam PembangunanNasional serta landasan pelaksanaan PUG lainnya.

Dalam upaya penguatan kelembagaan, kebijakan dan infrastruktur bagi terciptanya lingkungan kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual, Kemenlu mengeluarkan Surat Edaran Menlu No. 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Terkait SDM, Kemenlu secara rutin melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Mekanisme Tagging pada Sistem Krisna (Renja-KL), Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, pelaksanaan kegiatan Training of Trainer Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (ToT PPRG), pengintegrasian isu Gender dalam siklus penganggaran Kementerian Luar Negeri, dan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan bimtek untuk tim Pokja PUG khususnya tim Pejabat Penerima Pengaduan Tindak Pelecehan Seksual tentang pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual di lingkungan Kemlu dan Perwakilan RI.

Kemenlu juga melakukan berbagai upaya untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang inkluksif, diantaranya yaitu dengan menyelenggarakan FGD Pelayanan Publik yang

Inklusif pada 27-29 Juni 2024 dengan melibatkan KemenPANRB dan Ombudsman RI. Berbagai kebijakan dan layanan Kemlu didesain untuk penerima layanan kelompok rentan dengan melibatkan kelompok rentan agar tepat sasaran dan efektif.

Kemenlu juga berupaya meningkatkan pelayanan dengan membuat Pelayanan Terpadu Perlindungan WNI dan Pelayanan Kekonsuleran. Setelah melalui proses renovasi, ruang pelayanan publik pada Direktorat Perlindungan WNI, Kemenlu telah dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi standar dan kebutuhan bagi kelompok rentan (toilet disabilitas, ruang laktasi, tempat bermain anak,dan ramp untuk pengguna kursi roda). Berbagai fasilitas tersebut, serta kebijakan dalam pelayanan publik di Direktorat PWNI, Kemenlu telah menjadikan Direktorat PWNI sebagai penerima Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024 dari Kementerian PANRB.

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap diplomat perempuan, berbagai kebijakan telah diambil, antara lain pencabutan aturan yang menghambat karir diplomat perempuan, pembentukan *Kemlu Sisterhood* sebagai platform saling dukung para diplomat perempuan, pembangunan fasilitas fisik dukung kerja diplomat seperti day care di Kementerian Luar Negeri, anggaran yang berorientasi pada *gender responsive* serta pembuatan Aturan Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual (PPTPS). Di tahun 2022, Kementerian Luar Negeri telah memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

DRAF

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri

Sesuai amanat Presiden RI dan yang ditindaklanjuti Menteri Luar Negeri, penyelarasan visi dan misi Kementerian Luar Negeri adalah:

"Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045."

2.2 Misi Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri

Pada RPJMN 2025-2029, Kemenlu mengampu Prioritas Nasional (PN) 2 "Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru", PN 7 "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba", serta mendukung PN 8 "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur."

Untuk mendukung ketiga PN tersebut Kementerian Luar Negeri memiliki Misi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat hubungan internasional yang kondusif untuk menjaga kedaulatan NKRI dan ketahanan nasional.
2. Memajukan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan dan global yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan dan dunia.
4. Meningkatkan pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia.
5. Meningkatkan peran strategis diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional.
6. Meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, berdaulat dan berpengaruh di mata masyarakat internasional melalui penguatan postur diplomasi Indonesia.

2.3 Tujuan Kementerian Luar Negeri

1. Memantapkan integritas kedaulatan NKRI dan diplomasi ketahanan nasional.

2. Meningkatkan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

DRAFT

3. Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global yang diakui sebagai *positive force*, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia.

4. Meningkatkan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai alat strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia.

6. Meningkatkan keterlibatan aktif diaspora Indonesia secara strategis dalam pembangunan nasional.

7. Mengoptimalkan diplomasi *soft power* Indonesia dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional.

8. Memperkuat postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.

   Pelaksanaan dari tujuan Kemenlu di atas akan tergambarkan dari sejumlah Indikator yaitu: Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara, Asia Power Index (Diplomatic Influence), Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi, Persentase Kebijakan dibidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional, Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri, Persentase Peningkatan Akses dan Fasilitas bagi Diaspora Indonesia, Indeks Citra Positif di Dunia Internasional dan Angka Pembangunan Postur Diplomasi.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemenlu 2020-2024 yang telah disampaikan pada bab I, pada Renstra 2025-2029 Kemenlu masih mengadopsi indikator-indikator yang masih relevan dengan visi misi yang akan dijalankan pada periode 5 tahun kedepan. Selain itu, Kemenlu juga menambahkan beberapa indikator-indikator baru sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi Kemenlu pada pemerintahan saat ini.

Sebagai contoh, pada RPJMN 2020-2024, Kemenlu memiliki 4 (empat) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu (1) Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global, (2) Penguatan integritas NKRI dan pelindungan WNI di luar negeri, (3) Penguatan kerja sama pembangunan internasional, dan (4) Peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional, yang mana ke-empat Kegiatan Prioritas ini juga terdapat pada RPJMN 2025-2029 yang diampu Kemenlu. Selain itu, terdapat tambahan seperti penguatan diplomasi ekonomi, pelibatan diaspora Indonesia serta pembangunan postur diplomasi.

DRAFT

Pada Renstra 2025-2029 ini, Kemenlu memiliki sepuluh sasaran strategis untuk dicapai. Uraian di bawah ini menggambarkan sasaran strategis Kemenlu dimaksud, beserta indeks yang digunakan. Sebagian besar indeks tersebut telah terdapat pada RPJMN 2025-2029 yang diampu Kemenlu.

Meskipun demikian, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis tersebut, terutama dari faktor eksternal. Sebagai contoh terkait kedaulatan NKRI yang berintegritas, terdapat indikator indeks kemajuan penyelesaian perundingan perbatasan negara yang turut diampu juga oleh K/L lain. Pada Sasaran Strategis Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional, terdapat indeks Asia Power Index yang dilakukan oleh pihak ketiga. Faktor eksternal ini menimbulkan adanya resiko dalam pencapaian target-target pada indikator dimaksud.

Selain itu adanya kondisi ketidakpastian pada tatanan global, baik situasi geopolitik maupun situasi geoekonomi turut berpengaruh pada pencapaian sasaran strategis Kemenlu. Namun demikian Kemenlu akan terus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai universal, kepentingan nasional, dan prinsip multilateralisme, sehingga diharapkan Sasaran Strategis ini akan dapat tercapai.

1. Kedaulatan NKRI yang berintegritas dan diplomasi ketahanan nasional yang tangguh
   Kedaulatan NKRI adalah pelaksanaan politik luar negeri terkait penjagaan NKRI sebagai negara berdaulat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah turut dilaksanakan diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas maritim.

   Arti kata **Berintegritas** mencerminkan kondisi kesatuan dan keteguhan NKRI yang tidak tergoyahkan.

   Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi segala tantangan sebagai upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, mewujudkan tujuan nasional, dan mengembangkan kekuatan nasional.

   Arti kata **tangguh** mencerminkan sikap kuat, dan sukar dikalahkan.

   Pengukuran menggunakan Indikator Persentase Kemajuan Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional, dengan target 90% dari tahun 2025 hingga 94% pada tahun 2029.

2. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal
   Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

   Diplomasi Ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral, regional dan multilateral untuk memajukan

DRAFT

kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam sektor perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial, kerja sama pembangunan internasional, dan bidang lainnya.

Optimal diartikan paling baik dan tertinggi.

Pengukuran menggunakan Indeks efektivitas diplomasi ekonomi, dengan target 76 pada tahun 2025 dan 80 pada tahun 2029.

Efektivitas diplomasi ekonomi adalah pengukuran kinerja diplomasi ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat luas. Indeks ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan, investasi dan pariwisata.

3. Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional
   Kepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional.

   Peran diartikan sumbangsih, partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

   Berpengaruh adalah memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan isu-isu di tingkat regional dan global.

   Internasional adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, baik di tingkat bilateral, regional, dan global.

   Pengukuran menggunakan Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional, dengan target 4,1 pada tahun 2025 hingga 4,5 pada tahun 2029. Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional adalah indeks yang mengukur pengaruh dan kepemimpinan Indonesia terhadap rekomendasi dan Prakarsa pengambilan kebijakan isu-isu bilateral, regional dan global serta partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Indonesia pada forum regional, multilateral dan dunia Internasional.

4. Menguatnya kerja sama pembangunan Internasional
   Kerja sama pembangunan internasional (KSPI) adalah salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan Indonesia dengan negara-negara lain. Melalui kerja sama ini, diharapkan Indonesia dapat berkontribusi bagi pencapaian agenda pembangunan global, terutama bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang, sekaligus sebagai alat *soft diplomacy* bagi Indonesia.

   Kuat berarti memiliki keunggulan yang akurat dan aktual.

   Pengukuran menggunakan persentase kebijakan dibidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia, dengan target 20% pada tahun 2025 hingga 100% pada tahun

DRAFT

2029. Penilaian capaian dan keberhasilan diukur dari proses berkelanjutan yang ditempuh. Sebagai contoh pada tahun 2025: tersusunnya *zero draft Grand Strategy* Kerja Sama Pembangunan Internasional (20%).

5. Peningkatan Citra positif Indonesia dan Peran Diaspora dalam Pembangunan Nasional
   Meningkat adalah beralih pada keadaan yang menjadi lebih baik.

   Citra positif Indonesia adalah persepsi yang dipercayai/diyakini *stakeholders* lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional, pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan power yang dimiliki baik yang bersifat hard maupun soft. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi maupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.

   Diaspora Indonesia adalah Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dengan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

   Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keberhasilan misi dan *engagement* Indonesia di luar negeri, khususnya pada 4 (empat) sektor, yaitu Brain Gain/Peningkatan Kapasitas SDM, Ekonomi, Sosial Budaya, dan perluasan jejaring internasional dan global.

   Pengukuran menggunakan Indeks Citra Positif di Dunia Internasional, dengan target sebesar 4,10 pada tahun 2025 hingga 4,18 pada tahun 2029. Hasil pengumpulan Indeks yang dilaksanakan oleh Perwakilan RI tersebut mengukur kesan atau pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia.

6. Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif dan Pelayanan Publik yang Prima
   Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaan dan hukum internasional. Pelindungan juga memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata WNI mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pelayanan publik yang prima meliputi kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kemenlu dan Perwakilan RI. Masyarakat Indonesia yang berada di

DRAFT

luar negeri membutuhkan pelayanan dan pelindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pengukuran menggunakan:

1. Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri, dengan target 93,5 pada tahun 2025 dan 95,5 pada tahun 2029. Indeks ini mengukur upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaan dan hukum internasional.

2. Nilai Persepsi kepuasan pelayanan publik dengan target 4 dari tahun 2025 hingga 2029. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. Nilai ini berkisar dari 1-4. Survei dilakukan dengan pemberian kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada para responden terkait dimensi pelayanan publik yang dilakukan. Data survei diolah menggunakan skala likert menjadi indeks yang dikonversi menjadi nilai persepsi.

7. Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi

   Dukungan adalah sokongan/bantuan.

   Komitmen adalah (upaya) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.

   Kebijakan luar negeri adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

   Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

   Tinggi adalah (mendukung) secara penuh.

   Pengukuran menggunakan persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri, dengan target 98,20 pada tahun 2025 dan 98,60 pada tahun 2029 serta indeks pengaruh rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terhadap kebijakan pemangku kepentingan dengan target 3,33 (skala 4) pada tahun 2025 dan 3,44 (skala 4) pada tahun 2029.

8. Diplomasi bilateral, regional dan multilateral yang kuat

DRAFT

Diplomasi Bilateral adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri antara dua negara.
Diplomasi Regional adalah adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam kerja sama di kawasan.
Diplomasi Multilateral adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam kerja sama yang melibatkan banyak negara/internasional.
Kuat adalah adalah teguh, tidak mudah goyah dan mempunyai keunggulan.

Pengukuran menggunakan persentase kesepakatan bilateral yang dihasilkan dengan target 97,45% pada tahun 2025 hingga 97,65% pada tahun 2029 serta Persentase Gagasan, Prakarsa atau Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Regional dan/atau Multilateral dengan target 75% pada tahun 2025 dan 77% pada tahun 2029.

9. Postur diplomasi yang tangguh
Postur diplomasi memuat:
   - Penguatan kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan organisasi Perwakilan RI untuk menjaga relevansinya dengan dinamika hubungan internasional global.
   - Penguatan infrastruktur diplomasi, yang mencakup pengembangan kompetensi SDM, dukungan penganggaran, serta sarana prasarana dan infrastruktur fisik dan teknologi informasi serta keamanan informasi; serta
   - Penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan penyelenggaraan kebijakan luar negeri dan diplomasi yang terintegrasi dan selaras.

Diplomasi tangguh merupakan diplomasi total yang strategis agar Indonesia mampu bersaing di dunia internasional yang kompetitif.

Pengukuran pada Sasaran Strategis ini menggunakan:
1. Angka pembangunan postur diplomasi, dengan target 5 pada tahun 2025 dan 40 pada tahun 2029. Penilaian berdasarkan rentang angka 1-100 sesuai tahapan pembangunan postur diplomasi.

   Target Tahun 2025-2029
   5: Tersusunnya rekomendasi kebijakan *Postur Diplomacy* (Rekomendasi kebijakan terkait penyusunan metadata smart diplomacy; strategi pemenuhan gap antara kondisi ideal smart diplomacy dengan kondisi eksisting; roadmap pencapaian postur diplomasi)
   10: Tersusunnya kebijakan terkait pembangunan postur smart diplomacy
   15: Terpenuhinya 5,5% dari target pemenuhan postur 2027-2034 (skenario 18 tahun pemenuhan)
   20: Terpenuhinya 11% dari target pemenuhan postur 2027-2034 (skenario 18 tahun pemenuhan)
   25: Terpenuhinya 16,5% dari target pemenuhan postur 2027-2034 (skenario 18 tahun pemenuhan)

DRAFT

2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemlu dengan target 83 pada tahun 2025 dan 85 pada tahun 2029. Penilaian dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*. Penilaian Reformasi Birokrasi merujuk pada Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

3. Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu dengan target 81 pada tahun 2025 dan 82 pada tahun 2029. Penilaian ini merupakan evaluasi perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen meliputi Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%).

4. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu dengan target 4 (WTP) pada tahun 2025 sampai tahun 2029. Penilaian ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

   Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kemenlu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LK Kemenlu disusun merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LK, dan merupakan suatu kesatuan/konsolidasi dari 145 Satuan Kerja (Satker), yang terdiri dari 13 Satker Pusat dan 132 Satker Perwakilan RI. Keakuratan data dari 145 Satker tersebut akan sangat mendukung pada kualitas LK Kemenlu.

DRAFT

Indikasi Risiko
Sasaran Strategis Kemenlu 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
1.	Kedaulatan NKRI yang berintegritas	1. Adanya perubahan kebijakan atau prioritas kegiatan terkait penegasan batas darat dan kerja sama lintas batas. 2. Belum tercapainya kesamaan pandangan antar K/L terkait posisi Pemri serta kesepakatan dengan negara mitra sehingga menghambat proses pembentukan dan implementasi PI dimaksud. 3. Tidak terlaksananya atau tidak maksimalnya pelaksanaan rapat koordinasi untuk persiapan menghadiri penyelenggaraan pertemuan bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan isu-isu kelautan. 4. Terbatasnya wakil K/L dalam menghadiri pertemuan pada isu hukum laut pada organisasi internasional.
2.	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal	1. Kurangnya dukungan dan koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan domestik lain (pelaku usaha, asosiasi, dll.) untuk meningkatkan diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, investasi dan pariwisata. 2. Kurangnya ketertarikan negara mitra untuk meningkatkan hubungan ekonomi seperti investasi dan perdagangan di komoditas yang menjadi prioritas bagi Indonesia, termasuk dengan penerapan berbagai hambatan perdagangan. 3. Tidak tercapainya target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. 4. Penyelenggaraan kegiatan mengalami penundaan disebabkan oleh perubahan prioritas dan arahan pimpinan, kurangnya koordinasi, pengalihan anggaran, serta keterbatasan waktu dalam melakukan persiapan kegiatan. 5. Kurangnya identifikasi dan pemanfaatan peluang kerja sama ekonomi baru maupun pengembangan sektor potensial dengan negara mitra. 6. Dinamika persaingan geopolitik dan geoekonomi, instabilitas geopolitik dan geoekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi global (termasuk pada sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata). 7. Kurangnya pengetahuan para pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta terkait potensi ekonomi dan pembangunan negara-negara mitra terutama mitra non-tradisional Indonesia. 8. Ketersediaan data dan analisis pasar yang andal sebagai dasar perumusan kebijakan serta promosi diplomasi ekonomi yang belum memadai.
3.	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang	1. Ketidakberhasilan pencalonan Indonesia di Organisasi Internasional antara lain karena ditunda/dibatalkannya proses pemilihan.

DRAFT

	berpengaruh di tingkat internasional	2. Komitmen dan kapasitas kementerian/lembaga lain dalam mendukung kontribusi finansial pada organisasi internasional belum memadai. 3. Pemanfaatan database KKOI untuk evaluasi keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional belum optimal. 4. Prakarsa dan rekomendasi Indonesia belum diterima dalam pertemuan tingkat tinggi baik regional ataupun multilateral. 5. Jadwal pertemuan dengan mitra tidak disepakati. 6. Pertemuan yang dipimpin Indonesia tidak menghasilkan kesepakatan. 7. Kertas posisi tidak tersusun secara komprehensif. 8. Belum optimalnya perencanaan strategi nasional terkait pencalonan dan sinergi di antara K/L. 9. Tidak diterimanya usulan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi/pertemuan yang berada di bawah OI/PBB. 10. Tidak ada tindak lanjut hasil rekomendasi dari sidang yang diikuti dari forum multilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional. 11. Rendahnya kehadiran perwakilan Pemerintah Indonesia pada sidang multilateral atau sidang internasional lainnya. 12. Rapat koordinasi penyusunan posisi Indonesia dengan instansi terkait tidak terlaksana.
4.	Menguatnya kerja sama pembangunan Internasional	1. Kondisi geopolitik seperti peperangan, perubahan iklim dan hambatan perdagangan yang berdampak pada supply dan demand bantuan KSPI. 2. Tidak disepakatinya sebagian klausul pada kesepakatan di bidang KSPI oleh negara penerima. 3. Terdapat kendala dari negara penerima sehingga kegiatan beresiko mundur dari tanggal pelaksanaan atau carry over ke tahun anggaran selanjutnya. 4. Pengunduran waktu penetapan Surat Keputusan Daftar Rencana Pemberian Hibah. 5. Tidak terlaksananya scoping mission/feasibility study/monev sesuai waktu yang telah ditetapkan akibat perkembangan politik dalam negeri. 6. Faktor eksternal berupa mekanisme internal Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan komitmen tertinggi pimpinan masing-masing negara yang mempengaruhi kecepatan dan proses penandatanganan perjanjian kerja sama. 7. Untuk kerja sama non-bilateral yang bersifat multi-beneficiary, diperlukan pengaturan dan perjanjian berbeda untuk setiap negara. 8. Pemahaman K/L terkait sebagai instansi pelaksana kegiatan kerja sama peningkatan kapasitas yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada tahapan perencanaan. 9. Penyaluran dana KSPI melibatkan kementerian dan lembaga lain sehingga sinergi diperlukan dalam Pokja Penilai Usulan Hibah dan Tim Kornas Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.

DRAFT

		10. Untuk skema kerja sama berbasis pembangunan infrastruktur, menuntut koordinasi sedini mungkin dengan otorita pemangku kebijakan di negara resipien mengingat regulasi tentang konstruksi, material dan standar keselamatan yang berbeda dengan Indonesia. 11. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang melakukan konsolidasi berbagai bentuk KSPI.
5.	Citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat	1. Data indeks citra Indonesia di Dunia Internasional yang tidak valid. 2. Munculnya pemberitaan media massa internasional yang bersentimen negatif terhadap kebijakan luar negeri atau kondisi Indonesia. 3. Minimnya informasi yang diperoleh WNA mengenai Indonesia di negara akreditasi. 4. Belum terdapat strategi utama yang menjadi panduan dan terintegrasi antara K/L.
6.	Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif	1. Keterbatasan akses bantuan hukum, disebabkan sistem hukum negara setempat yang tidak mendukung. 2. Koordinasi antar K/L yang kurang optimal, disebabkan akses data dan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. 3. Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi oleh perwakilan RI di luar negeri, disebabkan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata. 4. Kurangnya sinkronisasi kebijakan dan tindakan antar K/L, disebabkan perbedaan mandat dan fokus antar K/L. 5. Kurangnya sinkronisasi antar K/L dalam forum internasional, disebabkan belum adanya mekanisme penyelarasan substansi antar K/L yang konsisten. 6. Kurangnya sinkronisasi antar K/L berdampak terlambatnya penyusunan dan implementasi Regulasi Pelindungan WNI, disebabkan perbedaan visi, prioritas dan kepentingan antar K/L. 7. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan layanan kekonsuleran yang berkualitas di seluruh perwakilan RI, disebabkan terdapat perbedaan kondisi geografis, jumlah WNI yang ditangani serta beban kerja pada perwakilan RI. 8. Belum optimalnya kualitas layanan kekonsuleran di seluruh perwakilan RI mencakup standar pelayanan, kecepatan maupun kepuasan pengguna layanan, disebabkan perbedaan kapasitas SDM termasuk sarana pendukung antar perwakilan RI di luar negeri. 9. Pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang belum setara antara PNA di Indonesia dengan perwakilan RI di negara akreditasi, disebabkan terbatasnya hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diterima perwakilan RI di

DRAFT

		negara akreditasi akibat peraturan perundangan di negara setempat. 10. Terhambatnya pemberian rekomendasi fasilitas diplomatik perpajakan, importasi barang dan kendaraan bermotor bagi PNA/OI yang tidak sesuai target, disebabkan kurangnya sinkronisasi kebijakan dan tindakan antar K/L akibat perbedaan mandat dan fokus.
7.	Keterlibatan diaspora Indonesia secara aktif dalam pembangunan nasional	1. Belum terdapat strategi utama Peningkatan Peran Aktif Diaspora dalam Pembangunan Nasional. 2. Program dan kebijakan pemerintah masih belum mencapai ekspektasi Diaspora.
8.	Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi	1. Perbedaan prioritas dan kepentingan antara K/L maupun mitra terkait dengan perjanjian maupun kesepakatan internasional yang menyebabkan tidak adanya atau terhambatnya tindak lanjut. 2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi publik terkait manfaat dan urgensi kesepakatan internasional yang berimplikasi pada rendahnya dukungan publik. 3. Tidak adanya implementasi konkret dari pemangku kepentingan domestik terhadap kesepakatan yang telah terjalin dengan negara mitra dalam pertemuan-pertemuan ASEAN di tingkat Pejabat Tinggi (SOM), Menteri, dan Kepala Negara. 4. Tidak adanya tindak lanjut Data Economic Intelligence oleh pemangku kepentingan dalam negeri. 5. Kurangnya pemahaman publik mengenai pentingnya kebijakan luar negeri RI dan kesepakatan internasional yang melibatkan Indonesia akibat tidak optimalnya diseminasi hasil kesepakatan beserta dampaknya ataupun rekomendasi hasil sidang internasional, baik di kalangan umum, akademisi, praktisi dan LSM. 6. Koordinasi dan mekanisme monev antar K/L guna tindak lanjut hasil kesepakatan serta penyesuaian perubahan kelembagaan pada administrasi pemerintahan baru yang belum berjalan optimal. 7. Keterbatasan anggaran yang dapat menyebabkan ketidaksiapan instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan. 8. Tidak sinkronnya aspirasi publik dengan posisi, kebijakan, maupun kesepakatan Indonesia dalam kebijakan luar negeri dengan negara mitra maupun pada organisasi internasional.

DRAFT

9.	Diplomasi bilateral, regional dan multilateral yang kuat	1. Terbatasnya partisipasi atau representasi Indonesia dalam pertemuan dan sidang regional maupun multilateral karena keterbatasan sumber daya (manusia dan anggaran). 2. Belum tercapainya kesepakatan posisi dasar Indonesia dengan K/L terkait. 3. Berkurangnya dukungan terhadap Indonesia dan rendahnya tingkat kerja sama dengan negara lain baik pada lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. 4. Penyelenggaraan pertemuan mekanisme bilateral yang sangat tergantung pada kesediaan jadwal pejabat pada tingkat yang disepakati, (contoh pertemuan Sidang Komisi Bersama pada tingkat Menteri Luar Negeri). 5. Keterbatasan sumber daya (manusia dan anggaran) untuk proses persiapan pembahasan isu bilateral, negosiasi, maupun implementasi kerja sama bilateral dengan negara mitra. 6. Pembatasan jumlah delegasi dan kehadiran delegasi untuk hadir berpartisipasi pada sidang regional maupun multilateral. 7. Perbedaan kepentingan nasional dan/atau prioritas Pemri dengan negara mitra. 8. Perubahan prioritas dan kebijakan negara mitra yang berdampak pada kelangsungan kerja sama atau pembahasan isu strategis yang sedang berlangsung. 9. Dinamika politik di negara mitra yang mengakibatkan kevakuman politik dan pada keberlanjutan proses negosiasi, penyelesaian/penandatanganan, hingga pelaksanaan kesepakatan bilateral. 10. Kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dengan perwakilan RI di luar negeri mengenai data yang menjadi prioritas, relevan, dan urgen mengenai data economic intelligence yang diperoleh di negara akreditasi sesuai kebutuhan. 11. Kurangnya koordinasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pertemuan regional. 12. Kurangnya koherensi posisi dasar Pemri di antara K/L terkait dalam pertemuan internasional dan optimalisasi kesepakatan posisi dasar Indonesia dengan K/L terkait. 13. Keterlibatan dan peran Perwakilan RI di negara-negara anggota dalam penjajakan posisi negara anggota organisasi regional yang belum optimal. 14. Komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang belum maksimal untuk berpartisipasi pada forum diskusi regional yang disebabkan oleh dinamika geopolitik dan geoekonomi.
10.	Postur diplomasi yang tangguh	1. Penyelenggaraan kegiatan Pimpinan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. 2. Ketidaksesuaian atau perubahan regulasi hukum yang berakibat pada pembentukan peraturan yang kurang efektif atau bahkan tidak sah secara hukum.

DRAFT

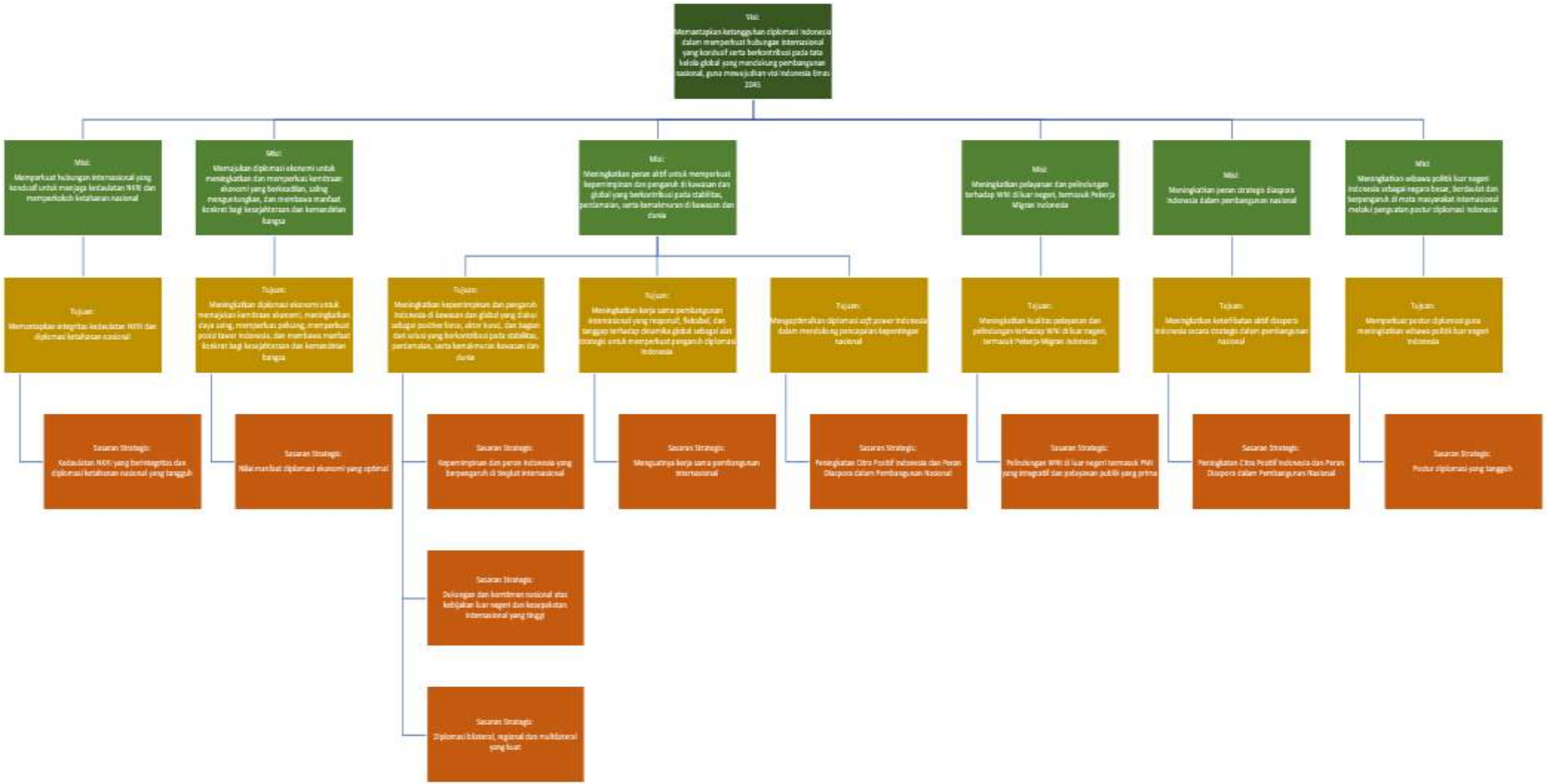
		3. Perbedaan budaya kerja antara Kemenlu dengan K/L lain atau Pemda yang bisa menghambat kolaborasi dan mengakibatkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan atau tindakan yang diperlukan. 4. Tidak tercapainya nilai RB Kementerian Luar Negeri sesuai target. 5. Tidak seluruh Satker dan Perwakilan RI menyampaikan LKj secara tepat waktu dan tidak dilengkapi dengan analisa capaian kinerja yang memadai. 6. Ketidaktepatan proses penetapan target kinerja sehingga perencanaan kinerja belum optimal. 7. ABT yang diusulkan Kemlu tidak sepenuhnya disetujui oleh Kemenkeu. 8. Rendahnya realisasi anggaran Kemenlu karena banyaknya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di akhir tahun. 9. akses informasi yang terbatas dari para pemangku kepentingan sehingga mempengaruhi proses sinkronisasi dan sinergi kebijakan pelaksanaan hubungan luar negeri sebagai bagian dari penyusunan postur diplomasi. 10. Tidak regular atau tertundanya Dialog Kinerja Organisasi. 11. Data dukung untuk sistem merit tidak tersaji secara maksimal. 12. Belum terintegrasinya sistem manajemen SDM di Kemenlu dengan sistem nasional. 13. Pengelolaan asset yang kurang optimal seperti ketidaksesuaian dalam pencatatan asset, pemeliharaan sarana dan prasarana, pemanfaatan sistem pengadaan secara maksimal. 14. Kekurangan Jumlah Asesor Teknis dalam pelaksanaan Uji Kompetensi. Hal ini disebabkan karena beberapa Asesor Teknis yang telah mendapatkan pelatihan sudah memasuki usia pensiun sementara belum dilakukan briefing untuk Asesor Teknis yang baru, sehingga memerlukan perencanaan yang matang dan berkelanjutan terkait penyediaan SDM yang kompeten untuk menjadi Asesor Teknis Uji Kompetensi. 15. Metode pelaksanaan Uji Kompetensi yang melibatkan pihak ketiga, terutama untuk pengujian kompetensi Manajerial Sosial Kultural (MSK) tidak seragam. Pemilihan pihak ketiga sangat bergantung pada jumlah peserta dan jumlah anggaran yang tersedia, sehingga memerlukan perencanaan yang matang dan berkelanjutan dalam hal pengadaan penyelenggaraan UKOM. 16. Sistem informasi terkait jabatan fungsional yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan pengembangan yang diharapkan. 17. Follow up CORPU dan HCDP tidak selesai sesuai yang ditargetkan. 18. Tata Kelola digital belum dapat berjalan optimal, termasuk penerapan keamanan informasi dan siber yang belum optimal. 19. Terganggunya layanan data dan teknologi informasi.

DRAFT

		20. Belum optimalnya tata kelola pengawasan intern berbasis risiko.

DRAFT

2.5 Bagan *Cascading* Visi – Misi – Tujuan – Sasaran Strategis



Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah dan Kebijakan Luar Negeri kedepan akan mengikuti dan mendukung arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diundangkan melalui Undang-Undang nomor 59 tahun 2024.

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045 merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang disusun untuk periode lima tahun. RPJPN 2025-2045 memiliki tujuan utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang Bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan.

Terdapat lima sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission.*

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut, ditetapkan delapan misi pembangunan, yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;**
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan.

Pada tahap pertama RPJPN, yaitu pada tahun 2025-2029, pembangunan dititikberatkan pada penguatan transformasi. Beberapa titik berat program antara lain pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, peningkatan kualitas SDM, upaya lanjutan proses hilirisasi SDA unggulan, penerapan ekonomi hijau, hingga perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, transformasi kelembagaan hukum.

Melalui **misi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**, telah ditetapkan arah pembangunan, salah satunya Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan. Diplomasi Tangguh merupakan diplomasi total yang sinergis meliputi diplomasi ekonomi, budaya, kedaulatan, kepemimpinan, pelindungan dan publik. Diplomasi tangguh bersifat strategis, proaktif, sinergis, dan berkelanjutan antar bidang diplomasi yang dilakukan para pemangku kepentingan meliputi perumus kebijakan dan

DRAFT

pelaku hubungan luar negeri lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah, dan didukung dengan modalitas yang andal.

Kebijakan luar negeri Indonesia akan dioptimalkan untuk memantapkan kepemimpinan yang lebih proaktif guna menjaga stabilitas kawasan dan global serta berperan penting dalam pembentukan tatanan internasional. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah: (i) penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai agenda setter di tingkat regional, utamanya dalam menjadi effective leader di ASEAN, dan global; (ii) pemantapan tata kelola kebijakan luar negeri guna merespon dinamika geopolitik dan geoekonomi, serta disrupsi teknologi digital dan perubahan iklim; (iii) penguatan kedaulatan, hak berdaulat, kerja sama pertahanan dan keamanan guna penguatan kapabilitas pertahanan negara, serta menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia; (iv) pemajuan nilai, budaya, dan ideologi guna peningkatan citra Indonesia di dunia internasional; serta (v) penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional untuk memperteguh diplomasi dan posisi Indonesia di kawasan dan global.

Ketangguhan diplomasi akan difokuskan pada diplomasi antara lain terkait isu kedaulatan, diplomasi ekonomi, kepemimpinan Indonesia, Kerja Sama Pembangunan Internasional, Diplomasi Publik, Pelindungan WNI, diplomasi di tingkat bilateral, regional hingga multilateral serta penguatan Postur Diplomasi.

Pada tahap pertama RPJPN ini, pengembangan diplomasi difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJMN 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi Asta Cita Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta berpedoman pada RPJPN 2025 – 2045 serta Visi Indonesia Emas 2045.

Visi Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah:

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dicapai melalui 8 Misi Asta Cita yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

DRAFT

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari kedelapan misi Asta Cita tersebut, Kemenlu terutama berperan dalam Pelaksanaan Asta Cita 2 yaitu “Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.” dan Asta Cita 7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.” Kemenlu juga turut berperan pada Asta Cita 8 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”, terutama terkait pengembangan diplomasi kebudayaan.

PN 2 Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sistem pertahanan keamanan negara tersebut mencakup pula upaya diplomasi dan Politik Luar Negeri.

Dalam kaitan ini dipandang perlu upaya untuk terus meningkatkan wibawa Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional, dengan memantapkan supremasi kepemimpinan Indonesia di tingkat global melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif.

Sementara itu Kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Untuk itu pembangunan nasional perlu difokuskan pada upaya mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan; dan sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya.

Selain itu perlu dikedepankan ekonomi hijau untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang

DRAFT

ada, serta ekonomi biru untuk menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan Indonesia.

Dapat ditambahkan bahwa Perempuan memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dalam ekonomi hijau, perempuan berkontribusi melalui praktik ramah lingkungan di rumah tangga, usaha kecil berbasis alam, serta kepemimpinan dalam pelestarian sumber daya alam. Sementara dalam ekonomi biru, perempuan berperan dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, pelestarian ekosistem pesisir, dan pengembangan potensi maritim yang tidak merusak lingkungan. Pemberdayaan perempuan di kedua sektor ini akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus memperhatikan perspektif gender agar potensi perempuan sebagai agen perubahan dapat dioptimalkan sepenuhnya.

PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Aspek yang krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab adalah reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi dan pemakaian narkoba, ataupun upaya untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan pelindungan kepada seluruh WNI, baik di dalam maupun luar negeri.

Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Hal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang bisa menghambat potensinya.

PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Pada prioritas nasional ini diharapkan setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Kemenlu memiliki peran yang cukup penting dalam rangka menyebarkan nilai-nilai toleransi antarumat beragama yang dimiliki Indonesia kepada masyarakat internasional melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan ataupun diikuti. Selain itu, Kemenlu juga mengembangkan nilai dan warisan budaya Indonesia di dunia internasional agar memiliki manfaat bagi pembangunan nasional.

Pada tataran PP di RPJMN 2025-2029, terdapat 4 (empat) Kegiatan Prioritas (KP) pada PP Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi, antara lain (i) Percepatan penyelesaian

DRAFT

perjanjian batas maritim dan Darat Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema Good Neighbour Policy, (ii) Penguatan kepemimpinan di tingkat global melalui peran aktif dalam fora dan organisasi internasional, pembangunan, postur diplomasi serta pelibatan diaspora indonesia, (iii) Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional, dan (iv) Penguatan diplomasi ekonomi. Selain itu, Kemenlu mengampu 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) pada PP Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia, yaitu Pelindungan dan Pelayanan WNI termasuk PMI di Luar Negeri yang Integratif.

Kementerian Luar Negeri juga mendukung arah kebijakan nasional dalam mewujudkan kesetaraan gender, antara lain melalui penguatan sistem Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan luar negeri, diplomasi pelindungan, dan kerja sama pembangunan. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN 2025–2029 serta memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya terkait isu perempuan dan perdamaian, pemajuan hak-hak kelompok rentan, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Dalam mewujudkan visi dan misi Kemenlu yang dijelaskan pada bab II dokumen ini, Kemenlu memiliki delapan Arah Kebijakan berikut Strategi Kebijakannya. Arah kebijakan dan strategi kebijakan ini juga disesuaikan dengan Tujuan Kemenlu, sehingga terdapat keselarasan pada dokumen perencanaan.

Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian akan dilaksanakan dalam Program Kementerian Luar Negeri. Hingga tahun 2025, Kemenlu memiliki lima program, yaitu:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional;
2. Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja Sama Multilateral;
3. Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional;
4. Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

Namun, berdasarkan Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan atas nama Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 4 tahun 2025 dan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan nomor 2/MK/AG/2025 TANGGAL 23 Juli 2025 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga, maka pada tahun 2026 dan seterusnya, Program Kemenlu ditajamkan menjadi tiga program yaitu:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional
2. Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik
3. Program Dukungan Manajemen.

Catatan:
Usulan penajaman program disampaikan Kemenlu melalui Surat Menteri Luar Negeri nomor 409/PR/05/2025/03/01 tanggal 16 Mei 2025 perihal Usulan Penyesuaian Informasi Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Luar Negeri TA 2026.

DRAFT

Lebih lanjut, penajaman Program Kementerian Luar Negeri dan turunannya dilaksanakan dengan semangat penyelarasan sistem perencanaan dan penganggaran, dengan tugas dan fungsi, serta sasaran dan outcome strategis yang perlu dicapai Kementerian Luar Negeri sesuai perencanaan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri

Berkaca dari RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemenlu 2020-2024 lalu, pada Renstra 2025-2029 ini Kemenlu mengadopsi arah kebijakan yang masih relevan dengan visi misi, serta menambahkan beberapa arah kebijakan baru sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi Kemenlu pada pemerintahan ini.

Arah kebijakan Kemenlu pada tahun 2025-2029 ini adalah:

1. Penguatan integritas kedaulatan NKRI yang mendukung ketahanan nasional;
2. Peningkatan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia;
3. Peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan regional dan global sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia;
4. Peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, berkesinambungan, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia;
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia dan pelayanan publik yang prima;
6. Peningkatan keterlibatan aktif potensi diaspora Indonesia dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional;
7. Peningkatan diplomasi *soft power* untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional; dan
8. Penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.

3.2.2 Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri

1. Arah kebijakan penguatan integritas kedaulatan NKRI yang mendukung ketahanan nasional memiliki strategi sebagai berikut:
   a. Meningkatkan kemajuan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip "*good fences make good neighbors*".
   b. Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk menjaga meneguhkan kedaulatan dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   c. Mendukung penguatan ekonomi nasional dari sektor ekonomi berbasis sumber daya maritim, baik dalam bentuk perikanan maupun mineral dan hidrokarbon.
   d. Mendorong peningkatan kerja sama bidang keamanan dan keselamatan laut, termasuk *search and rescue*, penanganan bencana di laut dan pesisir, serta pelindungan lingkungan laut dan pesisir.

DRAFT

e. Meningkatkan diplomasi Indonesia di bidang keamanan dan kejahatan siber dalam kerangka PBB dan ASEAN, serta memajukan pembahasan dan implementasi konvensi PBB terkait maupun norma-norma sukarela yang tidak mengikat di ruang siber.
f. Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM serta toleransi agama di forum Internasional.
g. Meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim melalui mekanisme bilateral, regional dan multilateral seperti *ASEAN Maritime Forum, Expanded ASEAN Maritime Forum* dan/atau mekanisme lainnya.
h. Memantapkan implementasi Traktat *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) dan *Plan of Action 2018-2022* serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh *Nuclear-Weapon States*.
i. Mendorong universalisasi TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan implementasi *Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles)* ke kawasan yang lebih luas.
j. Meningkatkan upaya menciptakan situasi yang kondusif di Laut China Selatan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dan melalui peningkatan *Practical Maritime Cooperation* antara ASEAN dan RRT.
k. Mengedepankan kerja sama dan dialog serta meminimalisasi konfrontasi dan politisasi; pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum yang diimbangi dengan pendekatan kultural dan keagamaan di forum kerja sama ASEAN.
l. Mendorong kontribusi dan pemanfaatan negara-negara anggota ASEAN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (ASEAN-IPR) dalam membangun perdamaian dan resolusi konflik di kawasan.
m. Mendorong penguatan stabilitas dan perdamaian kawasan melalui kerja sama pertahanan praktis di bawah mekanisme *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus.
n. Mendorong penguatan dan peningkatan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas di kawasan melalui berbagai mekanisme seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD).
o. Memperkuat kerja sama dan kolaborasi, menciptakan atmosfer positif, serta mengurangi ketegangan antara lain dengan *1,5 track diplomacy* melalui *Managing Conflict on South China Sea Workshop* dengan berbagai program pelatihan teknis kemaritiman;
p. Memberikan dukungan perumusan strategi kebijakan berkaitan dengan perkembangan geopolitik dan geoekonomi pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.

2. Arah kebijakan peningkatan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia memiliki strategi sebagai berikut:
   a. Mendorong transformasi pertanian Indonesia, termasuk penguatan swasembada pangan, melalui kerja sama internasional di bidang teknologi pertanian, riset

DRAFT

agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan.

b. Memperluas kemitraan strategis di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) melalui diplomasi energi, promosi investasi hijau, serta pengembangan rantai pasok global yang mendukung transisi energi nasional.
c. Memfasilitasi ekspansi BUMN Indonesia di pasar global melalui promosi branding BUMN *Go Global* serta dukungan dan kolaborasi dalam program promosi terpadu di luar negeri.
d. Mengembangkan ekosistem startup nasional melalui kerja sama internasional di bidang inovasi digital, teknologi kecerdasan buatan, serta peningkatan mobilitas dan kapasitas talenta muda Indonesia.
e. Mendorong penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum ekonomi internasional guna melindungi kepentingan nasional.
f. Mengarusutamakan diplomasi ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, melalui penguatan kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara.
g. Menggalang dukungan internasional bagi pembangunan hijau di Indonesia melalui optimalisasi akses terhadap pendanaan iklim, promosi investasi hijau, dan diplomasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis prinsip keadilan iklim.
h. Memperkuat kerja sama maritim regional dan global untuk mendukung penguatan ekonomi biru (blue economy), perlindungan sumber daya laut, konektivitas, serta peningkatan kapasitas.
i. Mendorong perluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara-negara potensial non-tradisional guna mengantisipasi fluktuasi perdagangan eksisting, terutama negara besar.
j. Mendorong pemanfaatan instrumen kebijakan ekonomi negara/wilayah akreditasi untuk kepentingan Indonesia, terutama pada proyek strategis nasional, perluasan basis produksi industri manufaktur, hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan.
k. Mendorong finalisasi Grand Design Diplomasi Ekonomi;
l. Mendorong finalisasi Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (*Pacific Elevation*);
m. Memperkuat strategi kebijakan luar negeri yang mendukung Asta Cita, seperti isu ketahanan pangan, energi dan air,
n. Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan lainnya.
o. Mendorong Pemanfaatan dashboard Investolink dan pengembangan Sistem Informasi Diplomasi Ekonomi (SIDE) dalam mendukung upaya penguatan diplomasi ekonomi.

3. Arah kebijakan peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan regional dan global sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia memiliki strategi sebagai berikut:
   a. Meningkatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan prinsip

DRAFT

politik luar negeri bebas aktif, di OI seperti PBB, maupun lembaga multilateral lainnya.

b. Melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral, regional, maupun multilateral sesuai dengan amanat konstitusi, serta memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
c. Mengintensifkan dan memperluas diplomasi *soft power*, termasuk diplomasi budaya di forum internasional untuk melestarikan warisan budaya nasional, terutamanya memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia.
d. Memperkuat kerja sama multilateral dan regional dalam isu-isu terkait perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, migrasi, kebencanaan, demokrasi, kerja sama ekonomi strategis, pembangunan berkelanjutan, kemaritiman, lingkungan hidup, serta kemitraan strategis, kesehatan global, kependudukan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, pariwisata, kerja sama parlemen, dan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai badan utama dan subsider PBB serta forum kerja sama multilateral dan regional lainnya yang menguntungkan kepentingan nasional.
e. Memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui partisipasi aktif pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, khususnya Indonesia sebagai negara se
f. Memperkuat kerja sama multilateral dalam mendorong reformasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan reformasi tata kelola proses multilateral lainnya agar lebih inklusif, adil, dan *fit-for-purpose* dalam mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan *Global South.*
g. Mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada pelbagai forum internasional dan kawasan, terutamanya keanggotaan baru pada BRICS, untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang makin mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan *Global South.*
h. Melanjutkan proses aksesi keanggotaan Indonesia ke OECD.
i. Memperkuat peran Indonesia di ASEAN.
j. Mendorong pengarusutamaan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang sejalan dengan Visi Komunitas ASEAN 2045 sebagai implementasi "*ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) for the Future-Ready ASEAN and ASEAN-Centered Regional Architecture*" yang disepakati pada KTT ASEAN ke-44 dan merupakan inisiatif Indonesia. Deklarasi ini bertujuan untuk menjaga momentum agar AOIP tetap menjadi panduan dalam pembangunan Komunitas ASEAN dan arsitektur kawasan ke depan, serta menggarisbawahi pentingnya penggunaan pendekatan komprehensif dan inklusif dalam menjawab perubahan geopolitik dan geoekonomi kawasan.
k. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mendorong kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara ASEAN serta *ASEAN-led mechanisms* secara lebih produktif dan konstruktif bagi penciptaan arsitektur kawasan yang sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk melalui penguatan institusi ASEAN dan eksplorasi bentuk kerja sama baru ASEAN dengan mitra yang lebih inovatif dan adaptif.

DRAFT

l. Mengimplementasikan berbagai program pada Tiga Pilar ASEAN yaitu Politik Keamanan, Ekonomi dan Sosial Budaya yang tertuang dalam dokumen *ASEAN Community Vision 2045.*
m. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mendorong stabilitas kawasan dan sentralitas ASEAN dalam penanganan isu-isu keamanan tradisional dan nontradisional melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF), termasuk mendorong ARF untuk berperan dalam perwujudan kerja sama yang telah diidentifikasi dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.
n. Mendorong penguatan mandat *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dalam pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan.
o. Mendorong penguatan mandat AICHR, sebagai overarching body dalam pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan termasuk dalam pengarusutamaan HAM di seluruh kegiatan *ASEAN Sectoral Bodies* (ASB) sesuai dengan *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD) dalam rangka mewujudkan komunitas ASEAN.
p. Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan melalui mekanisme ASEAN, terutama mendorong implementasi secara efektif dan menyeluruh *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), termasuk penyelesaian *Code of Conduct in the South China Sea* (COC) yang efektif, substantif, dan *actionable*.
q. Mendorong penyelesaian damai dan berkelanjutan atas krisis Myanmar melalui fasilitasi dialog inklusif, penguatan peran ASEAN, serta kerja sama regional dan internasional guna mewujudkan stabilitas dan perdamaian kawasan.
r. Meningkatkan peran Indonesia baik melalui mekanisme bilateral maupun ASEAN dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar guna tercapainya repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi para pengungsi serta mendorong terciptanya stabilitas keamanan di Rakhine State.
s. Meningkatkan kerja sama dan *trust-building* di kawasan Indo-Pasifik yang terfokus pada pengembangan kerja sama kemaritiman, konektivitas dan infrastruktur, serta Pembangunan.
t. Menunjukkan kepemimpinan Indonesia selaku koordinator kemitraan ASEAN-Australia periode 2024-2027 melalui 4 (empat) prioritas utama sebagaimana disampaikan pada 57th AMM/PMC pada Juli 2024, dalam bidang politik (terkait pencegahan konflik dan pengelolaan krisis; kerja sama maritim; mendorong transparansi dan non-proliferasi di kawasan), dalam bidang ekonomi (terkait ketahanan pangan; transisi energi yang berkeadilan; serta implementasi efektif *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) dan RCEP), dalam bidang sosial budaya (terkait pemanfaatan *ASEAN-Australia Centre*), dan dalam Implementasi AOIP (dengan memanfaatkan kemitraan ASEAN-Australia sebagai sarana dalam meningkatkan engagement dengan *Pacific Island Forum* (PIF) dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA)).
u. Mendorong finalisasi penyusunan Pernyataan Bersama ASEAN-Australia tentang pencegahan konflik, untuk disepakati dalam KTT ke-5 ASEAN-Australia pada Oktober 2025, serta mendorong implementasi seminar track 1.0 tentang pencegahan konflik.
v. Mendorong pemanfaatan upaya Australia dalam meningkatkan investasi dan perdagangan dua arah di kawasan Asia Tenggara dan untuk mengakomodasi

DRAFT

kepentingan Indonesia dalam bidang ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan pembangunan *Joint Ventures*, pertukaran pengetahuan, serta fasilitas pendanaan di sektor-sektor prioritas melalui implementasi *Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040*.

w. Mendorong pemanfaatan *Southeast Asia (Regional) Development Partnership Plan 2024-2028* (SEA DPP) senilai AUD 1,3 miliar untuk mendukung prioritas Indonesia dalam ketahanan pangan, kesehatan, dan penguatan UMKM.
x. Menunjukkan kepemimpinan Indonesia selaku koordinator kemitraan ASEAN-Kanada periode 2027-2030 dalam meningkatkan kerja sama di berbagai bidang prioritas di antaranya ketahanan pangan, kejahatan lintas batas, dan kesehatan.
y. Mendorong finalisasi penyusunan pembaharuan *Plan of Action* dengan Mitra Wicara ASEAN yaitu RRT, Korea Selatan, India, Selandia Baru, Kanada, Rusia, dan dengan Organisasi Internasional PBB yang akan disahkan pada KTT dengan mitra pada Oktober 2025.
z. Mengoptimalisasi keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB periode 2024-2026 untuk mendorong upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat kawasan dan global, serta untuk memastikan terjaganya kedaulatan dan integritas NKRI pada pembahasan terkait isu hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), *indigenous people*, dan pelanggaran hak asasi manusia.
aa. Memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB dalam rangka mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efisien, efektif, objektif, transparan, adil, non-politis, dan imparsial, serta memajukan dialog konstruktif sebagai mekanisme Dewan HAM PBB dengan berorientasi pada hasil.
bb. Meningkatkan kapasitas negara-negara, termasuk mengurangi ketidaksetaraan antar negara, dalam rangka upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
cc. Memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka kerja sama bilateral, regional dan multilateral, terutama melalui implementasi Instrumen HAM internasional seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women/CEDAW), serta komitmen berbagai kesepakatan internasional seperti BPfA dan SDGs
dd. Mempromosikan pelindungan hak-hak pekerja migran, khususnya perempuan, termasuk melalui fasilitasi berbagai resolusi Dewan HAM PBB maupun Komite III Majelis Umum PBB dalam rangka menghilangkan kekerasan terhadap pekerja migran.
ee. Memanfaatkan Keketuaan Indonesia di forum multilateral Developing 8 (D-8) untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
ff. Mendorong keterwakilan Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia untuk menduduki posisi-posisi strategis di organisasi internasional guna memastikan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia dalam proses penyusunan norma dan atau kebijakan organisasi internasional.
gg. Menegaskan kepemimpinan Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan peran Indonesia sebagai ketua dan/atau tuan rumah pertemuan serta pusat koordinasi kerja sama regional dan internasional yang berlokasi di Indonesia. Memperkuat dialog perumusan kebijakan luar negeri (di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,

DRAFT

pertahanan dan keamanan) melalui *Policy Planning Dialogue* dengan mitra strategis;

hh. Meningkatkan kemitraan dengan akademisi dan lembaga think tank dan mendorong peran dan kontribusinya dalam perumusan strategi kebijakan nasional terkait kerja sama di berbagai Kawasan dan forum multilateral, serta isu khusus;

ii. Melaksanakan survei dan penyusunan *foresight* untuk mempersiapkan strategi kebijakan dalam menghadapi tantangan global dan regional ke depan, termasuk trend-trend global. Mendorong Kemitraan antara Parlemen dan Pemerintah dan antar-Parlemen Negara Anggota ASEAN (AIPA) dalam memastikan keselarasan berbagai kesepakatan di ASEAN.

jj. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan upaya-upaya peace-making di berbagai tataran melalui pengembangan kemitraan dengan jaringan dan organisasi mediasi di tingkat regional dan global lainnya.

4. Arah kebijakan peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, berkesinambungan, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai instrument strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia memiliki strategi sebagai berikut:
   a. Menguatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional melalui peningkatan engagement dengan Pemerintah Asing/Lembaga Asing di kawasan prioritas, termasuk yang dalam pelaksanaannya dapat menggandeng mitra-mitra pembangunan dan pemangku multi-pihak, serta turut mempromosikan keterlibatan *Centers of Excellence* (antara lain, namun tidak terbatas pada balai-balai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia) yang tersebar di seluruh Indonesia.
   b. Memperkuat kontribusi Indonesia dalam kerja sama pembangunan global, sesuai kawasan/negara dan isu prioritas yang ditetapkan sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia yang mempertimbangkan kebutuhan/permintaan negara mitra dan kepentingan nasional, antara lain melalui program pembangunan kapasitas dan pelatihan, hibah barang, dan pembangunan infrastruktur.
   c. Memperkuat konsistensi kontribusi Indonesia sebagai donor pembangunan internasional melalui bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah konflik, terutama Palestina.
   d. Memperkuat kemampuan Indonesia dalam tanggap darurat dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi negara asing.
   e. Memperluas cakupan tawaran dukungan pengembangan kapasitas dari Indonesia bagi negara negara berkembang.

5. Arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia dan pelayanan publik yang primamemiliki strategi sebagai berikut:
   a. Mendorong inovasi berkelanjutan serta integrasi sistem informasi pelayanan dan pelindungan bersama pemangku kepentingan terkait;
   b. Fokus pada aspek pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat serta penjaminan standar kualitas layanan yang bersifat responsif gender termasuk kemudahan akses dan keterjangkauan sesuai ketentuan berlaku;

DRAFT

c. Memperkuat tata kelola pelayanan dan pelindungan, harmonisasi kebijakan dan regulasi, mendukung perolehan data WNI di luar negeri yang lebih lengkap, akurat, serta terpilah, konsolidasi sistem monitoring dan evaluasi, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
d. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pelayanan dan pelindungan;
e. Mengoptimalkan diplomasi pelindungan WNI di luar negeri dengan mendorong implementasi instrumen hukum yang berlaku, peningkatan peran dalam pembentukan norma pada berbagai forum kerja sama maupun *platform* lainnya, baik di tingkat nasional, bilateral, regional serta multilateral.
f. Meningkatkan efektivitas pelindungan WNI di luar negeri dengan memperkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar K/L pemangku kepentingan terkait lainnya.

6. Arah kebijakan peningkatan keterlibatan aktif potensi diaspora Indonesia dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional memiliki strategi sebagai berikut:
   a. Melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI yang menetap atau bekerja di luar negeri.
   b. Memperkuat aspek kelembagaan dan regulasi terkait penanganan diaspora Indonesia.
   c. Mengoptimalkan potensi diaspora Indonesia terutama pada sektor riset dan inovasi, seni budaya, olahraga, serta ekonomi, perdagangan, dan investasi.
   d. Optimalisasi peran Indonesianis untuk Diplomasi Indonesia: Kolaborasi Global dalam Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Kebijakan Berkelanjutan.
   e. Pembentukan platform Satu Diaspora yang direncanakan akan dikembangkan dari situs iocs.kemlu.go.id yang saat ini merupakan situs untuk pendaftaran KMILN.
   f. Penyusunan MoU dan Perjanjian Kerja Sama terkait penyusunan database diaspora.
   g. Penyusunan PKS dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait optimalisasi peran diaspora yang juga merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan juga kemudahan bagi diaspora Indonesia berstatus WNA untuk bekerja di Indonesia.
   h. Menjajaki potensi kerja sama dengan Kementerian Imigrasi terkait kemudahan kebijakan imigrasi bagi diaspora Indonesia dan juga dengan Himbara untuk memperluas fasilitas di sektor perbankan untuk diaspora Indonesia.

7. Arah kebijakan peningkatan diplomasi *soft power* untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional memiliki strategi sebagai berikut:
   a. Mendorong diplomasi kebudayaan, antara lain dengan memperkuat promosi seni dan tradisi Indonesia di berbagai forum regional dan internasional serta melalui kerja sama kebudayaan dengan mitra.
   b. Memperkuat pengembangan diplomasi olahraga, dengan mendorong partisipasi aktif Indonesia dalam ajang olahraga regional dan internasional, serta menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala regional dan global.

DRAFT

c. Meningkatkan peran dan sinergi aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif.
d. Menjadikan *Grand Strategy* Diplomasi *Soft Power* Indonesia sebagai referensi dalam pelaksanaan diplomasi *soft power* yang efektif, terarah, dan tepat sasaran guna mencapai kepentingan nasional, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.
   Grand Strategy Diplomasi *Soft Power* Indonesia memiliki 4 klaster aset *soft power* yang saling beririsan, yaitu:
   - Klaster Politik dan Nilai Kebangsaan
     Memperkuat peran Indonesia sebagai model koeksistensi multikultural yang demokratis, toleran, dan damai di tingkat global
   - Klaster Ekonomi dan Pariwisata
     Meningkatkan citra positif melalui pariwisata sebagai penggerak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor ekonomi dan bisnis
   - Klaster Sosial Budaya
     Mengarusutamakan diplomasi sosial dan budaya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi global dan pusat kebudayaan dunia
   - Klaster Pendidikan, Riset dan Inovasi
     Memperkuat kepemimpinan global Indonesia melalui pengembangan pendidikan, riset, dan inovasi strategis
e. Mengoptimalisasi pelaksanaan pemetaan aset soft power Indonesia, penyusunan roadmap strategi promosi aset soft power unggulan ke negara potensial, serta implementasinya melalui penyelenggaraan promosi aset soft power unggulan Indonesia.

8. Arah kebijakan penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia memiliki strategi sebagai berikut:
   a. Penyusunan *Road Map* pemenuhan postur diplomasi sebagai salah satu referensi utama dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi Kemenlu untuk mewujudkan diplomasi Tangguh.
   b. Memperkuat Infrastruktur dan sumber daya diplomasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan/ penyelenggaraan kebijakan luar negeri
   c. Mendirikan dan mengembangkan Unit Assessment Center terakreditasi nasional yang berkontribusi pada penerapan manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan sistem merit
   d. Memperkuat kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia melalui pengembangan kemampuan komponen postur diplomasi
   e. Memperkuat strategi transformasi digital sebagai upaya penguatan *diplomatic tools* Kemlu.
   f. Memperkuat manajemen talenta berdasarkan sistem merit melalui SIMTalenta untuk mendukung mobilitas talenta dan pengembangan karier SDM Kementerian Luar Negeri.
   g. Memperkuat interkoneksi sistem informasi kepegawaian dan manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dengan sistem informasi ASN nasional guna menunjang pemetaan dan pengembangan karier secara nasional.

DRAFT

h. Memperkuat kesejahteraan dan layanan kepegawaian terpadu bagi SDM Kementerian Luar Negeri untuk mendukung kinerja pegawai dan organisasi.
i. Mendukung penguatan kapasitas SDM berperspektif gender dan membentuk tim penggerak PUG lintas unit.
j. Memperkuat kemitraan strategis antara manajemen dan aparat pengawas intern untuk mendukung kinerja diplomasi yang efektif dan bernilai tambah.

Mitigasi Risiko

Berdasarkan arah kebijakan luar negeri dimaksud, dipetakan risiko yang perlu dimitigasi dengan mempertimbangkan analisis SWOT Kementerian Luar Negeri.

Risiko Politik	Probabilitas	Dampak	a. Konsekuensi	Mitigasi
Sikap tegas Indonesia dalam isu-isu tertentu menjadi hambatan dalam proses negosiasi dan pencapaian konsensus dalam forum multilateral	Sedang	Sedang-Tinggi	a. Tertundanya pencapaian konsensus dalam forum multilateral b. Berkurangnya ruang diplomasi Indonesia dalam forum tertentu	a. Penguatan aliansi Indonesia dengan negara-negara *like-minded* b. Pendekatan bilateral dengan negara-negara oposisi dengan semangat *bridge-building*
Risiko Eksternal	Probabilitas	Dampak	b. Konsekuensi	Mitigasi
Krisis geopolitik berkelanjutan yang memicu krisis ekonomi dan instabilitas finansial	Sedang	Besar	a. Terdisrupsinya upaya diplomasi ekonomi b. Posisi Indonesia yang dirugikan dalam rantai pasok dan perdagangan global	a. Diversifikasi mitra dagang dan komoditas b. Mengintensifikasi kerja sama dalam kerangka multilateral (a.l. RCEP, ASEAN) untuk menghindari dampak kolateral rivalitas negara-negara tertentu
Pemberitaan negatif terhadap situasi domestik dan kebijakan luar negeri RI oleh media internasional	Sedang	Sedang	Terdisrupsinya opini publik tentang citra Indonesia c.	c. *Engagement* dan *familiarization trip* dengan editor dan jurnalis media asing bersama Perwakilan RI
Berkurangya dukungan publik	Rendah	Besar	a. Resistansi publik, demonstrasi atas	a. *Engagement* dengan K/L dan parlemen terkait

DRAFT

domestik terhadap kebijakan luar negeri RI			kebijakan tertentu b. Peningkatan pemberitaan negatif oleh media internasional	perkembangan kebijakan luar negeri pada tiap tahun anggaran b. Peningkatan upaya diplomasi publik melalui presensi di media dan juru bicara
Risiko Pemangku Kepentingan	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Antusiasme konstituen *Grand Design* yang dibangun oleh Kemenlu belum optimal (a.l. MILN, masy. Pasifik)	Rendah	Sedang	Tidak terealisasinya berbagai potensi diplomasi RI	a. Pemetaan *quick wins* dan manfaat (a.l. penyediaan hibah, fasilitas) untuk menunjukkan komitmen nyata Indonesia b. Penyusunan narasi integrasi dengan agenda regional/global yang lebih besar (a.l. SDGs, Paris Agreement) c. *Engagement* dengan konstituen sejak awal penyusunan *Grand Design* guna menumbuhkan *sense of ownership*
Kurang sinkronnya kebijakan penempatan dan pelindungan PMI, utamanya dengan restrukturisasi K/L pengampu	Tinggi	Sedang	c. Meningkatnya jumlah PMI nonprosedural Inefisiensi anggaran (a.l. biaya repatriasi) dan duplikasi program	d. Peningkatan tata kelola migrasi dari hulu hingga hilir melalui kemitraan dengan KemenP2MI, Kemenimipas, Kemnaker, dan K/L terkait lainnya
Risiko Administratif	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Pergantian pejabat dalam tim perundingan batas maritim secara berkala	Tinggi	Sedang	a. Terhambatnya efektivitas dan kesinambungan perundingan batas maritim	a. Persiapan sistem manajemen pengetahuan dan arsip diplomatik digital untuk

DRAFT

sehubungan dengan panjangnya periode negosiasi			d. Melemahnya posisi tawar Indonesia terhadap negara mitra	*institutional knowledge* b. Penyesuaian prosedur internal seperti rotasi terbatas (*buffer time*) untuk pejabat kunci dalam perundingan strategis
Risiko Anggaran	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Penurunan atau efisiensi pagu anggaran Kementerian Luar Negeri	Tinggi	Besar	Berkurangnya kapasitas fiskal untuk kegiatan pelaksanaan tusi Kemenlu dan kemampuan untuk memenuhi target tahunan	Penyiapan *contingency plan* dengan anggaran minimal/pascaefisiensi sejak awal tahun anggaran, dengan skenario yang masih dapat mempertahankan target unit organisasi
Berkurangnya alokasi pendanaan untuk kerja sama pembangunan internasional sehubungan dengan program prioritas pembangunan nasional	Sedang	Sedang	Berkurangnya kapasitas fiskal untuk penyediaan bantuan materiil	a. Penyiapan *contingency plan* dengan sumber anggaran di luar Rupiah murni b. Peningkatan bentuk kemitraan teknis yang menggunakan minimal anggaran

DRAFT

Sebagai catatan, tingkat probabilitas dan dampak bersifat dinamis ataupun berubah seiring perubahan dan perkembangan situasi baik di tingkat nasional maupun global.

3.3 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kemenlu telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri dan Permenlu No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Dalam periode 2025-2029, Kemenlu akan menyusun berbagai peraturan/kebijakan guna mendukung pencapaian visi misi Kemenlu. Peraturan/kebijakan tersebut antara lain terkait tata kelola perjanjian internasional, penetapan garis batas laut dengan negara tetangga, hubungan luar negeri, isu-isu terkait politik luar negeri hingga manajemen internal.

Dapat disampaikan bahwa penyusunan kerangka regulasi yang akan dilaksanakan pada periode kedepan ada yang bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai K/L. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika dan proses penetapan peraturan tersebut.

Adapun penyusunan kerangka regulasi yang akan dilaksanakan guna pencapaian sasaran strategis mencakup:

1. Rancangan UU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
2. Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
3. Rancangan UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif
4. Rancangan UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Laut Sulawesi
5. Rancangan UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka Bagian Selatan
6. RPP Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/ Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/ Dudanya
7. RPerpres tentang Kebijakan Pemberian Hibah
8. Perpres tentang Organisasi Perwakilan RI
9. RPerpres Grand Design Diplomasi Ekonomi
10. RPerpres Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di kawasan Pasifik (*Pacific Elevation*)
11. RPerpres Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok
12. RPerpres tentang Grand Design Strategy Kerja Sama Pembangunan Internasional
13. RPerpres tentang Diaspora Indonesia
14. Rancangan Perubahan Perpres No 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional ASEAN
15. RPermenlu tentang Tata Cara Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
16. RPermenlu tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
17. RPermenlu tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia
18. RPermenlu Perubahan Permenlu No. 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan dan atau Perwakilan Berbahaya
19. RPermenlu tentang Perencanaan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing
20. Permenlu tentang Pegawai Setempat
21. RPermenlu tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI
22. RPermenlu tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemenlu dan Perwakilan RI

DRAFT

23. RPermenlu tentang Peta Jalan Standarisasi Arsitektur Infrastruktur TIK Kemenlu
24. RPermenlu tentang Tata Kelola Berita Diplomatik dalam Hubungan Luar Negeri
25. RPermenlu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri
26. RPermenlu tentang Perubahan atas Permenlu Nomor 19 tahun 2020 tentang Tata Kelola Data Diplomasi
27. RPermenlu tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
28. RPermenlu tentang Tata Kelola Berita Diplomatik dalam Hubungan Luar Negeri
29. RPermenlu tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
30. RPermenlu tentang Petunjuk Teknis Layanan Akses Aplikasi SIMKEU dan Nota Hasil Verifikasi Online
31. RPermenlu tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Diplomat
32. RPermenlu tentang perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI
33. RPermenlu tentang perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI
34. RPermenlu tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
35. RPermenlu tentang Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional
36. RPermenlu tentang Pencabutan Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat
37. RPermenlu tentang Pencabutan Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat
38. RPermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
39. RPermenlu tentang Tata Cara Penerbitan Izin Diplomatik Kapal Laut Asing Tidak Berjadwal

DRAFT

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Luar Negeri periode 2025-2029 diarahkan untuk mentransformasikan kelembagaan Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Penguatan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri yang menegaskan tugas Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, salah satu dari delapan misi (agenda) pembangunan adalah “memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan

memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan. Lebih lanjut disebutkan bahwa pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. Pendekatan transformasi kelembagaan Kementerian Luar Negeri merujuk pada arah transformasi tata kelola nasional melalui perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, efektif, kolaboratif dan agile; proses bisnis yang adaptif; peningkatan kualitas ASN berbasis merit dan ASN yang kompetitif; integrasi manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi, serta peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dalam rangka mewujudkan kelembagaan diplomasi yang andal mengantarkan Indonesia sebagai global player.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Kementerian Luar Negeri perlu didukung oleh kerangka organisasi, tata laksana/proses bisnis, dan SDM aparatur yang tepat, efektif, kompeten, dan adaptif baik di tingkat Pusat maupun Perwakilan Republik Indonesia. Dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal serta peningkatan tuntutan publik, hal tersebut perlu dilengkapi dengan tata kelola yang optimal, manajemen risiko yang terintegrasi dan pengendalian intern yang efektif dan berkelanjutan pada lingkup organisasi, tata laksana dan SDM aparatur.

Untuk menjamin tata kelola yang efektif, pendekatan Three Lines Model menjadi landasan penting, dengan manajemen organisasi selaku lini pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan langsung fungsi dan layanan diplomatik, dan manajemen sebagai lini kedua berperan dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebagai bagian dari lini ketiga, memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang optimal melalui perumusan rekomendasi yang solutif atas isu strategis guna meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kolaborasi antar lini untuk mendukung diplomasi secara berkelanjutan.

DRAFT

A. Penguatan Kelembagaan

1. Peran strategis Kementerian Luar Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Sebagai bagian dari triumvirat, Kementerian yang berada dalam Kelompok I pada Organisasi Kementerian Negara atau Kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Luar Negeri berada dalam jajaran kementerian strategis yang menangani fungsi inti negara terutama dalam aspek hubungan luar negeri dan diplomasi. Peran ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan perubahannya (Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024) serta Peraturan Presiden Nomor 140 tentang Organisasi Kementerian Negara, termasuk di dalamnya Perwakilan luar negeri sebagai bagian struktur organisasi Kementerian Luar Negeri.

- Sebagai koordinator utama hubungan luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Kemlu harus berperan aktif dalam memastikan sinkronisasi dan koordinasi antara kebijakan luar negeri dan kebijakan nasional lintas sektor, termasuk dengan kementerian dan lembaga maupun aktor hubungan luar negeri lainnya.
- Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Menteri Luar Negeri memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.
- Dalam Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, politik luar negeri merupakan tugas yang tidak diserahkan urusannya kepada Pemerintah Daerah. Segala hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

2. Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri

Dalam Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri disebutkan bahwa tugas Kementerian Luar Negeri adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
b. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pengoordinasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
f. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

DRAFT

3. Struktur organisasi Kementerian Luar Negeri

a. Kementerian Luar Negeri (Pusat)

Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Menteri Luar Negeri dibantu oleh Wakil Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian, dengan ruang lingkup yang meliputi membantu perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian serta membantu mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi.

Menteri Luar Negeri juga dibantu oleh 11 (sebelas) unit organisasi eselon I sebagai berikut:

1) Sekretariat Jenderal;
2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
3) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
4) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
5) Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;
6) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
7) Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan;
8) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
9) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
10) Inspektorat Jenderal;
11) Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri;

Di lingkungan Kementerian Luar Negeri juga terdapat Staf Ahli yang bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu kepada Menteri Luar Negeri terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan; diplomasi ekonomi; sosial, budaya, dan pembangunan manusia; hubungan antarlembaga; serta manajemen dan transformasi digital. Terdapat 5 (lima) Staf Ahli, yaitu:

1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2) Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi;
3) Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia;
4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
5) Staf Ahli Bidang Manajemen.

Selain itu, terdapat 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Luar Negeri, yaitu:

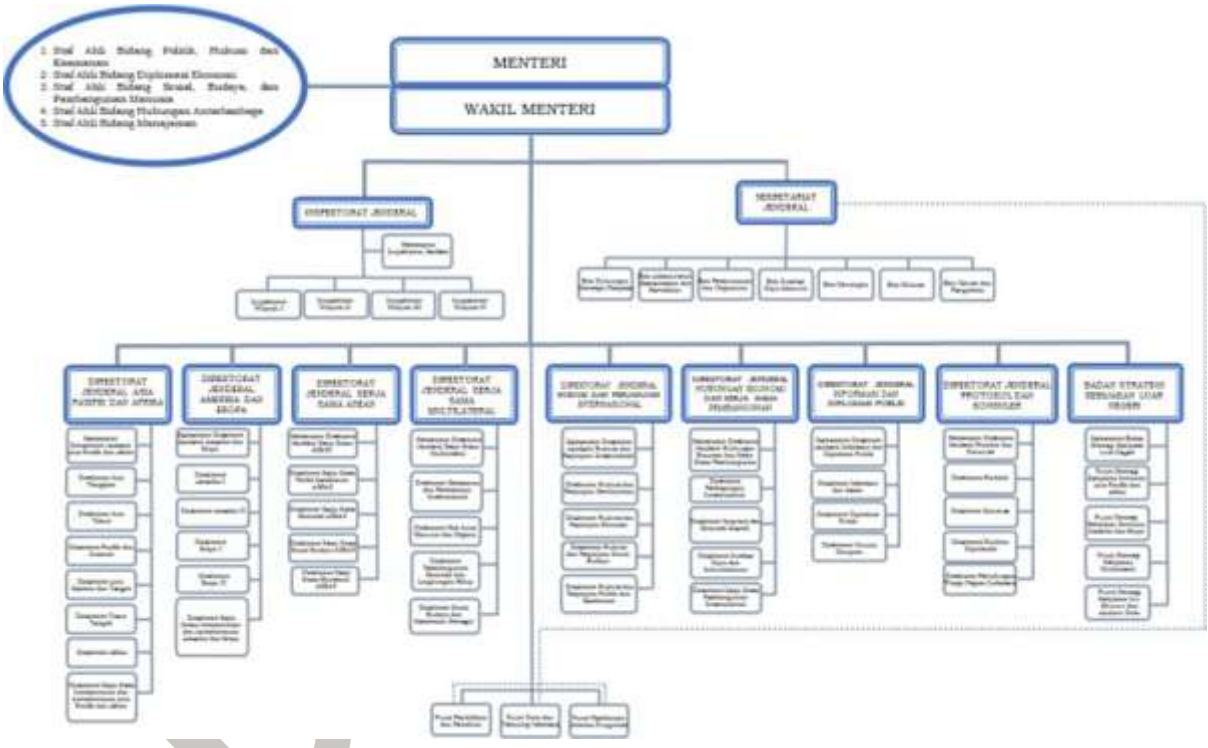
1) UPT Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu)
2) UPT Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu)
3) UPT Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu)
4) UPT Museum Konferensi Asia Afrika

DRAFT

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN karena tugas dan fungsinya menjadi Pelaksana Harian Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler karena tugas dan fungsinya menjadi Kepala Protokol Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar xx. Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri



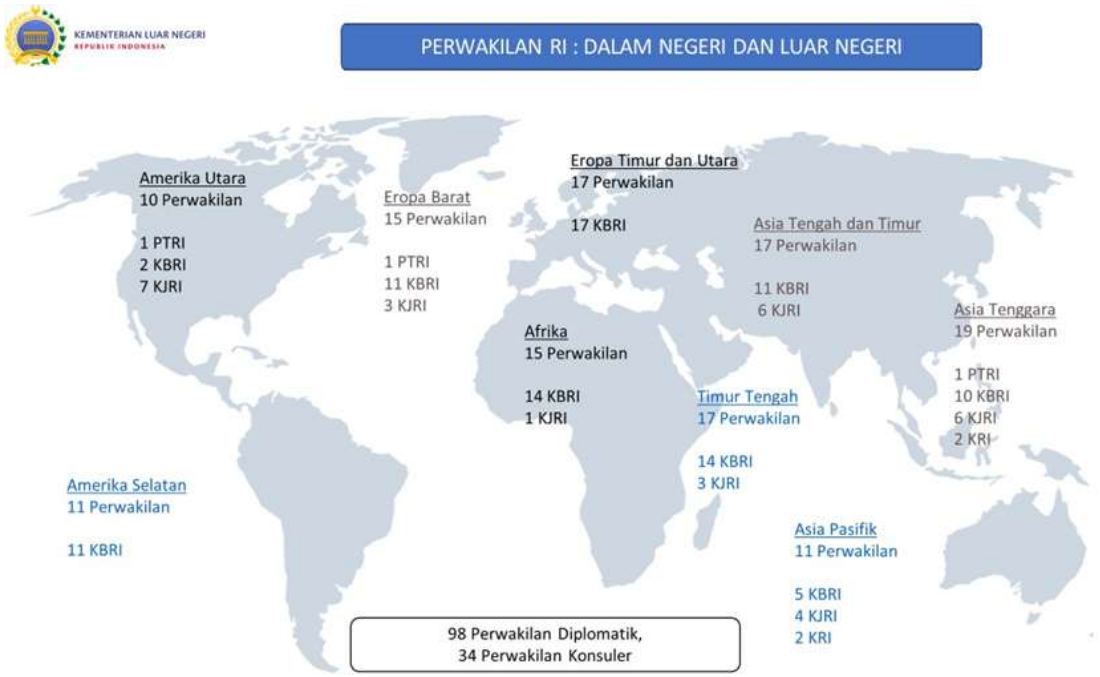
Catatan:
Presiden RI pada tanggal 21 Oktober 2024 telah melantik tiga Wakil Menteri Luar Negeri.

b. **Kementerian Luar Negeri (Perwakilan Republik Indonesia)**

Kementerian Luar Negeri juga membawahi Perwakilan Republik Indonesia yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Perwakilan Republik Indonesia merupakan Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

Perwakilan Republik Indonesia merupakan ujung tombak pelaksanaan diplomasi Indonesia serta dalam memberikan pelayanan dan pelindungan bagi kepentingan dan warga negara Indonesia di luar negeri. Sampai dengan semester pertama tahun 2025, terdapat 132 Perwakilan Republik Indonesia yang terdiri atas 98 Perwakilan Diplomatik dan 34 Perwakilan Konsuler.

Gambar xx. Perwakilan Republik Indonesia



Diantara Perwakilan-Perwakilan tersebut terdapat sejumlah Perwakilan dengan status Perwakilan Rawan atau Perwakilan Berbahaya yang merupakan Perwakilan yang berkedudukan di wilayah dan membawahi negara akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan memiliki potensi ancaman dan memberikan gangguan nyata terhadap personel dan aset fisik Perwakilan. Tata cara penetapan status, tingkatan dan pemberian fasilitas keamanan pada Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya diatur oleh Menteri Luar Negeri.

Selain itu, Menteri Luar Negeri juga dapat menetapkan status Perwakilan Pelindungan Terpadu bagi perwakilan Republik Indonesia dengan kriteria tertentu, antara lain jumlah WNI, total kasus yang melibatkan WNI, profil WNI, peraturan hukum negara setempat, jumlah WNI yang menghadapi ancaman hukuman berat, jumlah WNI yang menghadapi masalah keimigrasian, serta luas cakupan wilayah akreditasi atau wilayah kerja.

Perwakilan Pelindungan Terpadu pada prinsipnya merupakan pengembangan dari konsep Citizen Service yang memberikan penekanan pada aspek koordinasi lintas fungsi dalam Perwakilan RI sekaligus partisipasi aktif

masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas perlindungan WNI di luar negeri.

Penetapan status tersebut tidak diarahkan untuk pembentukan kelembagaan baru, namun ditujukan untuk mengoptimalkan peran, fokus, kolaborasi, kecepatan dan *agility* dalam pelaksanaan tugas dan kinerja diplomasi serta pelayanan dan pelindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

4. Arah kebijakan kelembagaan

a. Penataan organisasi

Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri

Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri yang diintegrasikan dengan manajemen risiko dan pengendalian intern yang efektif, diarahkan untuk menciptakan struktur organisasi dan tata kerja, serta rumusan tugas dan fungsi yang mampu mencerminkan peran strategis Kementerian Luar Negeri dalam pemerintahan, menjalankan mandat koordinator serta pelaksanaan sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri secara efektif, dan menopang pelaksanaan prioritas nasional yang diamanatkan pada Kementerian Luar Negeri.

-> Kementerian Luar Negeri berfungsi sebagai koordinator utama dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dijalankan sesuai dengan kepentingan nasional dan mengoodinasikan pendekatan terpadu dalam penanganan hubungan luar negeri yang lintas sektoral.
-> Sinkronisasi kebijakan luar negeri dengan kebijakan domestik sangat penting untuk menjaga keselarasan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.
-> Sebagai pengendali, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan luar negeri tetap berada di jalur yang telah disepakati, serta memastikan adanya monitoring dan evaluasi yang efektif.

Dengan demikian, Kementerian Luar Negeri memainkan peran penting dalam memastikan seluruh proses kebijakan luar negeri terintegrasi dan selaras dengan kepentingan nasional melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif.

Struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri periode 2025-2029 diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri dan disesuaikan dengan prioritas nasional dalam RPJPN dan RPJMN, serta prioritas politik luar negeri (structure follows strategy) yang meliputi: (i) diplomasi ketahanan nasional; (ii) diplomasi ekonomi Pancasila; (iii) peningkatan

DRAFT

pengaruh di kawasan dan global; (iv) peningkatan pelindungan WNI dan peran diaspora; dan (v) optimalisasi diplomatic tools.

Penataan organisasi Kementerian Luar Negeri juga menjalankan Arah Kebijakan nasional: (i) penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai agenda setter di tingkat regional, utamanya dalam menjadi effective leader di ASEAN, dan global; (ii) pemantapan tata kelola kebijakan luar negeri guna merespon dinamika geopolitik dan geoekonomi, serta disrupsi teknologi digital dan perubahan iklim; (iii) penguatan kedaulatan, hak berdaulat, kerja sama pertahanan dan keamanan guna penguatan kapabilitas pertahanan negara, serta menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia; (iv) pemajuan nilai, budaya, dan ideologi guna peningkatan citra Indonesia di dunia internasional; serta (v) penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional untuk memperteguh diplomasi dan posisi.
Prioritas tersebut diterjemahkan dalam tugas dan fungsi utama unit organisasi unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Luar Negeri, yang antara lain mencakup:

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
2) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
3) pelaksanaan perundingan dan tindak lanjut hasil perundingan;
4) pemberian panduan substantif dan fasilitasi kebijakan; dan
5) pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup:
   - kepentingan bilateral, regional, multilateral;
   - penguatan hukum dan perjanjian internasional;
   - pengembangan kerja sama ekonomi dan kerja sama pembangunan;
   - pengelolaan informasi, diplomasi publik, dan diaspora Indonesia; dan
   - keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik, dan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

<u>Penataan organisasi dan tata kerja Perwakilan RI</u>
Penataan organisasi dan tata kerja Perwakilan RI diarahkan untuk menciptakan organisasi yang mampu bersifat responsif dan adaptif terhadap tantangan realitas arsitektur global yang terus mengalami perubahan.

Dinamika pada tataran internasional antara lain merefleksikan realitas sebagai berikut:

1) dinamika global yang membawa pergeseran dan konsekuensi hubungan internasional tersendiri sehingga mendorong munculnya penyesuaian bobot misi kepentingan hubungan luar negeri;

DRAFT

2) berkembangnya ekosistem teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, massive dan sophisticated yang membuat batas-batas geografis antar-negara dalam pergaulan internasional menjadi sangat terbuka;
3) efek isu-isu stragegis global seperti pandemic, perubahan iklim, konflik bersenjata dan kemanusian, pengungsi dan internally displaced persons (IDPs), revolusi digital pada seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa- bangsa menuntut respons dan adaptasi yang konsisten segenap instrumen diplomasi; dan
4) hubungan diplomatik bilateral dan internasional yang secara perlahan telah memunculkan pelaku para-diplomasi di luar aktor tradisional kementerian luar negeri, membuat peran Perwakilan RI harus mampu menjamin berjalannya first-track dan second track diplomasi di garda terdepan.

Dinamika pada tataran domestik juga mendorong langkah-langkah penyesuaian baru pada kelembagaan Perwakilan RI, antara lain:

1) penataan organisasi dan penyederhanaan birokrasi;
2) kebutuhan penetapan legal standing Perwakilan RI yang berkedudukan di dalam negeri dengan akreditasi pada organisasi internasional yang akan mengubah persepsi bahwa Perwakilan RI tidak semata berada di luar negeri;
3) proses reformasi birokrasi yang terus mendorong terbentuknya pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam konteks clean and dynamic governance;
4) pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Perwakilan RI baik dari aspek substantif maupun administratif;
5) meningkatnya tuntutan publik domestik terhadap kinerja diplomasi yang ingin melihat dampak dan kontribusi konkrit instrumen diplomasi, termasuk Perwakilan RI;
6) meningkatnya peran kementerian/lembaga dalam turut membantu pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat teknis untuk mendukung kinerja peningkatan hubungan dan kerja sama luar negeri di Perwakilan RI; dan
7) kepentingan kolektif untuk menciptakan sinergi dan koordinasi lebih baik antara kementerian luar negeri dan kementerian/lembaga dalam hubungan dan kebijakan luar negeri melalui penguatan susunan organisasi Perwakilan RI.

Di samping mengacu pada peraturan perundang-undangan dan respon terhadap dinamika internal dan eksternal/global, penataan organisasi Perwakilan juga merujuk pada Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta hukum dan kebiasaan internasional. Penerjemahan sejumlah ketentuan dalam Konvensi Wina dalam penguatan kelembagaan

DRAFT

Perwakilan, antara lain: (i) penekanan peran penting diplomatic agent dalam menjalankan fungsi diplomasi di Perwakilan RI; (ii) penekanan fungsi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler; dan (iii) peranan unsur pimpinan (head of the mission) serta unsur di bawah pimpinan (members of the staff of the mission).

Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri diharapkan akan menghasilkan dampak positif bagi peningkatan efektivitas diplomasi Indonesia di kancah internasional dengan birokrasi yang lebih adaptif dan efisien serta sinergi yang lebih baik antara arah kebijakan luar negeri dengan pelaksanaan hubungan luar negeri yang lintas sektoral dan multidimensional.

Dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor, Kementerian Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 sebagai landasan normatif dan operasional. Implementasi manajemen risiko dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui integrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran diplomasi dan prioritas Kementerian Luar Negeri secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui identifikasi dan mitigasi risiko strategis maupun operasional, Kementerian Luar Negeri dapat meningkatkan ketangguhan kelembagaan dalam menghadapi dinamika global, krisis geopolitik, serta tantangan pelindungan WNI di luar negeri. Selain itu, MRPN mendorong pengambilan keputusan berbasis risiko yang memperkuat akuntabilitas, koordinasi lintas unit, serta responsivitas terhadap isu-isu internasional yang berkembang.

b. Evaluasi Kelembagaan dan Penyederhanaan birokrasi

Evaluasi Kelembagaan

Kementerian Luar Negeri telah melakukan evaluasi kelembagaan pada tahun 2022, serta evaluasi penyederhanaan struktur organisasi yang dilaksanakan setiap tahun. Sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan, Kementerian Luar Negeri mendapatkan peringkat P5 yang mencerminkan bahwa dari segi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan organisasi yang ada dinilai memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Kementerian Luar Negeri telah menyederhanakan 697 struktur organisasi dalam Permenlu 2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri menjadi 493 struktur organisasi melalui Permenlu 6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

DRAFT

Penyederhanaan birokrasi sebagian besar dilakukan pada unit teknis yakni dengan menghapus struktur jabatan administrator dan pengawas (eselon III dan IV) pada Direktorat dan Pusat.

Meskipun dilakukan penambahan 1 (satu) unit organisasi eselon I, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri, Kemlu berkomitmen melanjutkan penyederhanaan birokrasi dengan mengurangi 69 struktur organisasi pada Permenlu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemlu.

Pada Perwakilan Republik Indonesia, penyederhanaan birokrasi sudah dilakukan sejak ditetapkannya Kepmenlu 06/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri yang ditujukan sebagai bentuk benah diri untuk meningkatkan agility, efisiensi, dan pelayanan sehingga diharapkan Perwakilan RI dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dinamis dalam diplomasi. Meskipun sistem kerja dalam Perwakilan RI bersifat fungsional, namun pejabat di Perwakilan RI dilengkapi dengan gelar jabatan dan gelar diplomatik untuk menunjang pelaksanaan tugasnya dalam interaksi formal dengan negara mitra dan organisasi internasional.

Penyederhanaan Birokrasi

Sejalan dengan implementasi reformasi birokrasi, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Kementerian Luar Negeri melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

Jabatan fungsional memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan organisasi sebagai ujung tombak dari implementasi tugas organisasi dalam mencapai target rencana strategis.

Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri khususnya penguatan jabatan fungsional diplomat, telah dilakukan sejak dini mulai tahun 2004 pada organisasi Perwakilan Republik Indonesia. Penyederhanaan ini terus diperkuat dan di ekstensifikasi pada level Pusat dengan berbagai jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional bertujuan untuk percepatan pelayanan kepada stakeholders, mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan agile, serta peningkatan profesionalisme ASN.

DRAFT

Guna memperkuat desain organisasi berbasis fungsional, dan sesuai arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi, Kementerian Luar Negeri melakukan pengalihan unit organisasi eselon III dan IV menjadi berbasis fungsional secara bertahap.

Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri khususnya di tingkat Pusat juga memperhatikan pertimbangan khusus, antara lain dengan pimpinan unit kerja dengan kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pejabat manajerial yang membawahi beberapa rumpun jabatan, memegang kerahasiaan data dan informasi untuk kepentingan khusus, ketatausahaan pimpinan, serta menyesuaikan dengan standar dan kebiasaan internasional.

Strategi dan langkah yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam menghadapi tantangan dalam penyederhanaan birokrasi antara lain:

l. Internalisasi dan Pemahaman, dengan memperkenalkan dan memastikan seluruh pegawai memahami tujuan dan manfaat penyederhanaan birokrasi.
m. Pemetaan Tugas dan Fungsi: Dilakukan pemetaan yang jelas agar tidak ada tumpang tindih dalam tugas dan fungsi masing-masing pegawai.
n. Koordinasi dan Sinergi Antar Unit: Penyusunan ulang struktur jabatan diikuti dengan peningkatan koordinasi lintas unit untuk memastikan kelancaran operasional.
o. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Menigkatkan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan khusus guna meningkatkan kapasitas mereka sesuai tuntutan tugas baru.
p. Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan Organisasi: Penyusunan sistem yang mendukung evaluasi dan pemetaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi pegawai.
q. Penerapan Teknologi dan Infrastruktur: Penyederhanaan birokrasi turut didukung dengan penggunaan teknologi yang mempermudah pekerjaan dan mempercepat komunikasi dan proses administrasi.
r. Perubahan Budaya Kerja: Mendorong pegawai untuk menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
s. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas: Penerapan sistem evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan bahwa efektivitas dan produktivitas tetap terjaga, meskipun dengan perubahan struktural.
t. Penyusunan SOP yang baru, serta pemetaan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemanfaatan *expertise* pegawai dan menjaga kinerja organisasi yang optimal.

c. Penguatan dan rasionalisasi struktur organisasi dalam proses transformasi organisasi

Kementerian Luar Negeri (Pusat)

DRAFT

1) Penambahan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada Kementerian Luar Negeri sampai dengan unit organisasi eselon I ke bawah
2) Penguatan kelembagaan unit yang menangani hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan
3) Penguatan kelembagaan unit yang menangani kerja sama antar kementerian dan lembaga serta parlemen, dan hukum
4) Penguatan kelembagaan forum koordinasi kebijakan luar negeri
5) Penguatan pengelolaan SDM berdasarkan merit pada unit kerja terkait
6) Penguatan penilaian kompetensi pegawai melalui pembentukan assessment center
7) Penguatan postur diplomasi tangguh
8) Penguatan pengelolaan SPBE melalui unit yang menangani data dan teknologi informasi
9) Penguatan pengelolaan data diplomasi dan transformasi digital
10) Penguatan tugas dan fungsi terkait implementasi reformasi birokrasi baik general maupun tematik
11) Penguatan lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif dan komunikatif, serta mendukung pertumbuhan inovasi dan kreatif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Kementerian.

Kementerian Luar Negeri (Perwakilan Republik Indonesia)

1) Penguatan Perwakilan RI sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia dan yang berwibawa sebagai wakil resmi Pemerintah Republik Indonesia.
2) Penguatan organisasi Perwakilan dengan kemampuan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang efektif dengan seluruh unsur di Perwakilan serta dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga yang terkait.
3) Penguatan tugas dan fungsi dalam menjalin dan mengembangkan kerja sama yang efektif dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional demi kepentingan rakyat Indonesia.
4) Restrukturisasi Perwakilan RI sesuai dengan kepentingan nasional
5) Penguatan tata kelola pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri
6) Penyesuaian postur/ukuran organisasi Perwakilan berdasarkan bobot misi, intensitas dan derajat hubungan, serta kerja sama Indonesia dengan negara mitra atau organisasi internasional.
7) Penguatan mekanisme kerja berbasis fungsional pada organisasi Perwakilan RI.
8) Kelembagaan Perwakilan RI diarahkan agar lebih terintegrasi dan mampu mensinergikan seluruh fungsi dan isu hubungan luar negeri pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya Atase Pertahanan/Atase Teknis/Staf Teknis dan pejabat penugasan lainnya, serta mengakomodasi entitas kelembagaan yang berdimensi luar negeri

DRAFT

seperti Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), Indonesia Investment Promotion Center (IIPC), dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Kementerian Luar Negeri pada tahun 2025 ditetapkan sebagai instansi pemrakarsa perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia. Peraturan tersebut akan menggantikan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Perumusan dasar hukum yang baru terkait Perwakilan Republik Indonesia dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan penataan kelembagaan dan tata kerja sesuai dengan prioritas pemerintah, serta prioritas hubungan dan politik luar negeri. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis, diperlukan serangkaian kebijakan dan upaya integrasi proses bisnis, optimalisasi koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar pelaku diplomasi sebagai focus utama dalam penguatan kelembagaan dan infrastruktur diplomasi khususnya Perwakilan Republik Indonesia.

Perubahan juga diarahkan untuk melakukan penyesuaian susunan organisasi Perwakilan, penetapan status Perwakilan, acuan organisasi Perwakilan pada bobot misi, intensitas derajat hubungan, dan kerja sama, serta perbaikan tata kelola dan hubungan tata kerja intra maupun antar Perwakilan RI, dan dengan Kementerian/Lembaga.

d. Penguatan budaya organisasi Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri telah memiliki nilai-nilai dasar organisasi yang dilembagakan melalui Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 11 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri, yakni Profesionalisme, Integritas, Manfaat, Proaktif, Inovatif, dan Nilai kejuangan atau disingkat sebagai PIMPIN.

Nilai-nilai (values) yang disepakati dan dijalankan bersama oleh unsur-unsur organisasi menjadi budaya organisasi. Budaya organisasi ini berperan penting dalam penguatan ikatan antara pegawai dan organisasi dan menjadi salah satu alat dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan nilai- nilai organisasi yang sinambung dengan tujuan organisasi, maka dengan rumusan visi dan misi yang baru dalam Renstra 2025-2029, dapat juga ditinjau kembali apakah masih relevan atau memerlukan penyesuaian.

Setelah menentukan nilai-nilai organisasi, tahapan selanjutnya adalah internalisasi nilai-nilai diperlukan agar menjadi norma bersama dan pedoman perilaku bagi pegawai. Selain itu, perlu untuk mengevaluasi

DRAFT

upaya internalisasi tersebut secara berkala guna menentukan strategi lanjutan agar seluruh nilai-nilai tersebut terinternalisasi dengan baik.

B. Penguatan Ketatalaksanaan/ Proses Bisnis

Kementerian Luar Negeri telah menetapkan peta proses bisnis, serta standar operasional prosedur makro dan mikro melalui Keputusan Menteri Luar Negeri No.5 tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis dan Keputusan Menteri Luar Negeri No. 6 tahun 2022 tentang SOP Makro Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. Dengan penguatan mandat Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang lebih inklusif dan merupakan refleksi dari kepentingan nasional maka tetap perlu dilakukan penyempurnaan proses bisnis yang telah ada baik yang bersifat lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, maupun lintas Kementerian/Lembaga. Proses bisnis yang jelas diperlukan agar sistem kerja yang berlaku dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan Kementerian Luar Negeri serta tidak terjadi duplikasi ataupun kekosongan (vacuum).

Sejalan dengan arah penataan organisasi Perwakilan RI, akan dilakukan penguatan dan formalisasi peta proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi antara pejabat fungsional Diplomat dan Atase Pertahanan/ Atase Teknis/ Staf Teknis serta entitas lain yang terkait.

Selain itu, pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu fungsi manajerial strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berperan penting dalam mengawal kinerja organisasi, memastikan pencapaian tujuan, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Penguatan fungsi pengawasan intern merupakan bagian integral dari upaya memperkuat ketatalaksanaan dan penyempurnaan proses bisnis organisasi.

Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan intern berbasis risiko yang berkualitas untuk perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Penguatan pengendalian intern di setiap jenjang manajemen juga akan terus diupayakan sebagai bagian dari strategi membangun sistem pengawasan yang kokoh dan integratif. Upaya ini sekaligus mendukung penguatan integritas aparatur dan ketahanan organisasi terhadap risiko.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap reformasi birokrasi yang berkelanjutan, Kementerian Luar Negeri akan terus mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di berbagai unit kerja, baik di Pusat maupun di Perwakilan RI. Pembangunan ZI ini diposisikan sebagai instrumen utama dalam menciptakan budaya kerja yang transparan, berorientasi pada pelayanan, dan berkelanjutan,

DRAFT

selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2025 - 2029 dalam transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan.

C. Penguatan Sumber Daya Manusia Berbasis Merit

Pelaksanaan diplomasi yang tangguh dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Luar Negeri sangat bergantung pada SDM yang melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan hubungan luar negeri. Saat ini, Kemenlu memiliki pegawai sekitar 3.371 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.886 orang (55,9%), dan perempuan 1.485 orang (44,1%).

Dalam hal ini, ujung tombak upaya diplomasi dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Diplomat, yang didukung oleh Fungsional Penata Kanselerai dan Pranata Informasi Diplomatik serta fungsional dan staf lain di Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengembangan SDM perlu terus diperkuat dan adaptif sesuai dengan amanat undang-undang, prioritas nasional dan kondisi global.

Perencanaan kebutuhan SDM Kementerian Luar Negeri dilakukan berdasarkan kepentingan nasional, dinamika kondisi global, beban kerja unit, turnover, serta kekosongan jabatan dan formasi pegawai. Upaya pemenuhan SDM tersebut, terus dilakukan melalui mekanisme rekrutmen berdasarkan kerangka regulasi nasional memanfaatkan sistem teknologi informasi dan dilaksanakan secara transparan. Perencanaan dan pemenuhan SDM dimaksud dilakukan untuk memperoleh SDM yang tidak hanya kompeten, namun juga memiliki person-job fit dan person-organization fit, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok diplomasi dengan tangguh sesuai sasaran strategis dan budaya organisasi Kementerian Luar Negeri.

Sebagai aset dan investasi organisasi, pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri dilaksanakan menggunakan manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit, meliputi analisis kebutuhan talenta, identifikasi, pengembangan, retensi serta pemantauan dan evaluasi. Proses identifikasi dan pemetaan dilakukan berdasarkan kebutuhan talenta dan standar jabatan baik manajerial maupun fungsional yang telah dimiliki organisasi. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri akan mendirikan dan mengembangkan Assessment Center atau unit penilaian kompetensi mandiri terakreditasi nasional yang berkontribusi pada penerapan manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan sistem merit.

Pengembangan talenta SDM di bidang Hubungan Luar Negeri/Diplomasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, kinerja pegawai dan kebutuhan organisasi. Guna mendukung peningkatan pengembangan kompetensi SDM di bidang diplomasi, Kementerian Luar Negeri terus mengembangkan Pembangunan Sistem Pembelajaran Terintegrasi atau Corporate University (Corpu). Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri akan menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) 2025-2029, Individual

DRAFT

Development Plan (IDP) serta mengembangkan teknologi pembelajaran digital dalam bentuk Learning Management System (LMS) Kemlu dan Knowledge Management System (KMS) sesuai dengan sasaran strategis organisasi.

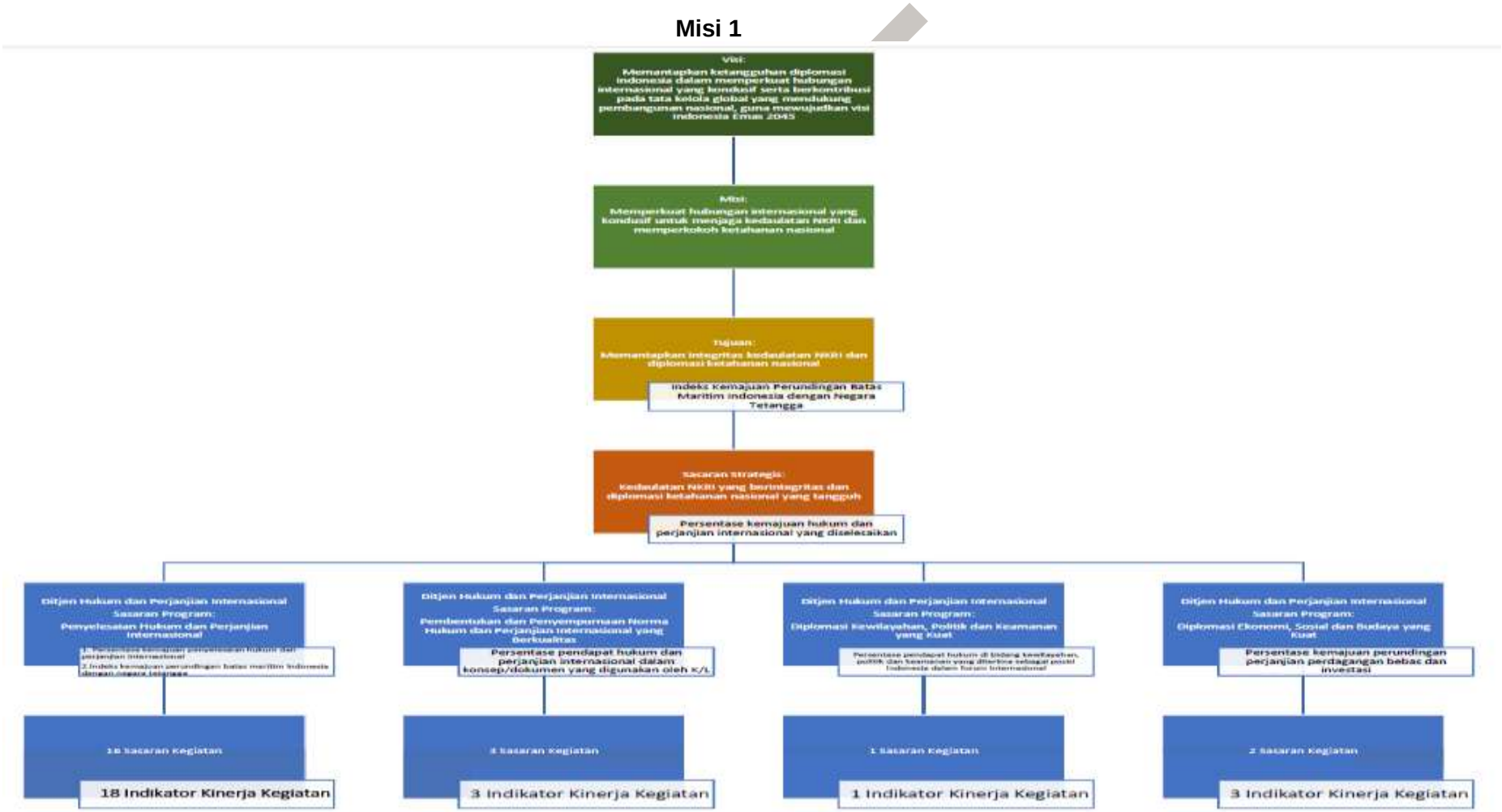
Selain melalui pengembangan, pengelolaan SDM juga dilakukan melalui mutasi dan promosi yang dilaksanakan sesuai pola karier Kementerian, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian karier SDM Kementerian Luar Negeri berdasarkan kualifikasi, kompetensi, hasil kerja, dan rekam jejak. Guna mendukung rangkaian pengelolaan dan pengembangan SDM, Kementerian Luar Negeri terus mengembangkan dan menyempurnakan manajemen talenta dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan pengembangan SIMTalenta, berdasarkan aspek kinerja dan potensi pegawai yang terukur. Ke depan, implementasi manajemen talenta melalui SIMTalenta dapat digunakan untuk mendukung kemudahan mobilitas talenta dan pengembangan karier dalam pemenuhan jabatan target dalam organisasi maupun secara nasional.

DRAFT

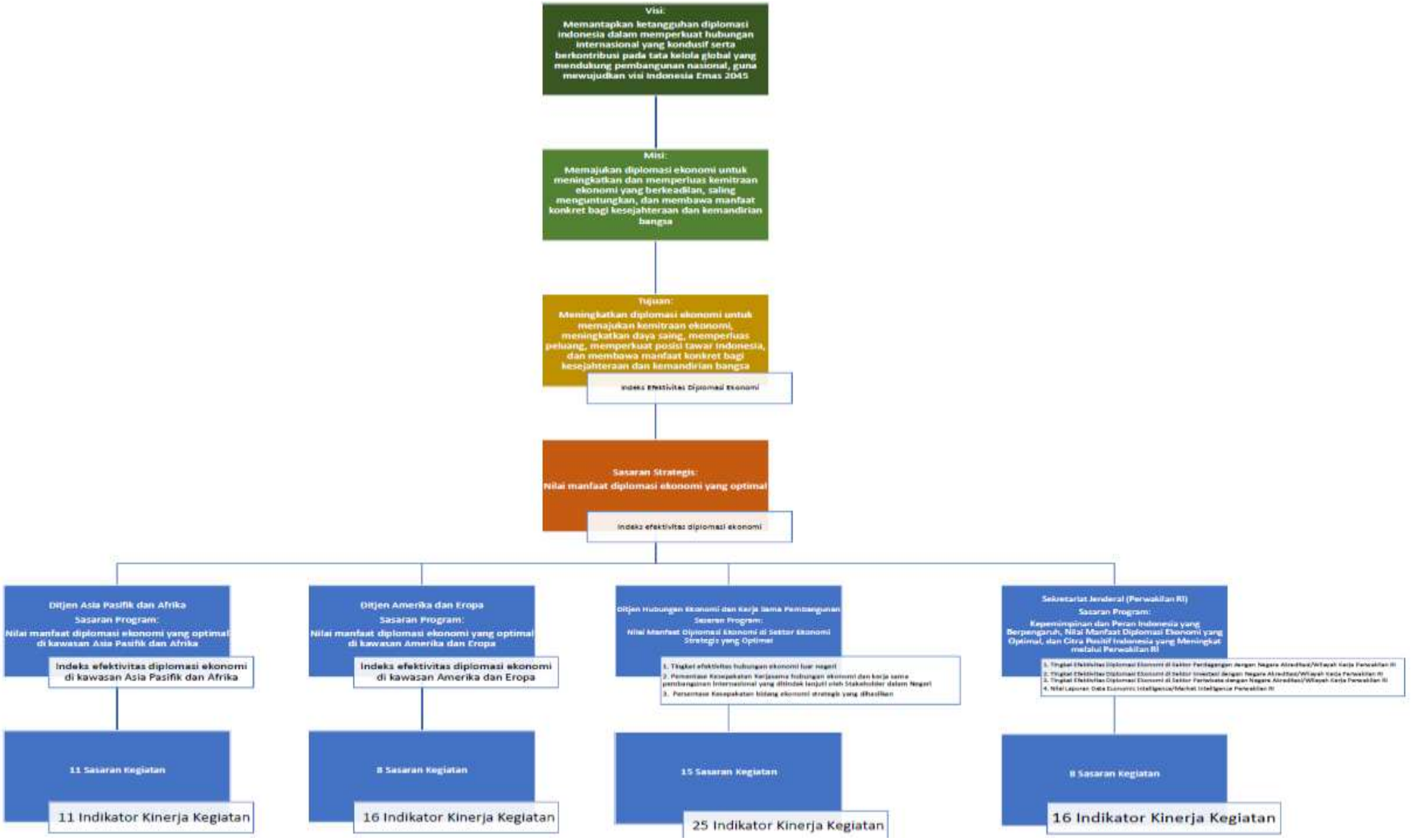
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Bagan Cascading Visi – Misi - Sasaran

Misi 1



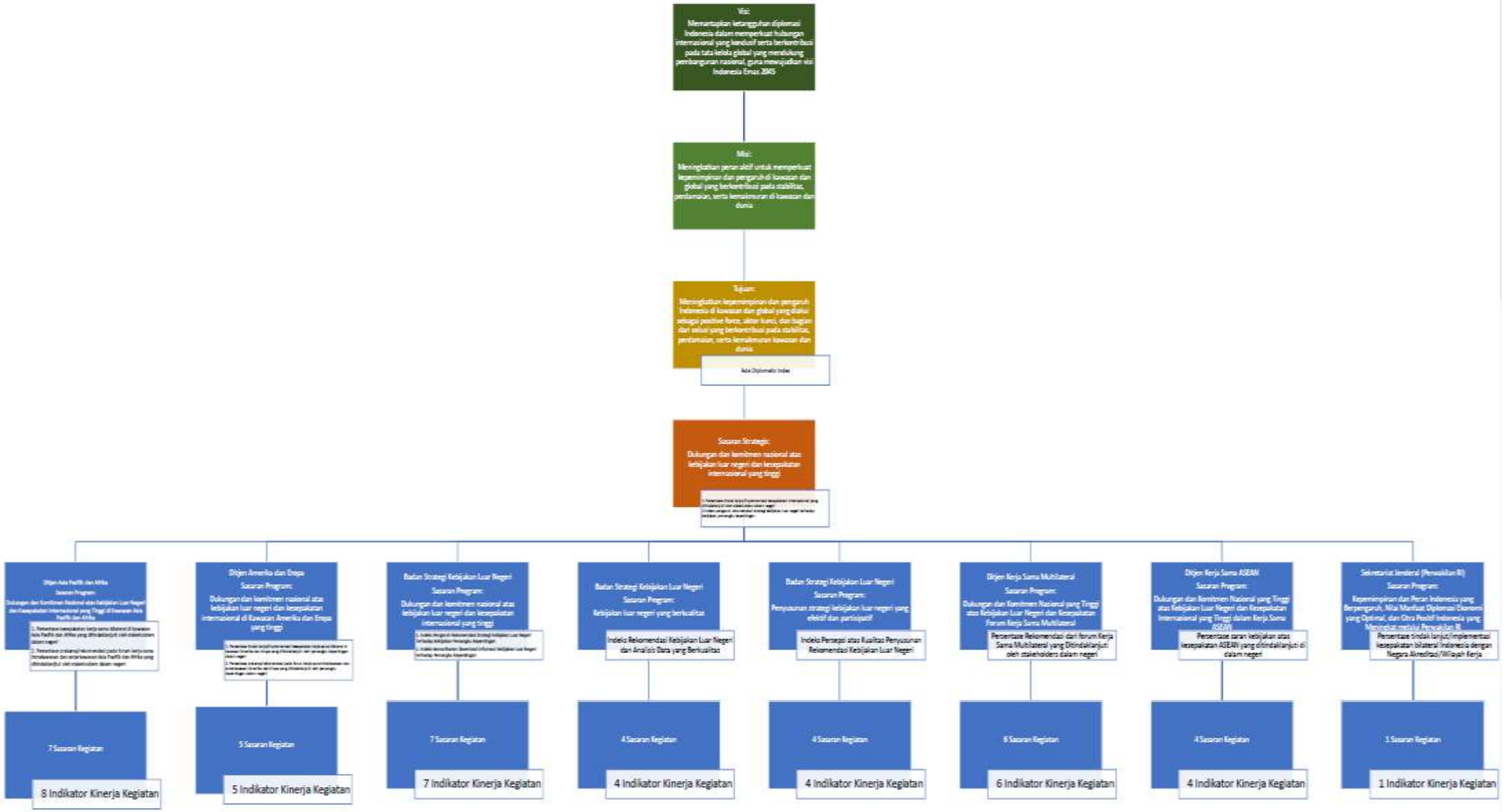
Misi 2


Visi:
Memantapkan ketangguhan diplomasi indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Memajukan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa
Tujuan:
Meningkatkan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, memperkuat posisi tawar indonesia, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa
Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi
Sasaran Strategis:
Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal
Indeks efektivitas diplomasi ekonomi
Ditjen Asia Pasifik dan Afrika
Sasaran Program:
Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika
11 Sasaran Kegiatan
11 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Amerika dan Eropa
Sasaran Program:
Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Amerika dan Eropa
Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di kawasan Amerika dan Eropa
8 Sasaran Kegiatan
16 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Sasaran Program:
Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi di Sektor Ekonomi Strategis yang Optimal
1. Tingkat efektivitas hubungan ekonomi luar negeri
2. Persentase Kesepakatan Kerjasama hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional yang ditindak lanjuti oleh Stakeholder dalam Negeri
3. Persentase Kesepakatan bidang ekonomi strategis yang dihasilkan
15 Sasaran Kegiatan
25 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal (Perwakilan RI)
Sasaran Program:
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkat melalui Perwakilan RI
1. Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI
2. Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI
3. Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI
4. Nilai Laporan Data Economic Intelligence/Market Intelligence Perwakilan RI
8 Sasaran Kegiatan
16 Indikator Kinerja Kegiatan

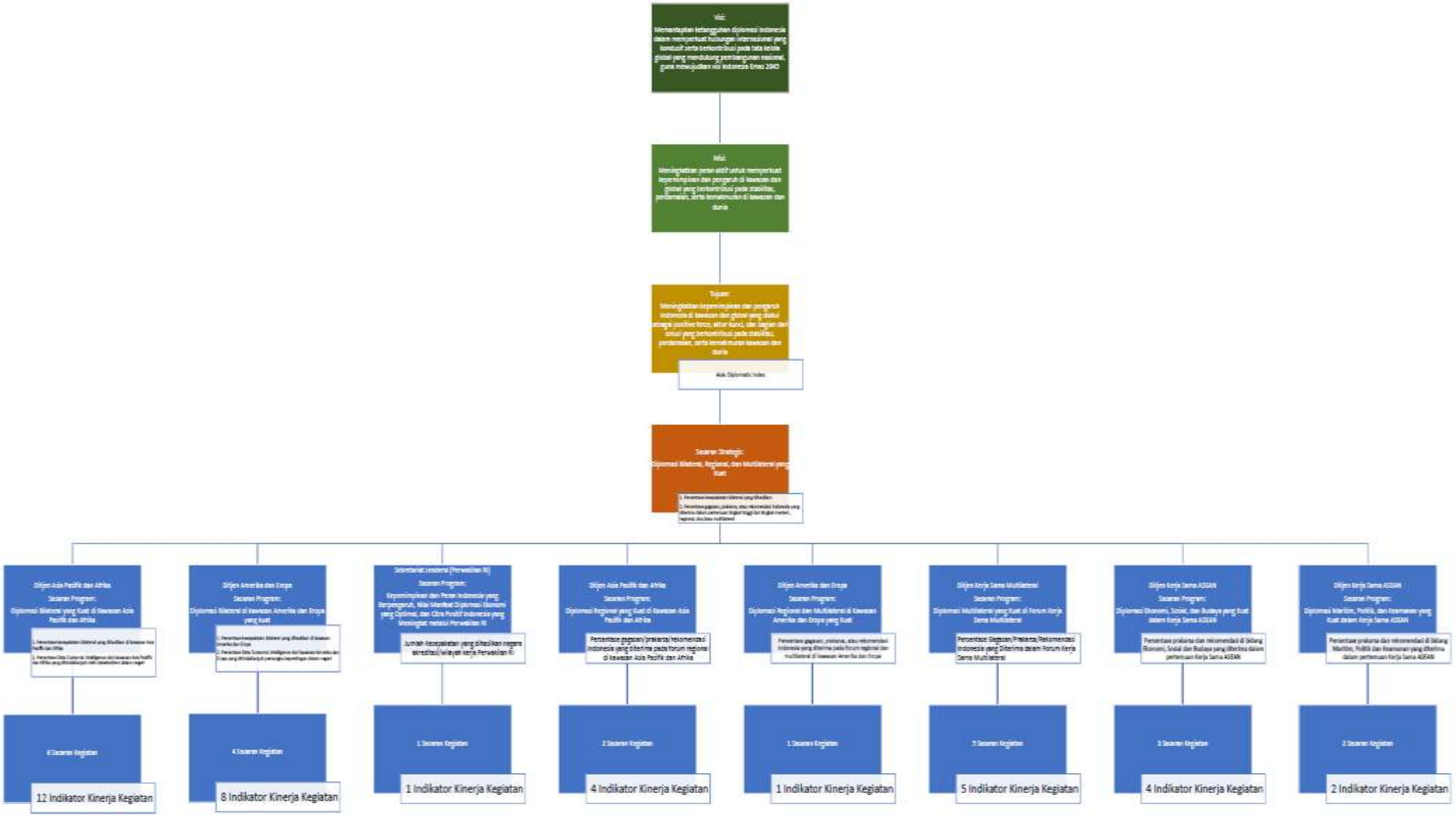
Misi 3.1.1


Visi:
Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan dan global yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan dan dunia
Tujuan:
Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global yang diakui sebagai positive force, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia
Asia Diplomatic Index
Sasaran Strategis:
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional
Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional
Ditjen Asia Pasifik dan Afrika
Sasaran Program:
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
3 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Amerika dan Eropa
Sasaran Program:
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Kawasan Amerika dan Eropa
Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional Kawasan Amerika dan Eropa
2 Sasaran Kegiatan
2 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Sasaran Program:
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Internasional di bidang Ekonomi
4 Sasaran Kegiatan
13 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Kerja Sama Multilateral
Sasaran Program:
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral
Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral
7 Sasaran Kegiatan
17 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Kerja Sama ASEAN
Sasaran Program:
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama ASEAN
Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN
4 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal (Perwakilan RI)
Sasaran Program:
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan

Misi 3.1.2


Visi:
Meneguhkan keterpercayaan diplomasi Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan dan global yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan dan dunia
Tujuan:
Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global yang dinilai sebagai positive force, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia
Asia Diplomatic Index
Sasaran Strategis:
Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi
Ditjen Asia Pacific dan Afrika
Sasaran Program:
Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan Luar Negeri dan kesepakatan internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
7 Sasaran Kegiatan
8 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Amerika dan Eropa
Sasaran Program:
Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di Kawasan Amerika dan Eropa yang tinggi
5 Sasaran Kegiatan
5 Indikator Kinerja Kegiatan
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Sasaran Program:
Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi
7 Sasaran Kegiatan
7 Indikator Kinerja Kegiatan
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Sasaran Program:
Kebijakan luar negeri yang berkualitas
Indeks Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri dan Analisis Data yang Berkualitas
4 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Sasaran Program:
Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif
Indeks Persepsi atas Kualitas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri
4 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Kerja Sama Multilateral
Sasaran Program:
Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Kerja Sama Multilateral
Persentase Rekomendasi dari forum Kerja Sama Multilateral yang Ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri
6 Sasaran Kegiatan
6 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Kerja Sama ASEAN
Sasaran Program:
Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama ASEAN
Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri
4 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal (Perwakilan RI)
Sasaran Program:
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkat melalui Perwakilan RI
Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan

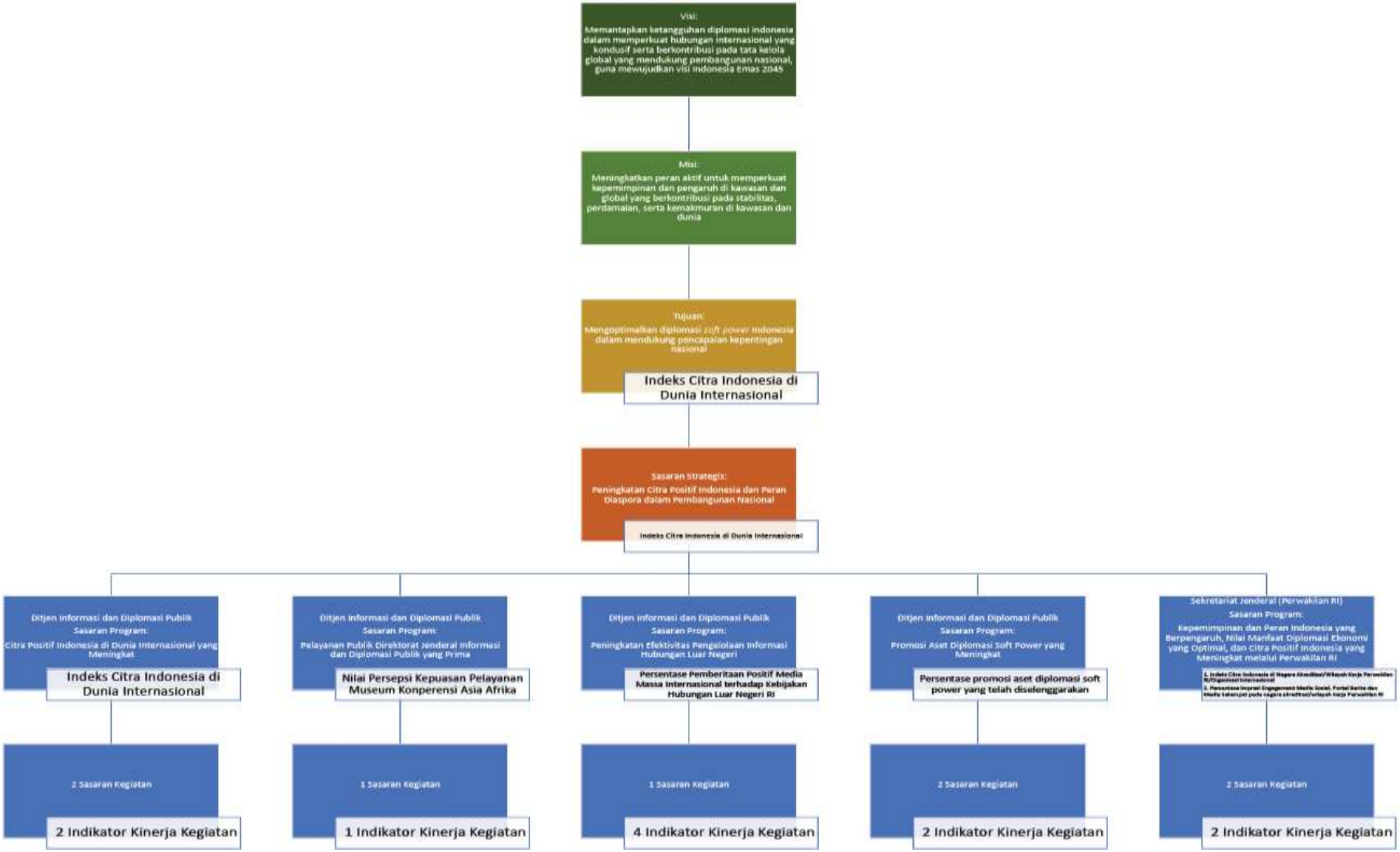
Misi 3.1.3


Visi:
Memantapkan ketanggunan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang konstruktif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan dan global yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan dan dunia
Tujuan:
Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global yang dalam rangka positive force, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia
Arah Diplomatik Indeks
Sasaran Strategis:
Diplomasi Bilateral, Regional, dan Multilateral yang Kuat
Ditjen Asia Pasifik dan Afrika
Sasaran Program:
Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
6 Sasaran Kegiatan
12 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Amerika dan Eropa
Sasaran Program:
Diplomasi Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang kuat
4 Sasaran Kegiatan
8 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal (Perwakilan RI)
Sasaran Program:
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkat melalui Perwakilan RI
Jumlah Kesepakatan yang ditindaklanjuti negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Asia Pasifik dan Afrika
Sasaran Program:
Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Persentase gagasan/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika
2 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Amerika dan Eropa
Sasaran Program:
Diplomasi Regional dan Multilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Kuat
Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum regional dan multilateral di kawasan Amerika dan Eropa
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Kerja Sama Multilateral
Sasaran Program:
Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral
Persentase Gagasan/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima dalam Forum Kerja Sama Multilateral
7 Sasaran Kegiatan
5 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Kerja Sama ASEAN
Sasaran Program:
Diplomasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Kuat dalam Kerja Sama ASEAN
Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama ASEAN
3 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Kerja Sama ASEAN
Sasaran Program:
Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan yang Kuat dalam Kerja Sama ASEAN
Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Maritim, Politik dan Keamanan yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama ASEAN
2 Sasaran Kegiatan
2 Indikator Kinerja Kegiatan

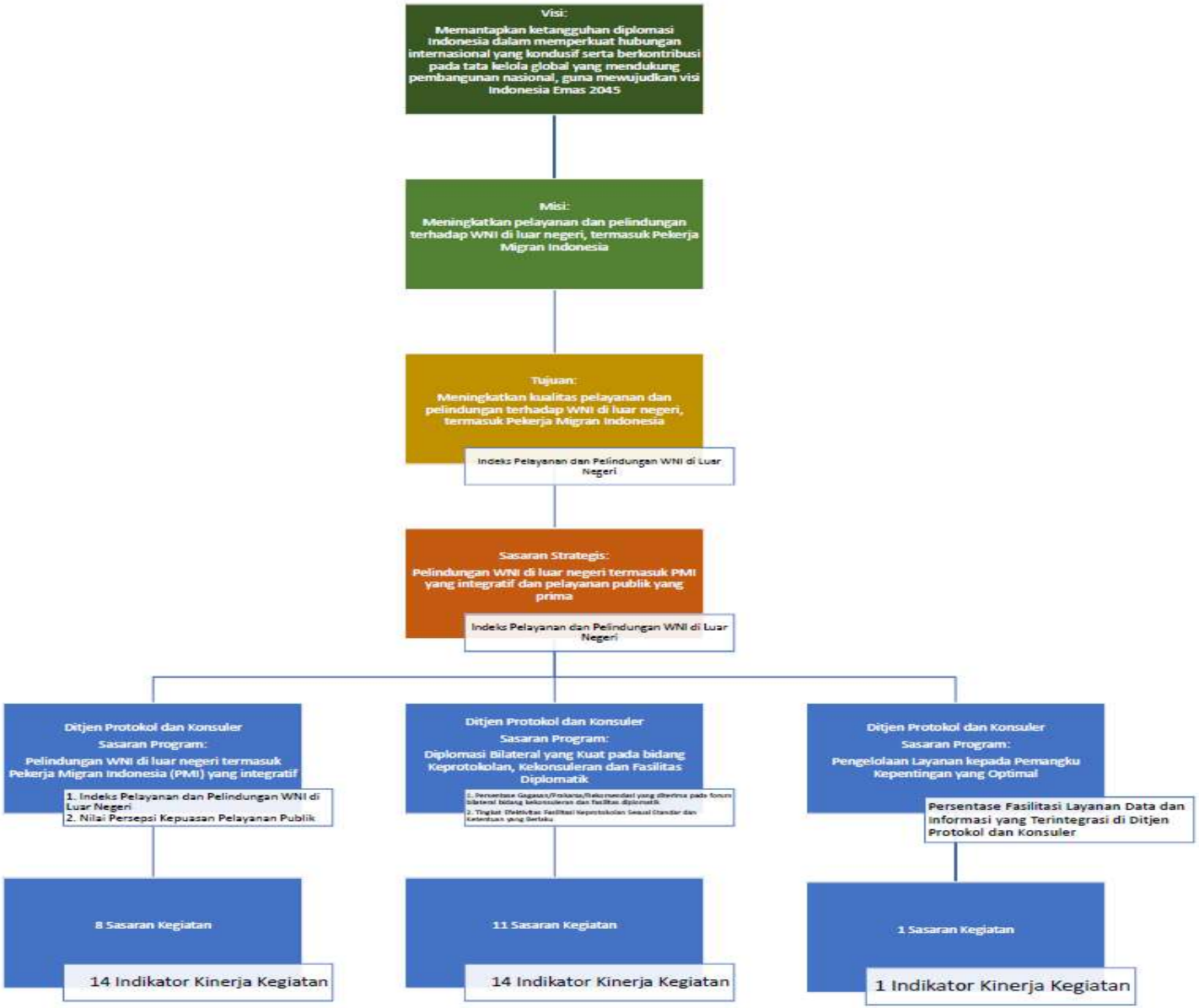
Misi 3.2


Visi:
Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan dan global yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan dan dunia
Tujuan:
Meningkatkan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai alat strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia
Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang Telah Sesuai dengan Prioritas Nasional
Sasaran Strategis:
Menguatnya kerja sama pembangunan internasional
Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional
Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Sasaran Program:
Menguatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional sesuai prioritas nasional
Persentase Kerja Sama Pembangunan Internasional yang disepakati dan sesuai dengan prioritas nasional
1 Sasaran Kegiatan
2 Indikator Kinerja Kegiatan

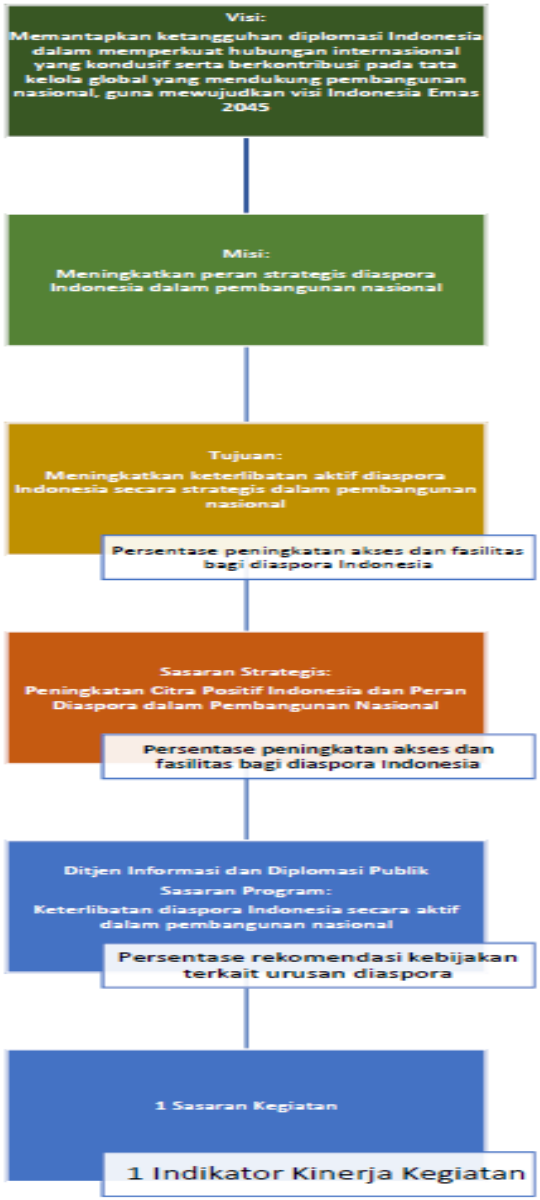
Misi 3.3


Visi:
Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan dan global yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan dan dunia
Tujuan:
Mengoptimalkan diplomasi soft power Indonesia dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional
Sasaran Strategis:
Peningkatan Citra Positif Indonesia dan Peran Diaspora dalam Pembangunan Nasional
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional
Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik
Sasaran Program:
Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional
2 Sasaran Kegiatan
2 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik
Sasaran Program:
Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang Prima
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Museum Konperensi Asia Afrika
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik
Sasaran Program:
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri
Persentase Pemberitaan Positif Media Massa Internasional terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI
1 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik
Sasaran Program:
Promosi Aset Diplomasi Soft Power yang Meningkat
Persentase promosi aset diplomasi soft power yang telah diselenggarakan
2 Sasaran Kegiatan
2 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal (Perwakilan RI)
Sasaran Program:
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkat melalui Perwakilan RI
2 Sasaran Kegiatan
2 Indikator Kinerja Kegiatan

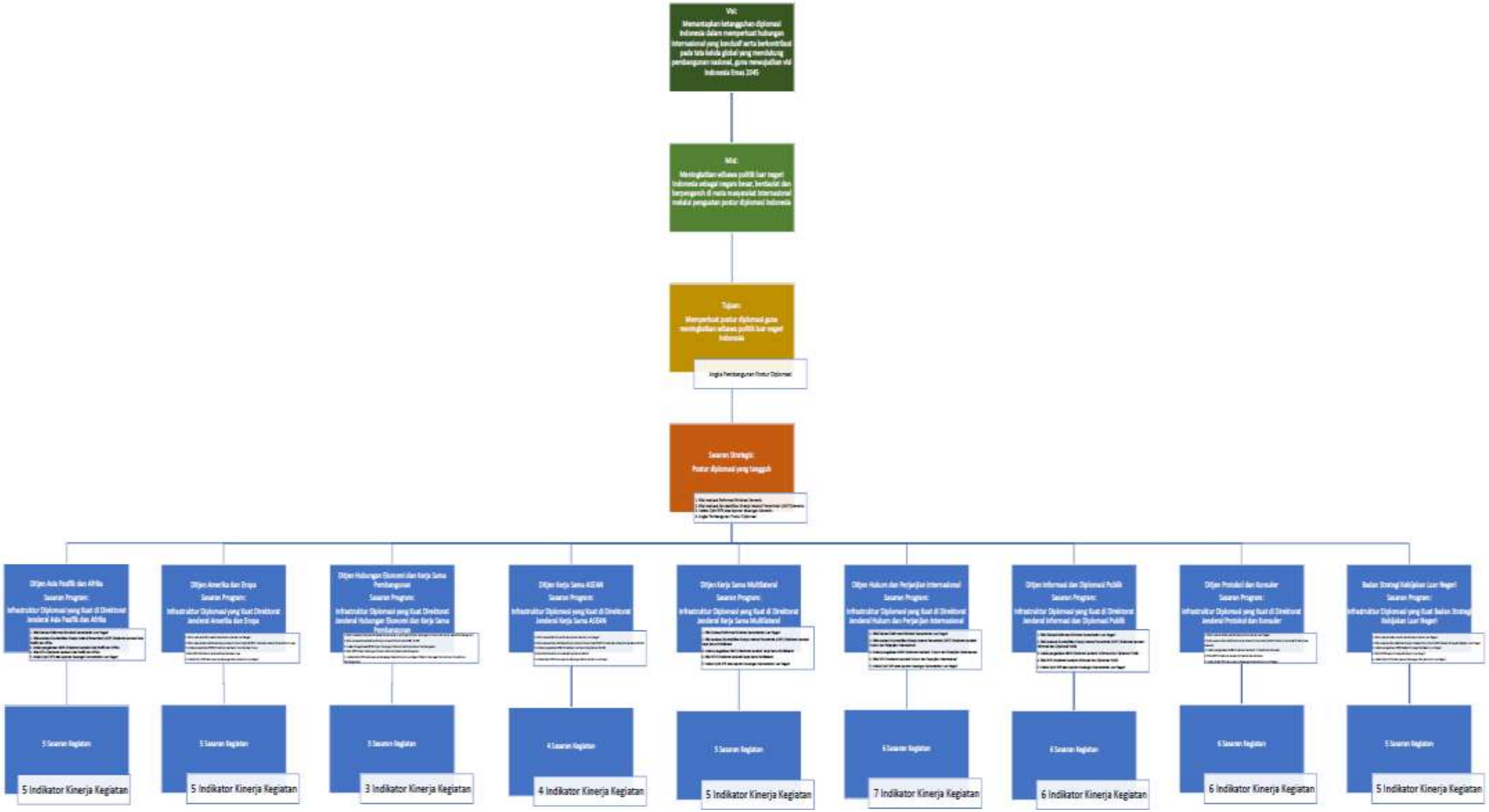
Misi 4


Visi:
Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia
Tujuan:
Meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Sasaran Strategis:
Pelindungan WNI di luar negeri termasuk PMI yang integratif dan pelayanan publik yang prima
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Ditjen Protokol dan Konsuler
Sasaran Program:
Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif
1. Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
2. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik
8 Sasaran Kegiatan
14 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Protokol dan Konsuler
Sasaran Program:
Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik
11 Sasaran Kegiatan
14 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Protokol dan Konsuler
Sasaran Program:
Pengelolaan Layanan kepada Pemangku Kepentingan yang Optimal
Persentase Fasilitasi Layanan Data dan Informasi yang Terintegrasi di Ditjen Protokol dan Konsuler
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan

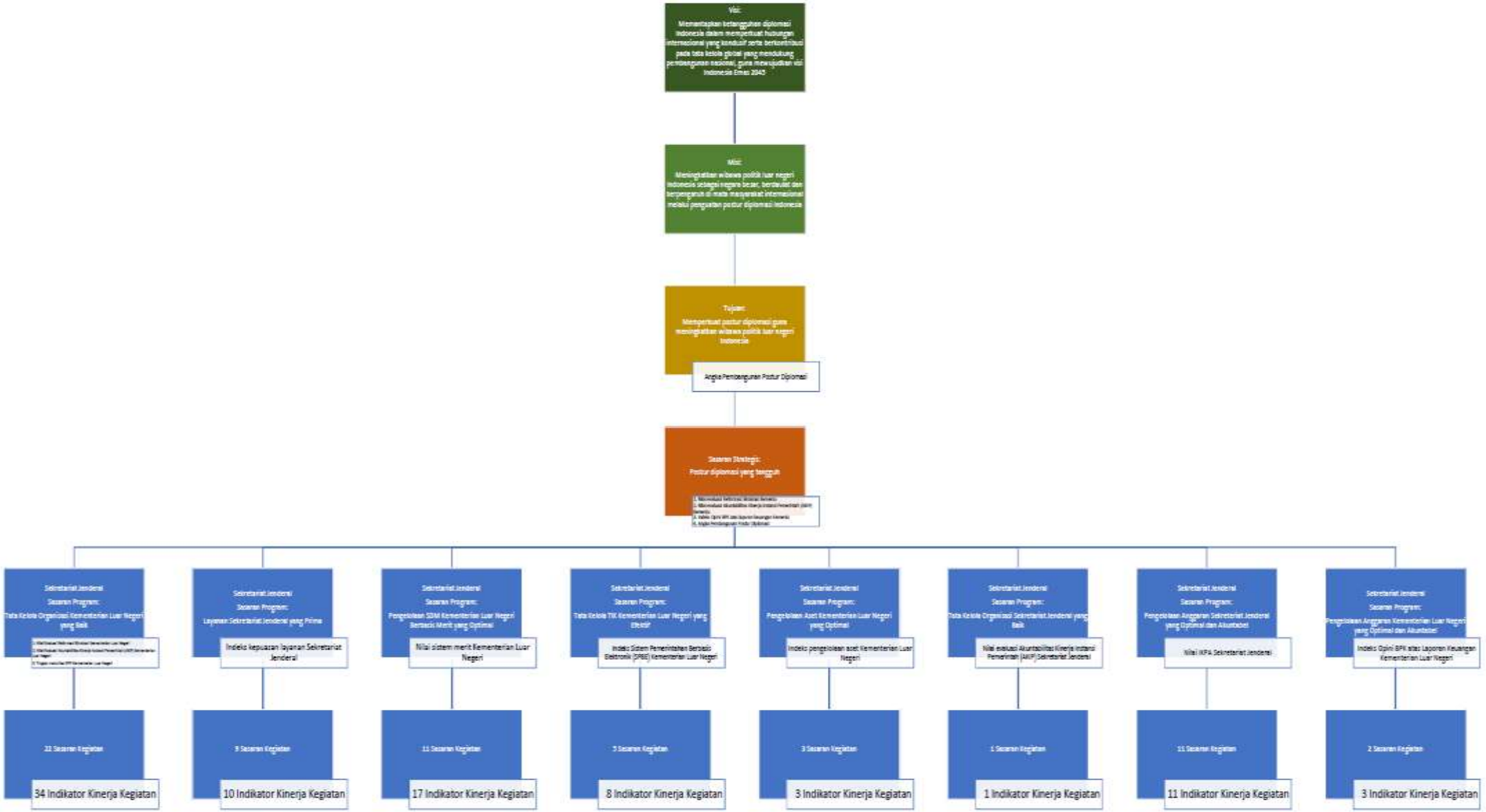
Misi 5


Visi:
Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan peran strategis diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional
Tujuan:
Meningkatkan keterlibatan aktif diaspora Indonesia secara strategis dalam pembangunan nasional
Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia
Sasaran Strategis:
Peningkatan Citra Positif Indonesia dan Peran Diaspora dalam Pembangunan Nasional
Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia
Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik
Sasaran Program:
Keterlibatan diaspora Indonesia secara aktif dalam pembangunan nasional
Persentase rekomendasi kebijakan terkait urusan diaspora
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan

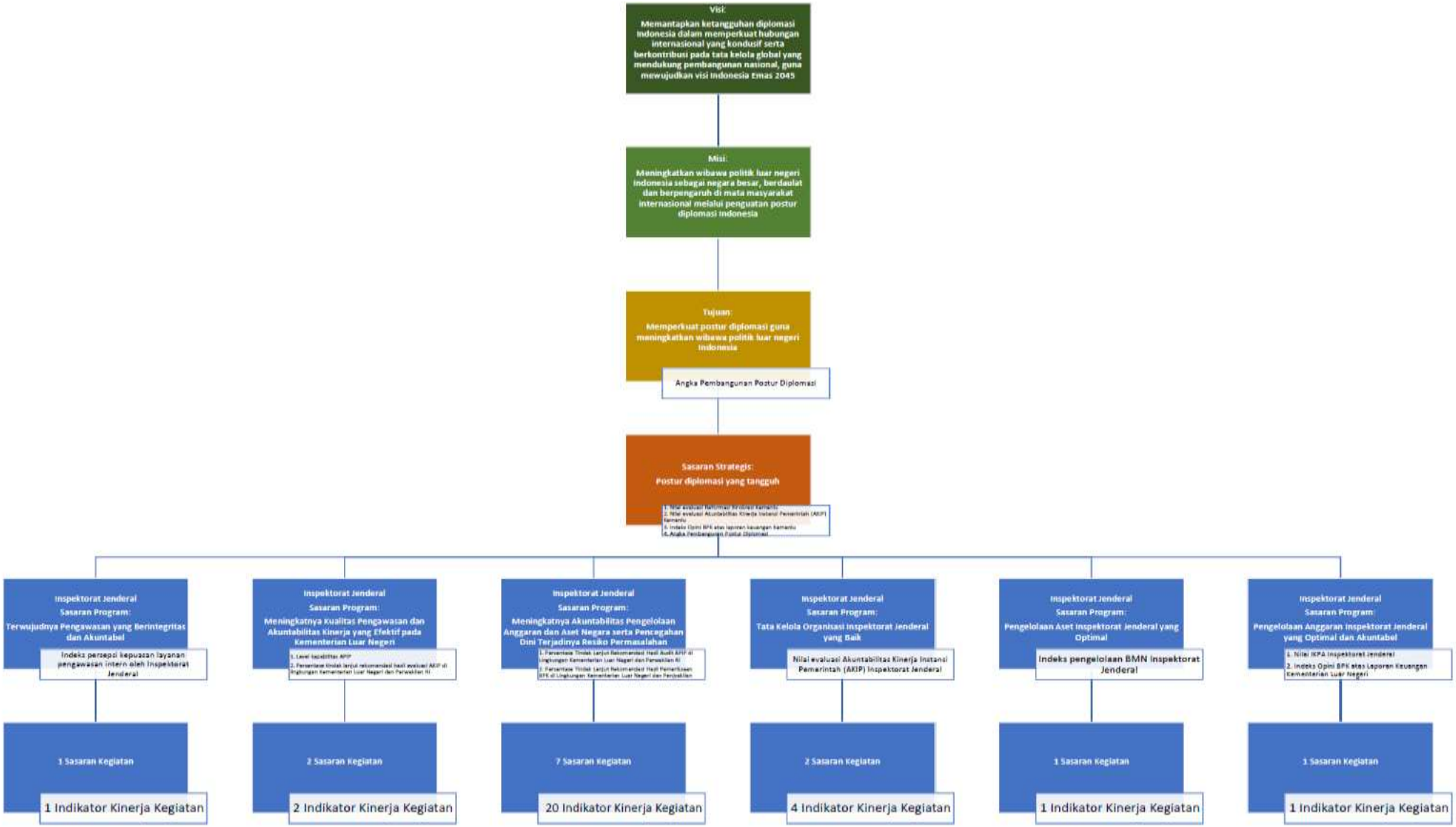
Misi 6.1


Visi:
Menantarkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, bertaubat dan berpengaruh di mata masyarakat internasional melalui penguatan posture diplomasi Indonesia
Tujuan:
Memperkuat posture diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia
Angka Pembangunan Postur Diplomasi
Sasaran Strategis:
Postur diplomasi yang tangguh
Ditjen Asia Pasifik dan Afrika
Sasaran Program:
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
5 Sasaran Kegiatan
5 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Amerika dan Eropa
Sasaran Program:
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
5 Sasaran Kegiatan
5 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Sasaran Program:
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
3 Sasaran Kegiatan
3 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Kerja Sama ASEAN
Sasaran Program:
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
4 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Kerja Sama Multilateral
Sasaran Program:
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
5 Sasaran Kegiatan
5 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional
Sasaran Program:
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
6 Sasaran Kegiatan
7 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik
Sasaran Program:
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
6 Sasaran Kegiatan
6 Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen Protokol dan Konsuler
Sasaran Program:
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
6 Sasaran Kegiatan
6 Indikator Kinerja Kegiatan
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Sasaran Program:
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
5 Sasaran Kegiatan
5 Indikator Kinerja Kegiatan

Misi 6.2


Visi:
Meneguhkan keterampilan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kepentingan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, berdaulat dan berpengaruh di mata masyarakat internasional melalui penguatan postur diplomasi Indonesia
Tujuan:
Memperkuat postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia
Angka Pembangunan Postur Diplomasi
Sasaran Strategis:
Postur diplomasi yang tangguh
Sekretariat Jenderal
Sasaran Program:
Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik
22 Sasaran Kegiatan
34 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal
Sasaran Program:
Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima
Indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal
9 Sasaran Kegiatan
10 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal
Sasaran Program:
Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal
Nilai sistem merit Kementerian Luar Negeri
11 Sasaran Kegiatan
17 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal
Sasaran Program:
Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang Efektif
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri
5 Sasaran Kegiatan
8 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal
Sasaran Program:
Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal
Indeks pengelolaan aset Kementerian Luar Negeri
3 Sasaran Kegiatan
3 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal
Sasaran Program:
Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal
Sasaran Program:
Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel
Nilai IKPA Sekretariat Jenderal
11 Sasaran Kegiatan
11 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal
Sasaran Program:
Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel
Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri
2 Sasaran Kegiatan
3 Indikator Kinerja Kegiatan

Misi 6.3


Visi:
Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
Misi:
Meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, berdaulat dan berpengaruh di mata masyarakat internasional melalui penguatan postur diplomasi Indonesia
Tujuan:
Memperkuat postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia
Angka Pembangunan Postur Diplomasi
Sasaran Strategis:
Postur diplomasi yang tangguh
Inspektorat Jenderal
Sasaran Program:
Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel
Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan
Inspektorat Jenderal
Sasaran Program:
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri
2 Sasaran Kegiatan
2 Indikator Kinerja Kegiatan
Inspektorat Jenderal
Sasaran Program:
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini Terjadinya Resiko Permasalahan
7 Sasaran Kegiatan
20 Indikator Kinerja Kegiatan
Inspektorat Jenderal
Sasaran Program:
Tata Kelola Organisasi Inspektorat Jenderal yang Baik
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Jenderal
2 Sasaran Kegiatan
4 Indikator Kinerja Kegiatan
Inspektorat Jenderal
Sasaran Program:
Pengelolaan Aset Inspektorat Jenderal yang Optimal
Indeks pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan
Inspektorat Jenderal
Sasaran Program:
Pengelolaan Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel
1. Nilai IKPA Inspektorat Jenderal
2. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri
1 Sasaran Kegiatan
1 Indikator Kinerja Kegiatan

4.2 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi diplomasi dan hubungan luar negeri, Kemenlu telah menentukan 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran strategis ini adalah hasil pencapaian dari program-program Kemenlu. Sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya dari tahun ke tahun. Target kinerja dimaksud dimuat dalam Tabel xx. berikut:

Sasaran Strategis/ Indikator	Target					Satuan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Strategis : **Kedaulatan NKRI yang berintegritas dan diplomasi ketahanan nasional yang tangguh**						
Persentase Kemajuan Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional	90	91	92	93	94	Persentase
Sasaran Strategis : **Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang optimal**						
Indeks efektivitas diplomasi ekonomi	76	77	78	79	80	Indeks
Sasaran Strategis : **Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional**						
Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	Indeks
Sasaran Strategis : **Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi**						
Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%	98,60%	Persentase
Indeks pengaruh rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terhadap kebijakan pemangku kepentingan	3,33 (Skala 4)	3,41 (Skala 4)	3,42 (Skala 4)	3,43 (Skala 4)	3,44 (Skala 4)	Indeks
Sasaran Strategis : **Diplomasi bilateral, regional dan multilateral yang kuat**						
Persentase kesepakatan bilateral yang dihasilkan	97,45%	97,50%	97,55%	97,60%	97,65%	Persentase
Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral	75%	75,50%	76%	76,50%	77%	Persentase
Sasaran Strategis : **Menguatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional**						

Sasaran Strategis/ Indikator	Target					Satuan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional	20%	60%	100%	100%	100%	Persentase
Sasaran Strategis : **Peningkatan Citra Positif Indonesia dan Peran Diaspora dalam Pembangunan Nasional**						
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	4,10 (skala 5)	4,12 (skala 5)	4,14 (skala 5)	4,16 (skala 5)	4,18 (skala 5)	Indeks
Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	20%	25%	30%	35%	40%	Persentase
Sasaran Strategis : **Pelindungan WNI di luar negeri termasuk PMI yang integratif dan pelayanan publik yang prima**						
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93,50	94	94,50	95	95,50	Indeks
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik	4	4	4	4	4	Nilai
Sasaran Strategis : **Postur diplomasi yang tangguh**						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu	83	87,4	87,45	87,46	87,47	Nilai
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	81 (A)	81,25(A)	81,50(A)	81,75(A)	82 (A)	Nilai
Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	4 WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP	Indeks
Angka Pembangunan Postur Diplomasi	5	10	15	20	25	Nilai

4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu didukung dengan berbagai sumber daya baik dukungan sumber daya manusia, prasarana yang memadai, dukungan regulasi serta sumber pendanaan. Berkaitan dengan dukungan pendanaan, proyeksi indikasi kebutuhan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sampai dengan tahun 2029 terdapat dalam Tabel 4.3.

Program	Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
KEMENTERIAN LUAR NEGERI	**Rp9,896,588,491**	**Rp10,024,170,811**	**Rp12,405,311,504**	**Rp14,327,847,640**	**Rp.17,275,131,615**
Program: Diplomasi dan Kerja sama Internasional	Rp779,193,698	Rp1,818,666,043	Rp2,201,699,963	Rp2,614,898,601	Rp3,105,951,108
Program: Peran dan Kepemimpinan	Rp1,055,968,167				

Program	Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
KEMENTERIAN LUAR NEGERI	**Rp9,896,588,491**	**Rp10,024,170,811**	**Rp12,405,311,504**	**Rp14,327,847,640**	**Rp.17,275,131,615**
Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral					
Program: Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	Rp15,018,468				
Program: Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	Rp288,216,336	Rp266,168,116	Rp344,068,551	Rp415,586,479	Rp490,428,721
Program: Dukungan Manajemen	Rp7,758,191,822	Rp7,939,336,652	Rp9,859,542,990	Rp11,297,362,560	Rp13,678,751,786

DRAFT

Bab V Penutup

Sesuai dengan amanat konstitusi, diplomasi dan hubungan luar negeri Indonesia diabdikan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut, Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif.

Prioritas politik luar negeri Indonesia dalam kurun waktu 2025-2029 akan bertumpu pada sejumlah isu prioritas, yakni diplomasi kedaulatan, diplomasi ekonomi Pancasila, peningkatan pengaruh di Kawasan dan global, peningkatan pelindungan WNI dan peran diaspora serta optimalisasi *diplomatic tools*.

Sebagai implementasi visi dan misi Presiden RI-Wakil Presiden RI yang diejawantahkan dalam RPJMN 2025-2029, maka berbagai prioritas politik luar negeri Indonesia telah ditetapkan sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategi Kementerian Luar Negeri Tahun 2025-2029 baik dalam penetapan visi, misi, tujuan/sasaran strategis, maupun arah kebijakan dengan strategi beserta alat ukur dan targetnya.

Pencapaian target kinerja Kementerian Luar Negeri dan keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam dan luar negeri. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen pemangku kepentingan dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan (*multi-track diplomacy*) perlu dioptimalkan demi mencapai target kinerja diplomasi dan hubungan luar negeri Indonesia.

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
02 PN: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	**Sasaran Prioritas Nasional : Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan**												
	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	**65,7**	**65,8**	**65,9**	**66**	**66,10**							
	Sasaran Program Prioritas : Terpeliharanya hubungan Internasional yang kondusif dengan terselenggaranya diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi												
	Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara	**0,546**	**0,555**	**0,564**	**0,571**	**0,580**							
KEMENTERIAN LUAR NEGERI								**Rp9,896,588,491**	**Rp10,024,170,811**	**Rp12,405,311,504**	**Rp14,327,847,640**	**Rp17,275,131,615**	
	Sasaran Strategis : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang optimal												Ditjen Aspasaf, Ditjen Amerop
	Indeks efektivitas diplomasi ekonomi	76	77	78	79	80	Indeks						
	Sasaran Strategis : Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional												Ditjen Aspasaf, Ditjen Amerop, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Multilateral
	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	Indeks						
	Sasaran Strategis : Menguatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional												Ditjen IDP

DRAFT

	Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional	20	40	60	80	100	Persentase					
	Sasaran Strategis : **Kedaulatan NKRI yang berintegritas**											Ditjen HPI
	Persentase Kemajuan Hukum dan Perjanjian Internasional yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
	Sasaran Strategis : **Citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat**											Ditjen IDP
	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	4,10 (skala 5)	4,12 (skala 5)	4,14 (skala 5)	4,16 (skala 5)	4,18 (skala 5)	Indeks					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Strategis : **Pelindungan WNI di luar negeri termasuk PMI yang integratif**												Ditjen Protkons
	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93,50	94	94,50	95	95,50	Indeks						
	Sasaran Strategis : **Keterlibatan diaspora Indonesia secara aktif dalam pembangunan nasional**												Ditjen IDP
	Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	20%	25%	30%	35%	40%	Persentase						
	Ssaran Strategis : **Keterlibatan diaspora Indonesia secara aktif dalam pembangunan nasional**												
	Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	20%	25%	30%	35%	40%	Persentase						
	Sasaran Strategis : **Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi**												Ditjen Aspasaf, Ditjen Amerop, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Multilateral, Badan Strategi Kebijakan luar Negeri
	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	98,20%	98.30%	98.40%	98.50%	98.60%	Persentase						Ditjen Aspasaf, Ditjen Amerop, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Multilateral,

DRAFT

Indeks pengaruh rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terhadap kebijakan pemangku kepentingan	3,33 (Skala 4)	3,41 (Skala 4)	3,42 (Skala 4)	3,43 (Skala 4)	3,44 (Skala 4)	Indeks		Badan Strategi Kebijakan luar Negeri
Sasaran Strategis : **Diplomasi bilateral yang kuat**								Ditjen Aspasaf, Ditjen Amerop

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase kesepakatan bilateral yang dihasilkan	97,45%	97.50%	**97.55%**	**97.60%**	**97.65%**	Persentase						
	Sasaran Strategis : Diplomasi regional dan multilateral yang kuat												Ditjen Aspasaf, Ditjen Amerop, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Multilateral
	Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral	75%	75.50%	**76%**	**76.50%**	**77%**	Persentase						
	Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat												Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu	83	87.4	**87.45**	**87.46**	**87.47**	Nilai						
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	81 (A)	81,25(A)	81,50(A)	81,75(A)	82 (A)	Nilai						
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	4 WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP	Indeks						
	Angka Pembangunan Postur Diplomasi	5	10	15	20	25	Nilai						

DRAFT

Program: Diplomasi dan Kerja sama Internasional	**Sasaran Program: Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Asia Pasifik dan Afrika**	*Mendukung Sasaran Strategis : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang optimal*						**Rp1,762,976,982**	**Rp1,818,666,043**	**Rp2,201,699,963**	**Rp2,614,898,601**	**Rp3,105,951,108**	Ditjen Aspasaf
	Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	81	81.5	82	82.5	83	Indeks						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program: **Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Amerika dan Eropa**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang optimal*											Ditjen Amerop
	Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di kawasan Amerika dan Eropa	76	77	78	79	80	Indeks						
	Sasaran Program: **Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang optimal*											Ditjen HEKSP
	Tingkat efektivitas hubungan ekonomi luar negeri	80	80	80	80	80	Persentase						
	Persentase Kesepakatan Kerjasama hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional yang ditindak lanjuti oleh Stakeholder dalam Negeri	80	80	80	80	80	Persentase						
	Persentase Kesepakatan bidang ekonomi strategis yang dihasilkan	80	80	80	80	80	Persentase						
	Sasaran Program: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional*											Ditjen Aspasaf
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Program: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Kawasan Amerika dan Eropa**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional*											Ditjen Amerop

DRAFT

Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa	95%	95%	95%	96%	96%	Persentase			
Sasaran Program: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional*								Ditjen HEKSP
Persentase Kepemimpinan Indonesia Pada Forum Kerja Sama di bidang ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional	90	90	90	90	90	Persentase			
Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum Kerja Sama di bidang ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional	90	90	90	90	90	Persentase			
Sasaran Program: **Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*								Ditjen Aspasaf
Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase			
Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjtui oleh stakeholders dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase			
Sasaran Program : **Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di Kawasan Amerika dan Eropa yang tinggi**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*								Ditjen Amerop

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	98,20%	98.65%	99.10%	99.55%	100%	Persentase						
	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Program : Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	*Mendukung Sasaran Strategis : Diplomasi bilateral yang kuat*											Ditjen Aspasaf
	Persentase kesepakatan bilateral yang dihasilkan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	97,45%	97.55%	97.75%	98.00%	98.15%	Persentase						
	Persentase Data Economic Intelligence dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	98,53%	98.53%	99.00%	99.00%	100.00%	Persentase						
	Sasaran Program : Diplomasi Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang kuat	*Mendukung Sasaran Strategis : Diplomasi bilateral yang kuat*											Ditjen Amerop
	Persentase kesepakatan bilateral yang dihasilkan di kawasan Amerika dan Eropa	97,45%	97.65%	97.85%	98.05%	98.25%	Persentase						
	Persentase Data Economic Intelligence dari kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						

DRAFT

	Sasaran Program : **Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Diplomasi regional dan multilateral yang kuat*							Ditjen Aspasaf
	Persentase gagasan/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase		

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program : **Diplomasi Regional dan Multilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Kuat**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Diplomasi regional dan multilateral yang kuat*											Ditjen Amerop
	Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum regional dan multilateral di kawasan Amerika dan Eropa	90%	91%	91%	92%	92%	Persentase						
	Sasaran Program: **Menguatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Menguatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional*											Ditjen HEKSP
	Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah sesuai dengan Prioritas Nasional	20%	40%	60%	80%	100%	Persentase						
	Sasaran Program: **Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat*											Ditjen IDP
	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	4,10 (skala 5)	4,12 (skala 5)	4,14 (skala 5)	4,16 (skala 5)	4,18 (skala 5)	Indeks						
	Sasaran Program : **Keterlibatan diaspora Indonesia secara aktif dalam pembangunan nasional**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Keterlibatan diaspora Indonesia secara aktif dalam pembangunan nasional*											
	Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	20%	25%	30%	35%	40%	Persentase						

DRAFT

Sasaran Program : **Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang Prima**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat*					
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Museum Konperensi Asia Afrika	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Nilai

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program : Peningkatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	*Mendukung Sasaran Strategis : Menguatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional*											
	Persentase kerja sama pembangunan Internasional yang disepakati	90%	90%	90%%	95%	95%	Persentase						
	Sasaran Program : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri	*Mendukung Sasaran Strategis : Citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat*											
	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa Internasional terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	94,50%	94.50%	94.55%	94.55%	94.60%	Persentase						
	Sasaran Program : Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Sistematis dan Kuat	*Mendukung Sasaran Strategis : Citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat*											
	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa Nasional terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	97,30%	97,30%	97.35%	97.35%	97.40%	Persentase						
	Persentase Pencapaian Respon Digital pada Portal Situs Kementerian Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Persentase Pencapaian Respon Digital pada Media Sosial Kementerian Luar Negeri	46%	46%	46.50%	46.50%	47%	Persentase						

DRAFT

Nilai Capaian Keterbukaan Informasi Publik	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	Nilai
Sasaran Program : **Promosi Aset Diplomasi Soft Power yang Meningkat**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase promosi aset diplomasi soft power yang telah diselenggarakan	90.00%	90.05%	90.10%	90.15%	90.20%	Promosi						
	Sasaran Program : **Promosi Aset Diplomasi Publik yang Meningkat**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat*											
	Persentase promosi aset diplomasi publik yang melibatkan konstituen domestik yang telah diselenggarakan	90.00%	90.05%	90.10%	90.15%	90.20%	Promosi						
	Sasaran Program : **Peningkatan Pengelolaan Keamanan Diplomatik**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat*											
	Persentase rekomendasi keamanan diplomatik pada Perwakilan RI di luar negeri	90.00%	90.05%	90.10%	90.15%	90.20%	Persentase						
	Sasaran Program: **Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*											BSKLN
	Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan	3,42 (skala 4)	3,43 (skala 4)	3,44 (skala 4)	3,45 (skala 4)	3,46 (skala 4)	Indeks						
		3,18 (skala 4)					Indeks						

DRAFT

Indeks Kemanfaatan Diseminasi Informasi Kebijakan Luar Negeri terhadap Pemangku Kepentingan		3,20 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,30 (skala 4)	
Sasaran Program: Kebijakan luar negeri yang berkualitas	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*					
Indeks Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri dan Analisis Data yang Berkualitas	3,54 (skala 4)	3,60 (skala 4)	3,65 (skala 4)	3,65 (skala 4)	3,70 (skala 4)	Indeks

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program : **Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*											
	Indeks Persepsi atas Kualitas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri	3,50 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,60 (skala 4)	3,65 (skala 4)	3,70 (skala 4)	Indeks						
	Sasaran Program: **Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di organisasi internasional**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional*											Ditjen KSM
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	75	76	77	78	79	Persentase						
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Sasaran Program: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, Citra Positif Indonesia yang Meningkat melalui Perwakilan RI, Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri Perwakilan RI yang Kuat**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum* *Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat* *Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan* *Diplomasi Multilateral dan Regional yang Kuat di Kawasan* *Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Sistematis dan Kuat*											Perwakilan RI
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						

DRAFT

Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di forum kerja sama Multilateral	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	97.14	97.29	97.45	97.59	97.75	Persentase

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	93.75	93.98	94.21	94.45	94.69	Persentase						
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	93.8	94.05	94.28	94.52	94.76	persentase						
	Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	4,10 (skala 5)	4,12 (skala 5)	4,14 (skala 5)	4,16 (skala 5)	4,18 (skala 5)	Indeks						
	Jumlah Kesepakatan yang dihasilkan negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI	50	50	50	50	50	Kesepakatan						
	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi	90	91.5	92	92.5	93	Indeks						
	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
	Persentase tindak lanjut yang dilakukan PTRI atas hasil kesepakatan di forum kerja sama Multilateral/Kerja Sama ASEAN	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama Multilateral	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						

DRAFT

Persentase tindak lanjut yang dilakukan PTRI di atas hasil kesepakatan di forum kerja sama Multilateral/Kerja Sama ASEAN	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI	70%	71%	72%	73%	74%	Persentase						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional*											Ditjen Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Multilateral
	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral	75	76	77	78	79	Persentase						
	Presentase Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase inisiatif Indonesia yang diterima sebagai komitmen internasional pada forum kerja sama multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas	80	80,5	81	81,5	82	Persentase						
	Sasaran Program: **Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama ASEAN**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat internasional*											
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						
	Sasaran Program: **Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Kerja Sama Multilateral**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*											
	Persentase Rekomendasi dari forum Kerja Sama Multilateral yang Ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	98,20%	98.65%	99.10%	99.55%	100%	Persentase						

DRAFT

	Persentase kesepakatan kerja sama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dalam negeri	80	81	82	83	84	Persentase						
	Sasaran Program: **Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama ASEAN**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*										

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	92%	93%	94%	95%	96%	Persentase						
	Sasaran Program : **Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral**	*Mendukung Sasaran Strategis :* ***Diplomasi regional dan multilateral yang kuat***											
	Persentase Gagasan/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima dalam Forum Kerja Sama Multilateral	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
	Sasaran Program : **Diplomasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Kuat dalam Kerja Sama ASEAN**	*Mendukung Sasaran Strategis :* ***Diplomasi regional dan multilateral yang kuat***											
	Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						
	Sasaran Program : **Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan yang Kuat dalam Kerja Sama ASEAN**	*Mendukung Sasaran Strategis :* ***Diplomasi regional dan multilateral yang kuat***											
	Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Maritim, Politik dan Keamanan yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program: Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional	*Mendukung Sasaran Strategis : Kedaulatan NKRI yang berintegritas*											Ditjen HPI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Program: Kedaulatan NKRI yang Berintegritas	*Mendukung Sasaran Strategis : Kedaulatan NKRI yang berintegritas*											
	Indeks kemajuan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga	69,75	71,96	73,34	74,59	76,21	Indeks						
	Sasaran Program: Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional yang Berkualitas	*Mendukung Sasaran Strategis : Kedaulatan NKRI yang berintegritas*											
	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional dalam konsep/dokumen yang digunakan oleh K/L	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Program: Diplomasi Kewilayahan, Poltik dan Keamanan yang Kuat	*Mendukung Sasaran Strategis : Kedaulatan NKRI yang berintegritas*											
	Persentase pendapat hukum di bidang kewilayahan, politik dan keamanan yang diterima sebagai	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						

DRAFT

posisi Indonesia dalam forum internasional						
Sasaran Program: **Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Kuat**	*Mendukung Sasaran Strategis :* *Kedaulatan NKRI yang berintegritas*					
Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
Persentase pendapat hukum di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum Internasional	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI	**Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkat melalui Perwakilan RI, Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri Perwakilan RI yang Kuat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum* *Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat* *Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan* *Diplomasi Multilateral dan Regional yang Kuat di Kawasan* *Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Sistematis dan Kuat*						Rp620,877,035	Rp539,326,042	Rp745,052,443	Rp894,062,927	Rp1,072,875,516	Perwakilan RI
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama Multilateral	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	97.14	97.29	97.45	97.59	97.75	Persentase						
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	93.75	93.98	94.21	94.45	94.69	Persentase						
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	93.8	94.05	94.28	94.52	94.76	Persentase						

DRAFT

	Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	4,10 (skala 5)	4,12 (skala 5)	4,14 (skala 5)	4,16 (skala 5)	4,18 (skala 5)	Indeks					
	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase					
	Persentase tindak lanjut yang dilakukan PTRI atas hasil kesepakatan di forum kerja sama Multilateral/Kerja Sama ASEAN	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di forum kerja sama Multilateral	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi	90	91.5	92	92.5	93	Indeks						
	Jumlah Kesepakatan yang dihasilkan negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI	50	50	50	50	50	Kesepakatan						
Kegiatan: Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	**Sasaran Kegiatan: Nilai Manfaat Diplomasi yang Optimal di Kawasan Asia Tenggara**	*Mendukung Sasaran Program : Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Asia Pasifik dan Afrika*						Rp58,697,896	Rp49,656,404	Rp69,263,516	Rp81,730,951	Rp96,442,520	Dit Astara Ditjen Aspasaf
	Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di Kawasan Asia Tenggara	81	81.5	82	82.5	83	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Tenggara	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Tenggara	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											

DRAFT

	Jumlah kesepakatan bilateral yang dihasilkan di kawasan Asia Tenggara	40	41	42	43	44	Dokumen					
	Persentase data economic intelligence dari kawasan Asia Tenggara yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Persentase					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Asia Tenggara yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika*											
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Asia Tenggara	79,50 (BB)	80 (BB)	80,50 (BB)	81 (BB)	81,50 (BB)	82 (BB)						
	Sasaran Kegiatan: **Nilai Manfaat Diplomasi yang Optimal di Kawasan Asia Timur**	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											Dit Astim Ditjen Aspasaf
	Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di Kawasan Asia Timur	81	81.5	82	82.5	83	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Timur**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Timur yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Timur**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Jumlah Kesepakatan bilateral yang dihasilkan di Kawasan Asia Timur	12	13	14	15	16	Jumlah						
	Persentase Data Economic Intelligence dari Kawasan Asia Timur yang	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Persentase						

DRAFT

Ditindaklanjuti Pemangku Kepentingan Dalam Negeri						
Sasaran Kegiatan: **Tata kelola Organisasi di Direktorat Asia Timur yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Asia Timur	79,90(BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Nilai Manfaat Diplomasi yang Optimal di Kawasan Asia Selatan dan Tengah**	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											Dit Asselteng Ditjen Aspasaf
	Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	81	81.5	82	82.5	83	Persentase						
	Sasaran Kegiatan : **Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Bilateral di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang Kuat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Jumlah kesepakatan bilateral yang dihasilkan di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	12	13	14	15	16	dokumen						
	Persentase data economic intelligence negara atau wilayah akreditasi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	persentase						

DRAFT

Sasaran Kegiatan: **Tata kelola Organisasi di Direktorat Asia Selatan dan Tengah yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika*					
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Asia Timur	79,65(BB)	80 (BB)	80,50 (BB)	81 (BB)	81,50 (BB)	Nilai

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Nilai Manfaat Diplomasi yang Optimal di Kawasan Timur Tengah	*Mendukung Sasaran Program : Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											Dit Timteng Ditjen Aspasaf
	Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di Kawasan Timur Tengah	81	81.5	82	82.5	83	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Timur Tengah	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di Kawasan Timur Tengah yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah RI untuk Kedutaan Besar Palestina di Jakarta	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama Pemerintah RI untuk Kedutaan Besar Palestina di Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Timur Tengah	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Jumlah kesepakatan bilateral yang dihasilkan di Kawasan Timur Tengah	20	21	22	23	24	dokumen						

DRAFT

Persentase Data Economic Intelligence dari Kawasan Timur Tengah yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
Sasaran Kegiatan: **Tata kelola Organisasi di Direktorat Timur Tengah yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Asia Timur	79,10 (BB)	80 (BB)	80,50 (BB)	81 (BB)	81,50 (BB)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Nilai Manfaat Diplomasi yang Optimal di Kawasan Afrika Sub-Sahara**	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											Dit Afrika Ditjen Aspasaf
	Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di Kawasan Afrika Sub-Sahara	81	81.5	82	82.5	83	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Internasional yang Tinggi di Kawasan Afrika Sub-Sahara**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di Kawasan Afrika Sub-Sahara yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Afrika Sub-Sahara**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Jumlah kesepakatan bilateral yang dihasilkan di kawasan Afrika Sub-Sahara	14	14	15	15	16	Dokumen						
	Persentase data economic intelligence dari Kawasan Afrika Sub-Sahara yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	90%	100%	100%	100%	100%	Persentase						

DRAFT

Sasaran Kegiatan: **Tata kelola Organisasi di Direktorat Afrika yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika*					
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Afrika	80 (BB)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	83 (A)	Nilai

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antrakawasan Asia Pasifik dan Afrika	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											Dit KSIA Aspasaf, Ditjen Aspasaf
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Persentase gagasan/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Jumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan informasi pemanfaatan forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	21	22	23	24	26	Jumlah						

DRAFT

Jumlah dukungan substantif kepada pemangku kepentingan yang dimanfaatkan pada forum kerja sama Intrakawasan dan antarkawasana Asia Pasifik dan Afrika	12	13	14	15	16	Jumlah
Sasaran Kegiatan: **Tata kelola Organisasi di Direktorat KSIA Aspasaf yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika*					
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat KSIA Aspasaf	79,70 (BB)	80 (BB)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	Nilai

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Nilai Manfaat Diplomasi yang Optimal di Kawasan Pasifik dan Oseania**	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											Dit Pasos Ditjen Aspasaf
	Indeks efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan di Kawasan Pasifik dan Oseania	81	81.5	82	82.5	83	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Persentase						
	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum regional di Kawasan Pasifik dan Oseania yang ditindaklanjuti oleh pemegang kepentngan dalam negeri	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Pasifik dan Oseania**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*											
	Jumlah kesepakatan bilateral yang dihasilkan di kawasan Pasifik dan Oseania	9	10	11	12	13	Jumlah						
	Persentase data economic intelligence dari kawasan Pasifik dan Oseania	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Persentase						

DRAFT

yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri						
Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Pasifik dan Oseania**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika*					
Persentase gagasan/prakarsa/rekomendasi yang diterima pada forum regional di Kawasan Pasifik dan Oseania	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Persentase

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Amerika dan Eropa	**Sasaran Kegiatan: Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Amerika I**	*Mendukung Sasaran Program : Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Amerika dan Eropa*						Rp58,180,437	Rp48,000,607	Rp68,652,916	Rp81,010,440	Rp95,592,320	Dit Amerika I Ditjen Amerop
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan di kawasan Amerika I	97.14	97.29	97.45	97.59	97.75	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi di kawasan Amerika I	93.75	93.98	94.21	94.45	94.69	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata di kawasan Amerika I	93.8	94.05	94.28	94.52	94.76	persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di kawasan Amerika I yang tinggi	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di Kawasan Amerika dan Eropa yang tinggi*											
	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika I yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi bilateral di kawasan Amerika I yang kuat	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang kuat*											
	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan di kawasan Amerika I	27	27	27	28	28	Kesepakatan						

DRAFT

	Persentase Data Economic Intelligence dari kawasan Amerika I yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola organisasi di Direktorat Amerika I yang baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa*										

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Amerika I	79.90	80 (BB)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Amerika II	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Amerika dan Eropa*											Dit Amerika II Ditjen Amerop
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan di kawasan Amerika II	85	86	87	88	89	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi di kawasan Amerika II	80	81	82	83	84	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata di kawasan Amerika II	89	90	91	92	93	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasionla di kawasan Amerika II yang tinggi	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di Kawasan Amerika dan Eropa yang tinggi*											
	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika II yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi bilateral di kawasan Amerika II yang kuat	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang kuat*											

DRAFT

Jumlah kesepakatan yang dihasilkan di kawasan Amerika II	8	9	10	11	12	Kesepakatan
Persentase Data Economic Intelligence dari kawasan Amerika II yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola organisasi di Direktorat Amerika II yang baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa*											
	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Amerika II	79.85	80 (BB)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Eropa I**	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Amerika dan Eropa*											Dit Eropa I Ditjen Amerop
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan di kawasan Eropa I	97.01	97.6	97.80	98.0	98.2	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi di kawasan Eropa I	90.32	90.5	90.7	90.9	91	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata di kawasan Eropa I	91.50	91.8	92.0	92.2	92.4	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasionla di kawasan Eropa I yang tinggi**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di Kawasan Amerika dan Eropa yang tinggi*											
	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Eropa I yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						

DRAFT

Sasaran Kegiatan: **Diplomasi bilateral di kawasan Eropa I yang kuat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang kuat*					
Jumlah kesepakatan yang dihasilkan di kawasan Eropa I	21	21	21	22	22	Kesepakatan

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Data Economic Intelligence dari kawasan Eropa I yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Tata kelola organisasi di Direktorat Eropa I yang baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa*											
	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Eropa I	79.90	80 (BB)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Eropa II**	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Amerika dan Eropa*											Dit Eropa II Ditjen Amerop
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan di kawasan Eropa II	94.13	94.85	95.58	96.3	97.02	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi di kawasan Eropa II	90.10	90.87	91.64	92.41	93.18	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata di kawasan Eropa II	88.21	88.32	88.43	88.54	88.65	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di kawasan Eropa II yang tinggi**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di Kawasan Amerika dan Eropa yang tinggi*											

DRAFT

Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Eropa II yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
Sasaran Kegiatan: **Diplomasi bilateral di kawasan Eropa II yang kuat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang kuat*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan di kawasan Eropa II	12	12	13	13	14	Kesepakatan						
	Persentase Data Economic Intelligence dari kawasan Eropa II yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Tata kelola organisasi di Direktorat Eropa II yang baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa*											
	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Eropa II	79.80	80 (BB)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Kawasan Amerika dan Eropa**	*Mendukung Sasaran Program :* *IKepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Kawasan Amerika dan Eropa*											Dit KSIA Amerop Ditjen Amerop
	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	95%	95%	95%	96%	96%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kesepakatan internasional pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di Kawasan Amerika dan Eropa yang tinggi*											
	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						

DRAFT

Sasaran Kegiatan: **Diplomasi regional dan multilateral pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa yang kuat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Regional dan Multilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Kuat*					
Presentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	90%	91%	91%	92%	92%	Persentase

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Tata kelola organisasi di Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa yang baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa*											
	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	79.50 (BB)	80 (BB)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	Nilai						
Kegiatan: **Pemantapan Diplomasi dan KerjaSama Internasional dalam Lingkup hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional**	**Sasaran Kegiatan:** **Penguatan peran diplomasi di sektor perdagangan internasional untuk Pengembangan norma, standardisasi, akses pasar dan tata kelola internasional serta kerja sama internasional**	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan*							Rp17,324,835	Rp28,869,751	Rp34,066,306	Rp40,198,241	Dit Perdagangan Internasional, Ditjen HEKSP
	Tingkat efektivitas hubungan ekonomi strategisdi bidang perdagangan	85	85	85	85	85	Persentase						
	Persentase kesepakatan kerja sama di bidang perdagangan yang ditindak lanjuti oleh Stakeholder dalam negeri	87	87	87	87	87	Persentase						
	Persentase kesepakatan ekonomi strategis di bidang perdagangan yang dihasilkan	88	88	88	88	88	Persentase						
	Persentase perundingan di bidang Perdagangan Internasional yang diselesaikan	70	71	72	73	74	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Perdagangan Internasional yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*											

DRAFT

Nilai evaluasi AKIP Direktorat Perdagangan Internasional	79 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Indeks						
Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Perdagangan Internasional yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*											
Persentase realisasi anggaran Direktorat Perdagangan Internasional	90%	90%	90%	90%	90%	Persentase						
Sasaran Kegiatan: Penguatan peran diplomasi di sektor investasi dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan*											Dit Investasi dan Ekonomi Kreatf, Ditjen HEKSP
Tingkat efektivitas hubungan ekonomi strategis di bidang investasi dan ekonomi kreatif	83	83	83	83	83	Persentase						
Persentase Kesepakatan Kerjasama di bidang investasi dan ekonomi kreatif yang ditindak lanjuti oleh Stakeholder dalam Negeri	85	85	85	85	85	Persentase						
Persentase Kesepakatan ekonomi strategis di bidang investasi dan ekonomi kreatif yang dihasilkan	86	86	86	86	86	Persentase						
Persentase perundingan di bidang Investasi dan Ekonomi Kreatif yang diselesaikan	70	71	72	73	74	Persentase						
Sasaran Kegiatan: Penguatan peran diplomasi di sektor sumber daya dan industrialisasi untuk mendorong kemandirian bangsa	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan*											Dit. Sumber Daya dan Industrialisasi, Ditjen HEKSP
Tingkat efektivitas hubungan ekonomi strategis di bidang sumber daya dan industrialisasi	80	80	80	80	80	Persentase						

DRAFT

	Persentase Kesepakatan Kerja sama di bidang sumber daya dan Industrialisasi yang ditindaklanjutioleh Stakeholder dalam Negeri	82	82	82	82	82	Persentase					
	Persentase Kesepakatan ekonomi strategis di bidang sumber daya dan industrialisasiyang dihasilkan	85	85	85	85	85	Persentase					
	Persentase perundingan di bidang Sumber Daya dan Industrialisasi yang diselesaikan	70	71	72	73	74	Persentase					
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Sumber Daya dan Industrialisasi yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*										
	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Sumber Daya dan Industrialisasi	79 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Indeks					
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Sumber Daya dan Industrialisasi yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*										
	Persentase realisasi anggaran Direktorat Sumber Daya dan Industrialisasi	99%	99%	99%	99%	99%	Persentase					
	Sasaran Kegiatan: **Penguatan peran dan posturing kerja sama pembangunan internasional yang berkontribusi terhadap ekonomi nasional diplomasi di sektor sumber daya dan industrialisasi untuk mendorong kemandirian bangsa**	*Mendukung Sasaran Program :* *Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan*										Dit. KSPI, Ditjen HEKSP
	Persentase Kerja Sama Pembangunan Internasional Termasuk KSST yang dihasilkan	80	80	80	80	80	Persentase					

DRAFT

	Persentase Perencanaan, Penguatan, Promosi dan Perluasan Jaringan Kemitraan Kerja Sama Pembangunan Internasional	85	85	85	85	85	Persentase					
	Sasaran Kegiatan: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama di bidang perdagangan internasional**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan*										Dit Perdagangan Internasional, Ditjen HEKSP
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum di bidang perdagangan Internasional	90	90	90	90	90	Persentase					
	Persentase rekomendasi dari forum di bidang perdagangan Internasional yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	80	80	80	80	80	Persentase					
	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi pada forum di bidang perdagangan Internasional	90	90	90	90	90	Persentase					
	Sasaran Kegiatan: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama di Investasi dan Ekonomi Kreatif**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan*										Dit Investasi dan Ekonomi Kreatfi, Ditjen HEKSP
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum di bidang Investasi dan ekonomi kreatif	90	90	90	90	90	Persentase					
	Persentase rekomendasi dari forum di bidang Investasi dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	80	80	80	80	80	Persentase					
	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi pada forum di bidang Investasi dan ekonomi kreatif	90	90	90	90	90	Persentase					
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Investasi dan Ekonomi Kreatfi yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*										

DRAFT

Nilai evaluasi AKIP Direktorat Investasi dan Ekonomi Kreatfi	79 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Indeks						
Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Investasi dan Ekonomi Kreatfi yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*											
Persentase realisasi anggaran Direktorat Investasi dan Ekonomi Kreatfi	90%	90%	90%	90%	90%	Persentase						
Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama di bidang sumber daya dan industrialisasi	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan*											Dit. Sumber Daya dan Industrialisasi, Ditjen HEKSP
Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum di bidang sumber daya dan industrialisasi	90	90	90	90	90	Persentase						
Persentase rekomendasi dari forum di bidang sumber daya dan industrialisasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	80	80	80	80	80	Persentase						
Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi pada forum di bidang sumber daya dan industrialisasi	90	90	90	90	90	Persentase						
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi di Direktorat Sumber Daya dan Industrialisasi yang Baik	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*											
Nilai evaluasi AKIP Direktorat Sumber Daya dan Industrialisasi	79 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Indeks						

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Sumber Daya dan Industrialisasi yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*										
	Persentase realisasi anggaran Direktorat Sumber Daya dan Industrialisasi	90%	90%	90%	90%	90%	Persentase					
	Sasaran Kegiatan: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama di bidang kerja sama pembangunan internasional**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan*										Dit KSPI, DItjen HEKSP
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum di bidang kerja sama pembangunan internasional	90	90	90	90	90	Persentase					
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia di bidang kerja sama pembangunan internasional yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri	90	90	90	90	90	Persentase					
	Persentase rekomendasi dari forum di bidang kerja sama pembangunan internasional yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	80	80	80	80	80	Persentase					
	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi pada forum di bidang kerja sama pembangunan internasional	90	90	90	90	90	Persentase					
	Sasaran Kegiatan: **Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang Telah Sesuai dengan Prioritas Nasional**	*Mendukung Sasaran Program :* *Menguatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional*										
	Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Strategi Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internsional	20%	25%	30%	35%	40%	Persentase					

DRAFT

	yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasional											
	Persentase Kerja Sama Pembangunan yang disepakati	90%	90.05%	91%	91.05%	91.10%	Perjanjian Kerja Sama					
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional yang kuat	*Mendukung Sasaran Program : Menguatnya Kerja Sama Pembangunan Internasional*										
	Jumlah Rekomendasi Perencanaan, Penguatan, Promosi dan Perluasan Jaringan Kemitraan Kerja Sama Pembangunan Internasional	9	15	18	18	18	Rekomendasi					
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi di Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional yang Baik	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*										
	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional	79 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Indeks					
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan*										
	Persentase realisasi anggaran Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional	99%	99%	99%	99%	99%	Persentase					
Kegiatan: Peningkatan Citra Positif indonesia di Dunia Internasional	**Sasaran Kegiatan: Promosi Aset Diplomasi Soft Power yang Meningkat**	*Mendukung Sasaran Program : Promosi Aset Diplomasi Soft Power yang Meningkat*						Rp28,368,579		Rp33,474,923	Rp39,500,410	Rp46,610,482	Dit Diplik, Ditjen IDP

DRAFT

								Rp17,685,113				
	Persentase Promosi Aset Diplomasi Soft Power yang Telah Diselenggarakan	90%	90.05%	90.10%	90.15%	90.20%	Promosi					
	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Aset Soft Power yang Diajukan	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan					
	Sasaran Kegiatan: **Promosi Aset Diplomasi Publik yang Meningkat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Promosi Aset Diplomasi Publik yang Meningkat*										
	Persentase Promosi Aset Diplomasi Publik yang Melibatkan Konstituen Domestik yang Telah Diselenggarakan	90%	90.05%	90.10%	90.15%	90.20%	Indeks					
	Sasaran Kegiatan: **Pelayanan Publik Museum Konperensi Asia Afrika yang Prima**	*Mendukung Sasaran Program :* *Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang Prima*										
	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik Museum Konperensi Asia Afrika	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Indeks					
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Diplomasi Publik yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik*										

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Diplomasi Publik	79,20 (BB)	80 (BB)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Diplomasi Publik yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik*											
	Persentase realisasi anggaran Direktorat Diplomasi Publik	99%	99%	99%	99%	99%	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri	*Mendukung Sasaran Program :* *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri*											Dit Infomed, Ditjen IDP
	Persentase pemberitaan positif pada media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	94,50%	95.50%	96%	97%	97%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Sistematis dan Kuat	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Sistematis dan Kuat*											
	Persentase pemberitaan positif pada media massa nasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	97,30%	97.35%	97.50%	97.55%	97.60%	Persentase						
	Persentase pencapaian respon digital pada Portal Situs Kementerian Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
		48%	48.50%	49%	49.50%	50%	Persentase						

DRAFT

Persentase pencapaian respon digital pada media sosial Kementerian Luar Negeri						
Nilai capaian keterbukaan informasi publik	91,98	92	92.5	93	93.5	Nilai

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Informasi dan Media yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik*											
	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Informasi dan Media	80,05 (A)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Informasi dan Media yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik*											
	Persentase realisasi anggaran Direktorat Informasi dan Media	99%	99%	99%	99%	99%	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Peningkatan Pengelolaan Keamanan Diplomatik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Peningkatan Pengelolaan Keamanan Diplomatik*											Dit Kamdip, Ditjen IDP
	Persentase rekomendasi keamanan diplomatik pada Perwakilan RI di luar negeri	90%	99%	99%	99%	99%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Sistem Pengamanan Diplomatik yang Handal**	*Mendukung Sasaran Program :* *Peningkatan Pengelolaan Keamanan Diplomatik*											
	Jumlah rekomendasi dan kerja sama keamanan diplomatik dalam lingkup domestik	39	40	41	42	43	Jumlah						

DRAFT

Persentase tindak lanjut keamanan informasi, personel dan kerja sama keamanan diplomatik	90%	90.05%	90.10%	90.15%	90.20%	Persentase
Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Keamanan Diplomatik yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Informasi dan Media	77,85 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai						Dit Urusan Diaspora
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Keamanan Diplomatik yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik*											
	Persentase realisasi anggaran Direktorat Informasi dan Media	99%	99%	99%	99%	99%	Indeks						
	Sasaran Kegiatan : Keterlibatan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional	*Mendukung Sasaran Program : Keterlibatan diaspora Indonesia secara aktif dalam pembangunan nasional*											
	Persentase peningkatan akses dan Fasilitas bagi diaspora Indonesia	20	20	20	20	20	Persentase						
	Persentase pendataan diaspora dalam pemetaan talenta	20	20	20	20	20	Persentase						
	Persentase pelibatan diaspora dalam kegiatan diplomasi	80	80	80	80	80	Persentase						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: Perumusan Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri	**Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi (Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika)**	Mendukung Sasaran Program : *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*						Rp13,069,751	Rp9,281,167	Rp15,422,307	Rp18,198,321	Rp21,474,020	PSKK Aspasaf, BSKLN
	Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan (Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika)	3,42	3.50	3.55	3.60	3.65	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Kebijakan luar negeri yang berkualitas (Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika)	*Mendukung Sasaran Program :* *Kebijakan luar negeri yang berkualitas*											
	Indeks Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas pada Lingkup Isu-Isu di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	3,64	3.70	3.75	3.80	3.85	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif (Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika)	*Mendukung Sasaran Program :* *Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif*											
	Indeks Persepsi atas Kualitas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri pada Lingkup Isu- Isu di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	3.6	3.65	3.70	3.75	3,80	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di BSKLN*											
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	Nilai						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi (Pusat Strategi Kebijakan Multilateral)**	Mendukung Sasaran Program : *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*											PSKK Multilateral, BSKLN
	Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan (Dit. Pusat Strategi Kebijakan Multilateral)	3,42	3.5	3.6	3.65	3.70	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Kebijakan luar negeri yang berkualitas (Pusat Strategi Kebijakan Multilateral)**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kebijakan luar negeri yang berkualitas*											
	Indeks Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas pada Lingkup Isu-Isu Multilateral	3,55	3.6	3.65	3.70	3.75	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif (Pusat Strategi Kebijakan Multilateral)**	*Mendukung Sasaran Program :* *Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif*											
	Indeks Persepsi atas Kualitas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri pada Lingkup Isu- Isu Multilateral	3,53	3.6	3.65	3.70	3.75	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Multilateral**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di BSKLN*											

DRAFT

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat Strategi Kebijakan Multilateral	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	Nilai				
Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi (Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa)	Mendukung Sasaran Program : *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi*									PSKK Amerop, BSKLN
Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan (Dit. Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa)	3,42	3.5	3.55	3.6	3.65	Indeks				

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Kebijakan luar negeri yang berkualitas (Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa)**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kebijakan luar negeri yang berkualitas*											
	Indeks Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas pada Lingkup Isu-Isu di Kawasan Amerika dan Eropa	3,61	3.65	3.70	3.75	3.80	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif (Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa)**	*Mendukung Sasaran Program :* *Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif*											
	Indeks Persepsi atas Kualitas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri pada Lingkup Isu- Isu di Kawasan Amerika dan Eropa	3,60	3.65	3.70	3.75	3.80	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di BSKLN*											
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa	80,50 (A)	81 (A)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Kebijakan luar negeri yang berkualitas (Dit. Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data)**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kebijakan luar negeri yang berkualitas*											PSK IKAD, BSKLN
		3,34	3.4	3.45	3.5	3.55	Indeks						

DRAFT

Indeks Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri dan Analisis Data yang Berkualitas						
Sasaran Kegiatan: **Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif (Dit. Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data)**	*Mendukung Sasaran Program :* *Penyusunan strategi kebijakan luar negeri yang efektif dan partisipatif*					
Indeks Persepsi atas Kualitas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri	3,27	3.3	3.35	3.4	3.45	Indeks

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data yang baik	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di BSKLN*											
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data	80,50	81 (A)	81.5 (A)	82 (A)	82.5 (A)	Nilai						
Kegiatan: Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI	**Sasaran Kegiatan: Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal**	*Mendukung Sasaran Program : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di kawasan Asia dan Pasifik Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di kawasan Amerika dan Eropa Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di kawasan*						Rp620,877,035	Rp539,326,042	Rp745,052,443	Rp894,062,927	Rp1,072,875,516	Perwakilan RI
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	97.14	97.29	97.45	97.59	97.75	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi	93.75	93.98	94.21	94.45	94.69	Persentase						
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi	93.8	94.05	94.28	94.52	94.76	persentase						
	Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di organisasi internasional	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di organisasi internasional*											
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						

DRAFT

	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan : **Citra positif Indonesia di negara akreditasi**	*Mendukung Sasaran Program :* *Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat*											

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Citra Indonesia di negara akreditas	4,10 (skala 5)	4,12 (skala 5)	4,14 (skala 5)	4,16 (skala 5)	4,18 (skala 5)	Indeks						
	Sasaran Kegiatan : **Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika* *Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di Kawasan Amerika dan Eropa yang tinggi*											
	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan : **Diplomasi bilateral di negara akreditasi yang Kuat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika* *Diplomasi Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang kuat*											
	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditas	50	50	50	50	50	Jumlah						
	Sasaran Kegiatan : **Diplomasi multilateral di negara akreditasi yang Kuat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Regional dan Multilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika* *Diplomasi Regional dan Multilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang kuat*											
	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan : **Basis data yang akurat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika* *Diplomasi Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang kuat*											

DRAFT

Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi	90	91.5	92	92.5	93	Indeks
Sasaran Kegiatan : **Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Kuat**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Sistematis dan Kuat*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat	70%	71%	72%	73%	74%	Persentase						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN / Koordinasi Implementasi dalam Kerja Sama ASEAN di Tingkat Nasional	**Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama ASEAN**	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama ASEAN*						Rp1,387,058	Rp1,256,630	Rp2,080,587	Rp2,600,734	Rp3,250,917	Setditjen KSA, Ditjen KSA
	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	92%	93%	94%	95%	96%	Persentase						
Kegiatan: Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN	**Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN**	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama ASEAN*						Rp17,580,539	Rp16,808,393	Rp26,370,809	Rp32,963,512	Rp41,204,391	Dit Polkam ASEAN, Ditjen KSA

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri dalam Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama Politik Kemanan ASEAN**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	92%	93%	94%	95%	96%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan yang Kuat dalam Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan yang Kuat dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Maritim, Politik dan Keamanan yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan yang Kuat dalam Kerja Sama Eksternal ASEAN**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan yang Kuat dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Maritim, Politik, dan Keamanan yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama Eksternal ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						

DRAFT

Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN*					
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	79,75 (BB)	80 (BB)	80,05 (A)	80,10 (A)	80,15 (A)	Nilai
Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Realisasi Anggaran Dit Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Ekonomi ASEAN	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama ASEAN*											Dit KSEA, Ditjen KSA
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat TInggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase Saran Kebijakan atas Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	92%	93%	94%	95%	96%	persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Ekonomi yang Kuat dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Kuat dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Ekonomi yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama Ekonomi ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	persentase						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang Baik	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN*											

DRAFT

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN	80 (A)	80,05 (A)	80,10 (A)	80,15 (A)	80,20 (A)	Nilai
Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Realisasi Anggaran Dit Kerja Sama Ekonomi ASEAN	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama ASEAN	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama ASEAN*											Dit KS Sosbud ASEAN, Ditjen KSA
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	92%	93%	94%	95%	96%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Sosial dan Budaya yang Kuat dalam Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Kuat dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Sosial dan Budaya yang diterima dalam setiap pertemuan Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN yang Baik	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN*											

DRAFT

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	79,75 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai
Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Realisasi Anggaran Dit Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Eskternal ASEAN	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Eksternal ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama Eksternal ASEAN	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan Kerja Sama Eksternal ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	92%	93%	94%	95%	96%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Kuat dalam Kerja Sama Eksternal ASEAN	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Kuat dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama Eksternal ASEAN	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						
	Persentase prakarsa dan rekomendasi di bidang Maritim, Politik, dan Keamanan yang diterima dalam	90%	92%	94%	96%	98%	Persentase						

DRAFT

pertemuan Kerja Sama Eksternal ASEAN												
Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN*											Dit KSXA, Ditjen KSA
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN	79,75 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Kerja Sama Eskternal ASEAN yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase Realisasi Anggaran Dit Kerja Sama Eskternal ASEAN	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Persentase						
Kegiatan: Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral	**Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama ASEAN*						Rp1,037,000,570	Rp1,045,241,432	Rp1,223,660,673	Rp1,443,919,594	Rp1,703,825,120	Setditjen KSM, Ditjen KSM
	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada Posisi Staretgis di Organisasi Internasional	75	76	77	78	79	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Multilateral	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi dalam Kerja Sama ASEAN*											
	Persentase Rekomendasi dari Forum Kerja Sama Multilaeral yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri	98.20%	98.65%	99.10%	99.55%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kapasitas terkait Isu-Isu Multilateral yang Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*											

DRAFT

	Indeks Peningkatan Kapasitas Peserta terkait isu-isu Multilateral	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	Nilai					
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*										Dit PPKI, Ditjen KSM
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral di bidang perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri Multilateral di bidang perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase inisiatif Indonesia yang diterima sebagai komitmen internasional pada forum kerja sama multilateral di bidang perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan dalam Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Kerja Sama Multilateral*											
	Persentase rekomendasi dari forum kerja sama multilateral di bidang perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	98.20%	98.65%	99.10%	99.55%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral Bidang Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Inelektual	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral*											
	Persentase gagasan/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam forum kerja sama multilateral di bidang perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						

DRAFT

Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*					
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual	81	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	Nilai
Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*					
Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual yang Optimal dan Akuntabel	98%	98%	98%	98%	98%	Persentase

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Kerja Sama Mulltilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*											Dit HAMK, Ditjen KSM
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Presentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri Multilateral di bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase Inisiatif Indonesia yang diterima sebagai komitmen internasional pada forum kerja sama multilateral di bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Hak Asasi Manuasi dan Kemanusiaan	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Kerja Sama Multilateral*											
	Persentase rekomendasi dari forum kerja sama multilateral di bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	98.20%	98.65%	99.10%	99.55%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kapasitas terkait Isu-Isu Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang Diselenggarakan oleh Direktorat Hak Asasi Manuasi dan Kemanusiaan	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*											

DRAFT

Indeks pemahaman peserta terkait Isu Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang disampaikan	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	Indeks
Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral*					
Persentase Gagasan/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima dalam Forum Kerja Sama Multilateral di bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*											
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	81	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*											
	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang Optimal dan Akuntabel	98%	98%	98%	98%	98%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral di bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*											Dit Sosbud OINB, Ditjen KSM
	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral di bidang sosial budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri Multilateral	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						

DRAFT

Persentase Inisiatif Indonesia yang Diterima sebagai Komitmen Internasional di bidang sosial budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase
Sasaran Kegiatan: **Dukungan dan Komitmen Nasional yang tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang**	*Mendukung Sasaran Program :* *Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Kerja Sama Multilateral*					
Persentase Rekomendasi dari Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Sosial Budaya yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri	98.20%	98.65%	99.10%	99.55%	100%	Persentase

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Rekomendasi dari Forum Kerja Sama multilateral di bidang Organisasi Internasional sektoral, Organisasi Internasional Negara Berkembang dan Kerja Sama Selatan-Selatan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri	98.20%	98.65%	99.10%	99.55%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Peningkatan Kapasitas terkait Isu-Isu Diplomasi Sosial dan Budaya yang Diselenggarakan oleh Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*											
	Indeks Pemahaman Peserta terkait Diplomasi Sosial dan Budaya di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di Forum Kerja Sama Multilateral	3	3	3	3	3	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral*											
	Persentase Gagasan/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang diterima pada diplomasi Sosial dan Budaya di bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di Forum Kerja Sama multilateral	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*											

DRAFT

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	Nilai					
Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*										
Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang yang Optimal dan Akuntabel	98%	98%	98%	98%	98%	Persentase					
Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Kerja Sama Mulltilateral pada Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*										Dit PELH, Ditjen KSM

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri Multilateral di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Persentase Inisiatif Indonesia yang diterima sebagai komitmen internasional pada forum kerja sama multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan dalam Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Kerja Sama Multilateral*											
	Persentase rekomendasi dari forum kerja sama multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral*											
	Persentase Gagasan/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam forum kerja sama multilateral di Bidang	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						

DRAFT

Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup						
Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*					
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	Nilai
Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran di Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup yang Optimal dan Akuntabel	99%	99%	99%	99%	99%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*											Dit KIPS, Ditjen KSM
	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Persentase Inisiatif Indonesia yang diterima sebagai komitmen internasional pada Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	82%	84%	86%	88%	90%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan dalam Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	*Mendukung Sasaran Program : Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Forum Kerja Sama Multilateral*											
	Persentase Rekomendasi dari Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan	98.20%	98.65%	99.10%	99.55%	100%	Persentase						

DRAFT

Perlucutan Senjata yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri						
Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata**	*Mendukung Sasaran Program :* *Diplomasi Multilateral yang Kuat di Forum Kerja Sama Multilateral*					
Persentase Gagasan/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima dalam Forum Kerja Sama Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase
Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi di Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral*											
	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata yang Optimal dan Akuntabel	99%	99%	99%	99%	99%	Persentase						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya	**Sasaran Kegiatan: Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya yang Optimal**	*Mendukung Sasaran Program : Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional*						Rp2,456,161	Rp2,489,030	Rp2,898,269	Rp3,419,958	Rp4,035,551	Dit HP Sosbud, Ditjen HPI
	Persentase Kemajuan Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya yang Berkualitas	*Mendukung Sasaran Program : Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional yang Berkualitas*											
	Persentase Pendapat Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya dalam Konsep/Dokumen yang Digunakan oleh K/L	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Sosial Budaya yang Kuat	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Kuat*											
	Persentase Pendapat Hukum di bidang Sosial Budaya yang Diterima sebagai Posisi Indonesia dalam Forum Internasional	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya yang Baik	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*											
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya	79.50	79.50	79.50	79.70	79.70	Nilai						

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*									
	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial dan Budaya	97.20	97.40	97.60	97.80	98	Persentase				

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Ekonomi	**Sasaran Kegiatan: Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang ekonomi yang optimal**	*Mendukung Sasaran Program : Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional*						Rp4,664,298	Rp4,282,784	Rp5,503,871	Rp6,494,568	Rp7,663,590	Dit HP Ekonomi, Ditjen HPI
	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang berkualitas	*Mendukung Sasaran Program : Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional yang Berkualitas*											
	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi dalam konsep/ dokumen yang digunakan oleh K/L	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi ekonomi yang kuat	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Kuat*											
	Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi	100	100	100	100	100	Persentase						
	Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi yang baik	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*											

DRAFT

	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi	77.75	78.25	78.75	79.25	79.75	Nilai					
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*										

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi	97.20	97.40	97.60	97.80	98	Persentase						
Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	**Sasaran Kegiatan: Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan**	*Mendukung Sasaran Program : Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional*						Rp5,566,972	Rp5,075,508	Rp6,569,026	Rp7,751,451	Rp9,146,713	Dit HP Kewilayahan, Ditjen HPI
	Persentase Kemajuan Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Perundingan Penegasan Batas Darat, Peningkatan Kerja Sama Perbatasan dan Peningkatan Kerja Sama Kelautan yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Kedaulatan NKRI yang Berintegritas	*Mendukung Sasaran Program : Kedaulatan NKRI yang Berintegritas*											
	Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga	69.75	71.96	73.34	74.59	76.21	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Kualitas Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan	*Mendukung Sasaran Program : Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional yang Berkualitas*											
	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan dalam konsep/ dokumen yang digunakan oleh K/L	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan:	*Mendukung Sasaran Program : Kedaulatan NKRI yang Berintegritas*											

DRAFT

	Integritas Kedaulatan NKRI dan Diplomasi Politik dan Keamanan yang Kuat										
	Persentase pendapat hukum di bidang kewilayahan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional.	100	100	100	100	100	Persentase				
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan yang baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*									

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	77.40	77.60	77.80	78	78.20	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*											
	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	95	95	95	95	95	Persentase						
Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	**Sasaran Kegiatan: Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional bidang Politik dan Keamanan**	*Mendukung Sasaran Program : Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional*						Rp2,331,037	Rp2,383,678	Rp2,750,623	Rp3,245,735	Rp3,829,968	Dit HP Polkam, Ditjen HPI
	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian linternasional di bidang politik dan keamanan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Kualitas Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Politik dan Keamanan	*Mendukung Sasaran Program : Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional yang Berkualitas*											
	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan dalam konsep/ dokumen yang digunakan oleh K/L	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan:	*Mendukung Sasaran Program : Diplomasi Kewilayahan, Politik, dan Keamanan yang Kuat*											

DRAFT

	Diplomasi Politik dan Keamanan yang kuat										
	Persentase pendapat hukum di bidang politik dan keamanan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	100	100	100	100	100	Persentase				
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan yang baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*									

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	77.90	78.30	78.70	79.10	79.50	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*											
	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	97.20	97.40	97.60	97.80	98	Persentase						
Kegiatan : Perumusan Strategi Kebijakan Penguatan Postur Diplomasi	**Sasaran Kegiatan: Postur Diplomasi yang Memadai**	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*							Rp59,854,420				BPO
	Angka Pembangunan Postur Diplomasi	5	10	15	20	25	Nilai						BDSP
	Sasaran Kegiatan: Koordinasi Penguatan Isu Prioritas Diplomasi	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*											BDSP
	Indeks kepuasan Pimpinan Kemenlu atas dukungan strategis	3,7(Skala 4)	3,72(Skala 4)	3,73(Skala 4)	3,74(Skala 4)	3,75(Skala 4)	Indeks						BDSP
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan strategis kepada Pimpinan	*Mendukung Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*											BDSP
	Indeks kepuasan Pimpinan Kemenlu atas dukungan strategis	3,7(Skala 4)	3,72(Skala 4)	3,73(Skala 4)	3,74(Skala 4)	3,75(Skala 4)	Indeks						

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan arahan Pimpinan yang Optimal**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*										BDSP
	Persentase tindak lanjut arahan Pimpinan Kemenlu yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					BDSP
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Biro Dukungan Strategis Pimpinan yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*										BDSP
	Nilai evaluasi AKIP Biro Dukungan Strategis Pimpinan	79 (BB)	79,5 (BB)	80 (A)	80,5 (A)	81 (A)	Nilai					BDSP
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran pada Biro Dukungan Strategis Pimpinan yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program :* *Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral*										BDSP
	Presentase Realisasi Anggaran Biro Dukungan Strategis Pimpinan	97%	97.25%	97.50%	97.75%	98%	Persentase					BDSP

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	**Sasaran Program: Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif**	*Mendukung Sasaran Strategis : Pelindungan WNI di luar negeri termasuk PMI yang integratif*						**Rp288,216,336**	**Rp266,168,116**	**Rp344,068,551**	**Rp415,586,479**	**Rp490,428,721**	Ditjen Protokol dan Konsuler, Perwakilan RI
	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93,50	94.00	94,50	95.00	95,50	Indeks						
	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Nilai Persepsi						
	Sasaran Program: Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik	*Mendukung Sasaran Strategis : Pelindungan WNI di luar negeri termasuk PMI yang integratif*											
	Persentase Gagasan/Prakarsa/Rekomendasi yang diterima pada forum bilateral bidang kekonsuleran dan fasilitas diplomatik	75%	76%	77%	78%	79%	Persentase						
	Tingkat Efektivitas Fasilitasi Keprotokolan Sesuai Standar dan Ketentuan yang Berlaku	90%	91%	92%	93%	94%	Persentase						
	Sasaran Program: Pengelolaan Layanan kepada Pemangku Kepentingan yang Optimal	*Mendukung Sasaran Strategis : Pelindungan WNI di luar negeri termasuk PMI yang integratif*											

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Fasilitasi Layanan Data dan Informasi yang Terintegrasi di Ditjen Protokol dan Konsuler	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
Program: **Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik** **Sasaran Program: Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif; Pengelolaan Layanan kepada Pemangku Kepentingan yang Optimal, Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik**													
Kegiatan: **Pelayanan dan Pelindungan WNI Pusat**	**Sasaran Kegiatan:** **Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif**	*Mendukung Sasaran Program:* *Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif*						Rp78,452,638	Rp60,020,713	Rp92,574,113	Rp114,055,114	Rp128,900,195	Dit PWNI, Ditjen Protkons
	Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri	87.00	87.50	88.00	88.50	89.00	Persentase						
	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Nilai Persepsi						
	Sasaran Kegiatan: **Terintegrasi dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelindungan WNI Termasuk Pekerja Migran Indonesia**	*Mendukung Sasaran Program:* *Pengelolaan Layanan kepada Pemangku Kepentingan yang Optimal*											
	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	98.00	98.10	98,20	98,3	98,4	Indeks						
	Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri	98.70	98,8	98,9	99	99,1	Indeks						
	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	96.00	96.1	96,2	96,3	96,4	Indeks						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Direktorat Pelindungan WNI yang baik**	*Mendukung Sasaran Program:* *Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif*											
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Pelindungan WNI	80.45 (A)	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Pelindungan WNI yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program:* *Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif*											
	Relaisasi Anggaran Direktorat Pelindungan WNI	99%	99%	99%	99%	99%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Bilateral yang Kuat pada Bidang Kekonsuleran**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											Dit Konsuler, Ditjen Protkons
	Persentase Gagasan/Prakarsa/ Rekomendasi yang diterima pada Forum Bilateral Bidang Kekonsuleran	75	76	77	78	79	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Pelindungan WNI di Luar Negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Integratif**	*Mendukung Sasaran Program:* *Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif*											
	Nilai Persepsi Kepuasaan Pelayanan Legalisasi Kekonsuleran	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Efektivitas Fasilitasi Diplomatik Indonesia Dalam Hubungan Antar Negara yang optimal sesuai ketentuan dan kepentingan nasional**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											
	Persentase Efektivitas Fasilitasi Kekonsuleran Sesuai Peraturan yang Berlaku	100	100	100	100	100	Persentase						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Diseminasi/ Pembekalan Bidang Kekonsuleran kepada Pemangku Kepentingan (K/L, PNA/OI)	100	100	100	100	100	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Direktorat Konsuler yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Konsuler	79.20 (A)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Konsuler yang Optimal Dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											
	Realisasi Anggaran Direktorat Konsuler	99%	99%	99%	99%	99%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Efektivitas Fasilitasi Diplomatik Indonesia Dalam Hubungan Antar Negara yang optimal sesuai ketentuan dan kepentingan nasional**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											
	Persentase kerja sama diplomatik Pada Organisasi Masyarakat Asing	70	70	70	70	70	Persentase						
Program: **Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik** **Sasaran Program: Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik**													
Kegiatan: **Pelayanan Keprotokolan dan Fasilitas Diplomatik**	**Sasaran Kegiatan:** **Hubungan Baik dalam Tata Pergaulan Antar Negara yang Optimal di Bidang Keprotokolan**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*						Rp11,100,000	Rp12,300,000	Rp13,098,000	Rp15,455,640	Rp18,237,656	Dit Protokol, Ditjen Protkons

DRAFT

	Tingkat Kelancaran dalam Penyelenggaraan Fasilitasi Keprotokolan sesuai Ketentuan dan Kebiasaan yang Berlaku Secara Nasional maupun Internasional	75	76	77	78	79	Persentase					
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Bilateral yang kuat pada bidang Keprotokolan**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*										
	Tingkat Efektivitas Fasilitasi Keprotokolan sesuai Standar dan Ketentuan yang Berlaku	90	91	92	93	94	Persentase					
	Presentasi Diseminasi/Pembekalan Fasilitasi Keprotokolan kepada Pemangku Kepentingan	100	100	100	100	100	Persentase					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Direktorat Protokol yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Protokol	78 (BB)	78,50 (BB)	79 (A)	79,50 (BB)	80 (BB)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Protokol yang Optimal dan Akuntabel**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											
	Realisasi Anggaran Direktorat Protokol	99%	99%	99%	99%	99%	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Diplomasi Bilateral yang Kuat pada Bidang Fasilitas Diplomatik**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											Dit Fasdip, Ditjen Protkons
	Persentase Gagasan/Prakarsa/Rekomendasi yang diterima pada Forum Bilateral Bidang Fasilitas Diplomatik	75	76	77	78	79	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: **Efektivitas Fasilitasi Diplomatik Indonesia dalam Hubungan Antar Negara yang Optimal sesuai Ketentuan dan Kepentingan Nasional**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											
	Indeks Pemberian Hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik kepada PNA/OI sesuai Ketentuan dengan Pertimbangan Asas Resiprositas	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						

DRAFT

Persentase Diseminasi/Pembekalan Fasilitasi Diplomatik kepada Pemangku Kepentingan	100	100	100	100	100	Persentase
Sasaran Kegiatan: **Efektivitas Fasilitasi Diplomatik Indonesia Dalam Hubungan Antar Negara yang optimal sesuai ketentuan dan kepentingan nasional**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*					
Persentase kerja sama keamanan diplomatik pada kunjungan orang asing	70	70	70	70	70	Persentase
Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Direktorat Fasilitas Diplomatik yang Baik**	*Mendukung Sasaran Program:* *Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Fasilitas Diplomatik	79.30 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Fasilitas Diplomatik yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Program: Diplomasi Bilateral yang Kuat pada bidang Keprotokolan, Kekonsuleran dan Fasilitas Diplomatik*											
	Realisasi Anggaran Direktorat Fasilitas Diplomatik	99	99	99	99	99	Persentase						
Program: Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Sasaran Program: Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif													
Kegiatan : Pelayanan dan Pelindungan WNI di Perwakilan RI	**Sasaran Kegiatan: Pelindungan WNI dan pelayanan publik yang prima**	*Mendukung Sasaran Program: Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif*						Rp198,663,698	Rp193,847,403	Rp238,396,438	Rp286,075,725	Rp343,290,870	Perwakilan RI
	Persentase kasus WNI di negara akreditasi yang diselesaikan	87%	87%	87%	87%	87%	Persentase						
	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran	4	4	4	4	4	Nilai						
	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI	4	4	4	4	4	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Basis Data yang Kuat	*Mendukung Sasaran Program: Pelindungan WNI di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang integratif*											
	Persentase WNI di negara akreditasi yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen	**Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika**	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*						**Rp7,845,395,173**	**Rp7,939,336,652**	**Rp9,859,542,990**	**Rp11,297,362,560**	**Rp13,678,751,786**	Ditjen Aspasaf
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	80.30	80.35	80.40	80.45	80.50	Nilai						
	Indeks pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	3.5	3.65	3.75	3.85	3.88	Nilai						
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	90	93.5	94	94	94.5	Indeks						
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)						
	Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang Kuat	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											Ditjen Amerop

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	81,00 (A)	81,05 (A)	81,10 (A)	81,15 (A)	81,20 (A)	Indeks						
	Indeks pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	3,3	3.3	3.4	3.4	3.4	Nilai						
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	95	95	96	96	96	Nilai						
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)						
	Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan kerja Sama Pembangunan	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											Ditjen HEKSP
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Indeks Pengelolaan BMN Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Indeks						
	Nilai IKPA Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	93	94	95	96	97	Nilai						

DRAFT

	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	Indeks						
	Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											Ditjen KSA
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen kerja sama ASEAN	81,10	81.20	81.30	81.40	81.50	Indeks						
	Indeks pengelolaan BMN Ditjen kerja sama ASEAN	3,3	3.5	3.7	3.9	4	Nilai						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen kerja sama ASEAN	94	95	96	97	98	Nilai						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)						
	Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											Ditjen KSM
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	81	81.25	81.5	81.75	82	Nilai						
	Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal kerja sama Multilateral	3,25	3.5	3.75	4	4.25	Indeks						
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	94,50	94.75	95	95.25	95.5	Nilai						
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)						
	Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											Ditjen HPI
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	79.80 (BB)	80 (BB)	80.20 (A)	80.40 (A)	80.60 (A)	Nilai						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	3.2 (skala 4)	3.3 (skala 4)	3.4 (skala 4)	3.5 (skala 4)	3.6 (skala 4)	Indeks						
	Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	99.62	99.62	99.62	99.62	99.62	Nilai						
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)						
	Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											Ditjen IDP
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	80,65 (A)	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	Nilai						
	Indeks pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	3,10	3.15	3.2	3.25	3.3	nilai						
	Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	Indeks						
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	Indeks						
	Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											Ditjen Protkons

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	79,90 (BB)	80,00 (A)	81,00 (A)	82,00 (A)	83,00 (A)	Nilai						
	Indeks Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	3.81	3.85	3.90	3.95	4.00	Indeks						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	Nilai						
	Sasaran Program : Infrastruktur Diplomasi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri yang Kuat	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											BSKLN
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	Nilai						
	Indeks pengelolaan BMN Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	3,65	3.7	3.75	3.8	3.85	Nilai						
	Nilai IKPA Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	96	96	96	96	96	Nilai						
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	Indeks						
	Sasaran Program : Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											Inspektorat Jenderal

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	Nilai						
	Tingkat maturitas SPIP Kementerian Luar Negeri	3,86 (Skala 5)	3,86 (Skala 5)	3,86 (Skala 5)	3,86 (Skala 5)	3,86 (Skala 5)	Nilai						
	Sasaran Program : Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	Indeks						
	Sasaran Program : Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal	3,30 (skala 4)	3.31	3.32	3.33	3.34	Nilai						
	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Level kapabilitas APIP	3,20 (level 5)	3.21	3.22	3.23	3.24	Indeks						
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI	93%	93.1	93.2	93.3	93.4	Nilai						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini Terjadinya Resiko Permasalahan	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI	97%	97.1	97.2	97.3	97.4	Persentase						
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI	96%	96.1	96.2	96.3	96.4	Nilai						
	Sasaran Program : Tata Kelola Organisasi Inspektorat Jenderal yang Baik	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Jenderal	81	81.1	81.11	81.12	81.13	Nilai						
	Sasaran Program : Pengelolaan Aset Inspektorat Jenderal yang Optimal	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Indeks pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	3,50	3.51	3,51	4.51	3,52	Indeks						
	Sasaran Program : Pengelolaan Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Nilai IKPA Inspektorat Jenderal	95	95.1	95.2	95.3	95.4	Nilai						
	Sasaran Program : Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											Sekretariat Jenderal

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	Nilai						
	Angka Pembangunan Postur Diplomasi	5	10	15	20	25	Nilai						
	Tingkat maturitas SPIP Kementerian Luar Negeri	3,86 (Skala 5)	3,86 (Skala 5)	3,86 (Skala 5)	3,86 (Skala 5)	3,86 (Skala 5)	Nilai						
	Sasaran Program : Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal	3,61 (skala 4)	3,65 (skala 4)	3,70 (skala 4)	3,75 (skala 4)	3,80 (skala 4)	Skala						
	Sasaran Program : Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Nilai sistem merit Kementerian Luar Negeri	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Predikat Nilai						
	Sasaran Program : Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program : Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang Efektif	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	Indeks						
	Sasaran Program : Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Indeks pengelolaan aset Kementerian Luar Negeri	3,20 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,30 (skala 4)	3,35 (skala 4)	3,40 (skala 4)	Persentase						
	Sasaran Program : Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	81,05 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	indeks						
	Sasaran Program : Pengelolaan Anggaran Sekreteriat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	*Mendukung Sasaran Strategis : Infrastruktur diplomasi yang kuat*											
	ilai IKPA Sekretariat Jenderal	94	94.5	95	95.5	96	Persentase						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika**													
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	**Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik yang Baik**							Rp6,886,810	Rp3,829,399	Rp8,126,437	Rp9,589,194	Rp11,315,250	Setditjen Aspasaf
	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	80,30 (A)	80,35 (A)	80,40 (A)	80,45 (A)	80,50 (A)	Nilai AKIP						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Asia Pasifik yang Optimal												
	Indeks Pengelolaan BMN Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	3.5	3.65	3.75	3.85	3.88	Persentase						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik yang Akuntabel												
	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Asia pasifik dan Afrika	90	93.50	94	94	94.50	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Penyelenggaraan Kegiatan Diplomasi Ekonomi Direktorat Jenderal Asia Pasifik yang Efektif												
	Jumlah fasilitasi kerja sama ekonomi dengan stakeholders di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	5	5	5	6	7	Laporan						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik yang Baik												
	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	80,10 (A)	80,20 (A)	80,30 (A)	80,40 (A)	80,50 (A)	Nilai AKIP						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa**													

DRAFT

Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Amerika dan Eropa	**Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang Baik**							Rp6,305,982	Rp3,736,512	Rp7,441,059	Rp8,780,449	Rp10,360,930	Setditjen Amerop
	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	81,00 (A)	81,05 (A)	81,10 (A)	81,15 (A)	81,20 (A)	Nilai						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang Optimal												
	Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	3.50	3.50	3.60	3.60	3.60	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang Akuntabel												
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	95	95	96	96	96	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Penyelenggaraan Kegiatan Diplomasi Ekonomi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang Efektif												
	Jumlah fasilitasi kerja sama ekonomi dengan stakeholders dikawasan Amerika dan Eropa	5	5	6	6	7	Jumlah						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang Baik												
	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	81,00 (A)	81,05 (A)	81,10 (A)	81,15 (A)	81,20 (A)	Nilai						

DRAFT

Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan**												
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	**Sasaran Kegiatan:** **Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan yang Optimal**								Rp3,050,230	Rp4,883,005	Rp5,761,946	Rp6,799,096	Setditjen HEKSP
	Indeks Pengelolaan BMN Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan yang Akuntabel**												
	Nilai IKPA Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	93	94	95	96	97	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang Baik**												
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri (Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan)	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN**													
Kegiatan: **Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Kerja Sama ASEAN**	**Sasaran Kegiatan:** **Tata kelola organisasi yang baik di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN**								Rp7,519,329	Rp5,270,946	Rp11,278,994	Rp14,098,742	Rp17,623,428	Setditjen KSA
	Nilai Evaluasi Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Kerja Sama ASEAN	**81.10**	**81.20**	**81.30**	**81.40**	**81.50**	Nilai						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset Ditjen Kerja Sama ASEAN yang Optimal												
	Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN	**3,3 (Skala 4)**	**3.5**	**3.7**	**3.9**	**4**	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Ditjen Kerja Sama ASEAN yang Optimal dan Akuntabel												
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Kerja Sama ASEAN	**94**	**95**	**96**	**97**	**98**	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Ditjen Kerja Sama ASEAN yang Baik												
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Kerja Sama ASEAN	**80.50**	**80.75**	**81**	**81.25**	**81.50**	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral**													
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen	**Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral yang Baik**							Rp8,350,568	Rp5,707,890	Rp9,853,670	Rp11,627,330	Rp13,720,250	Setditjen KSM

DRAFT

Kerja Sama Multilateral	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	81	81.25	81.5	81.75	82	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral yang Optimal												
	Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	3.25	3.5	3.75	4	4.25	Indeks						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran di di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral yang Optimal dan Akuntabel												
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	94.5	94.75	95	95.25	95.5	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Orgaisasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral yang Baik												
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	81	81.25	81.5	81.75	82	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran di Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral yang Optimal dan Akuntabel												
	Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	98%	98%	98%	98%	98%	Persentase						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik**													
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	**Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang Baik**							Rp8,594,201	Rp4,433,765	Rp10,141,157	Rp11,966,565	Rp14,120,548	Setditjen IDP

DRAFT

	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	80,65 (A)	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	Nilai					
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang Optimal dan Akuntabel											
	Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	3,10 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,20 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,30 (skala 4)	Indeks					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang Optimal dan Akuntabel												
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	95.83	96	96.5	97	97.5	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Data Indeks Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Baik												
	Jumlah laporan pengelolaan Data Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	4	5	6	7	8	Laporan						
	Sasaran Kegiatan: Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antarlembaga Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang Efektif												
	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antarlembaga Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dengan stakeholders	3	4	5	6	7	laporan						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Setditjen Informasi dan Diplomasi Publik yang Baik												
				81 (A)		82 (A)	Nilai						

DRAFT

	Nilai Evaluasi AKIP Setditjen Informasi dan Diplomasi Publik	80,40 (A)	80,50 (A)		81,50 (A)								
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional**													
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	**Sasaran Kegiatan: Organisasi dan tata kelola yang baik di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional**							Rp6,127,741	Rp4,647,715	Rp7,230,734	Rp8,532,267	Rp10,068,073	Setditjen HPI
	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	79.80 (BB)	80 (BB)	80.20 (A)	80.40 (A)	80.60 (A)	Nilai						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Kualitas Pelayanan Naskah Perjanjian Internasional yang Optimal												
	Indeks Kepuasan Pelayanan Naskah Perjanjian Internasional	3,46 (Skala 4)	3,46 (Skala 4)	3,50 (Skala 4)	3,50 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang Optimal dan Akuntabel												
	Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	3.81 (skala 4)	3,85 (skala 4)	3,90 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang Optimal dan Akuntabel												
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	99.62	99.62	99.62	99.62	99.62	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional di Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang optimal												

DRAFT

	Jumlah Naskah Perjanjian Internasional yang Dimonitoring dan Evaluasi	100 Naskah PI	150 Naskah PI	200 Naskah PI	250 Naskah PI	300 Naskah PI	Jumlah					
	Jumlah Diseminasi Terkait Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional	5	6	7	8	9	Jumlah					
	Sasaran Kegiatan : **Tata Kelola Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang baik**											

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	79,32 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler**													
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Protokol dan Konsuler	**Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang Baik**							Rp11,643,738	Rp5,399,047	Rp14,739,611	Rp17,212,741	Rp20,131,034	Setditjen Protkons
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	79,90 (BB)	80,00 (A)	81,00 (A)	82,00 (A)	83,00 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang Optimal												
	Indeks Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	3.81	3.85	3.90	3.95	4.00	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang Optimal dan Akuntabel												
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	Nilai						

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Layanan kepada Pemangku Kepentingan yang Optimal**										
	Persentase Fasilitasi Layanan Data dan Informasi yang Terintegrasi di Ditjen Protokol dan Konsuler	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase				
	Sasaran Kegiatan : **Tata Kelola Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang baik**										

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	80,00 (BB)	81,00 (A)	82,00 (A)	83,00 (A)	84,00 (A)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang Optimal dan Akuntabel												
	Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	99%	99%	99%	99%	99%	Persentase						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Inspektorat Jenderal yang Baik**													
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Inspektorat Jenderal	**Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Inspektorat Jenderal yang Baik**							Rp5,578,050	Rp3,898,221	Rp6,412,442	Rp7,375,809	Rp8,478,680	Setitjen
	Indeks Survei Penilaian Integritas	80	81	82	83	84	Nilai						
	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	81	81.1	81.11	81.12	81.13	Nilai						
	Tingkat maturitas SPIP Kementerian Luar Negeri	3.86	3.87	3.88	3.89	3.9	tingkat						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel**													

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel**										
	Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	3.3	3.31	3.32	3.33	3.34	indeks				
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Aset Inspektorat Jenderal yang Optimal**											
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Aset Inspektorat Jenderal yang Optimal**										

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	3.5	3.51	3.52	3.53	3.54	Indeks						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**													
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel pada Inspektorat Jenderal												
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	95	95.1	95.2	95.3	95.4	nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri**													
	Sasaran Kegiatan: Dukungan Peningkatan Kapabilitas APIP, serta Layanan Administrasi dan Teknis yang Optimal pada Inspektorat Jenderal												
	Level Kapabilitas APIP	3.2	3.21	3.22	3.23	3.24	level						
	Indeks Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis di Inspektorat Jenderal	3.6	3.65	3.7	3.75	3.8	indeks						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kebla Organisasi Inspektorat Jenderal yang Baik**													
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal yang baik												

DRAFT

	Nilai AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	80.7	80.71	80.72	80.73	80.74	nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Infrastruktur Diplomasi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri yang Kuat**													
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	**Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri yang baik**							Rp4,138,140	Rp3,325,286	Rp4,883,005	Rp5,761,945	Rp6,799,096	Set BSKLN
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	Nilai						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri yang Optimal												
	Nilai IKPA Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	96	96	96	96	96	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi												
	Indeks Kemanfaatan Diseminasi Informasi Kebijakan Luar Negeri terhadap Pemangku Kepentingan	3,18 (skala 4)	3,20 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,30 (skala 4)	3,35 (skala 4)	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri yang Optimal												
	Indeks pengelolaan BMN Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	3,65 (Skala 4)	3,70 (skala 4)	3,75 (skala 4)	3,80 (skala 4)	3,85 (skala 4)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri yang Baik												
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	Nilai						

DRAFT

Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik**													
Kegiatan: **Pengelolaan Organisasi**	**Sasaran Kegiatan:** **Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik**							Rp38,567,892	Rp22,536,075	Rp45,510,112	Rp53,701,933	Rp63,368,279	BPO, Setjen
	Persentase Pemenuhan Komponen Indikator Nilai RB	87%	88%	89%	90%	91%	Persentase						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kemenlu	70%	72%	75%	77%	80%	Persentase						
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri pada Aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	81 (A)	81 (A)	81 (A)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
	Tingkat Maturitas SPIP	3,86 (skala 5)	3,86 (skala 5)	3,86 (skala 5)	3,90 (skala 5)	3,90 (skala 5)	Indeks						
	Persentase Tersusunnya Rekomendasi yang Mencakup Roadmap Pencapaian Postur Diplomasi	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**													
	Sasaran Kegiatan: **Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang Prima**												
	Indeks Kepuasan layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	3,50 (skala 4)	3,50 (skala 4)	3,50 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	Indeks						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**													
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**												

DRAFT

	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	81,05 (A)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel**													
	Sasaran Kegiatan: Manajemen Kinerja dan Anggaran yang Berkualitas												
	Jumlah Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan Predikat Minimal Memuaskan (A)¨	8	9	9	10	10	Jumlah						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat Akurasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Luar Negeri	90%	90%	91%	91%	92%	Persentase						
	Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	83%	83%	83%	84%	84%	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**													
	Sasaran Kegiatan: Penguatan Organisasi yang Optimal												
	Persentase Penataan Kelembagaan yang Diselesaikan	75%	78%	82%	86%	90%	Persentase						
	Persentase Analisis Tematik Manajemen Kinerja dan Anggaran	90%	91%	92%	93%	94%	Persentase						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**													
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi yang Baik												
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Perencanaan dan Organisasi	80,25 (A)	80,40 (A)	80,55 (A)	80,80 (A)	81 (A)	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**													

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi yang Optimal dan Akuntabel**											
	Persentase Realisasi Anggaran BPO	96%	96%	96%	97%	97%	Persentase					
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal**												
Kegiatan: **Pengelolaan SDM**	**Sasaran Kegiatan:** **Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal**							Rp297,330,449	Rp259,851,729	Rp356,796,536	Rp422,837,825	Rp500,223,337	BSDM, Pusbinjabfung,Pusdiklat (Setjen)

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Sistem Merit Kementerian Luar Negeri	345 (Sangat Baik)	345 (Sangat Baik)	345 (Sangat Baik)	345 (Sangat Baik)	345 (Sangat Baik)	Nilai						
	Indeks Berakhlak	70	70.5	71	71.5	72	indeks						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**													
	Sasaran Kegiatan: **Layanan Kepegawaian yang Prima**												
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro SDM	3,61 (skala 4)	3,61 (skala 4)	3,62 (skala 4)	3,62 (skala 4)	3,63 (skala 4)	indeks						
	Persentase Rata - rata tingkat pemahaman responden terhadap peraturan/kebijakan kepegawaian	80%	81%	82%	83%	84%	Persentase						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**													
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan SDM yang Baik**												
	Persentase penempatan SDM Kemenlu sesuai dengan formasi dan kompetensi	97.50%	97.50%	98%	98%	98.50%	persentase						

DRAFT

	Persentase kasus-kasus kedisiplinan pegawai yang diselesaikan	95%	95%	95.50%	95.50%	96%	Persentase					
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**												
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Biro SDM yang Baik**											
	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro SDM	79,00 (BB)	79,50 (BB)	80,00 (BB)	80,50 (A)	81,00 (A)	Nilai					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**													
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Biro SDM yang Optimal dan Akuntabel**												
	Persentase Realisasi Anggaran Biro SDM	97.00%	97.50%	98%	98%	98%	Persentase						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal**													
	Sasaran Kegiatan: **Pembinaan Jabatan Fungsional Berbasis Sistem Merit yang Optimal**												
	Nilai Sistem Merit pada Aspek Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Kemenlu	45(skala 400)	350(skala 400)	355(skala 400)	360(skala 400)	365(skala 400)	Nilai						
	Nilai Sistem Merit pada Aspek Manajemen Kinerja Pejabat Fungsional Kemenlu	45(skala 400)	350(skala 400)	355(skala 400)	360(skala 400)	365(skala 400)	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**													
	Sasaran Kegiatan: **Layanan Pusbinjabfung yang Prima**												
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusbinjafung	3,63(skala 4)	3,64(skala 4)	3,65(skala 4)	3,66(skala 4)	3,67(skala 4)	Indeks						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal**													
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Jabatan Fungsional yang Baik**												

DRAFT

	Persentase Progres Rancangan Ketentuan tentang Jabatan Fungsional binaan Kementerian Luar Negeri yang telah disusun	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
	Persentase Pemahaman Responden tentang Jabatan Fungsional tertentu Binaan Kemenlu	80%	81%	82%	83%	84%	Persentase					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**													
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional yang Baik**												
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	79 (BB)	79,50 (BB)	80 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**													
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional yang Optimal dan Akuntabel**												
	Nilai IKPA Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	95	95.50	96	96.50	97	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal**													
	Sasaran Kegiatan: **Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Sistem Merit yang Optimal**												
	Nilai Komponen Sistem Merit pada Aspek Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Kemenlu	100 (skala 120)	101 (skala 120)	102 (skala 120)	103 (skala 120)	104 (skala 120)	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: **Meningkatnya SDM Kemenlu yang Kompeten dalam Mendukung Diplomasi dan Reformasi Birokrasi**												

DRAFT

Persentase SDM Kemenlu Bersertifikat Lulus Diklat Terkait Pencapaian Diplomasi dan Reformasi Birokrasi	20%	21%	22%	23%	24%	Persentase					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pusdiklat Terhadap Pengguna											
Indeks kepuasan terhadap pelayanan Pusdiklat	3,63 (skala 4)	3,64 (skala 4)	3,65 (skala 4)	3,66 (skala 4)	3,67 (skala 4)	Indeks					
Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Materi Diklat dalam Mendukung Pelaksanaan Diplomasi dan Reformasi Birokrasi											
Jumlah Penetapan Kurikulum dan Modul Pelatihan terkait Diplomasi dan Dukungan Reformasi Birokrasi	3	3	3	3	4	Jumlah					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kerja Sama dengan Mitra Pusdiklat											
Implementasi MoU Kerja Sama Diklat sesuai Rencana	6	6	6	6	7	Implementasi					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**													
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Pusdiklat yang Baik**												
	Nilai evaluasi AKIP Pusdiklat	79.9	79.92	79.94	79.96	79.98	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**													
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Pusdiklat yang Optimal dan Akuntabel**												
	Nilai IKPA Pusdiklat	98	98.2	98.4	98.6	98.8	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang efektif**													
Kegiatan: **Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi**	**Sasaran Kegiatan:** **Tata Kelola Data dan TIK Kementerian Luar Negeri yang Efektif**							Rp95,239,675	Rp85,662,156	Rp159,033,040	Rp261,782,951	Rp443,802,837	Pustik KP
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	Indeks						
	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.68	2.70	2.80	3.00	3.20	Indeks						
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	Indeks						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**													

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Layanan Data dan TIK yang Prima**											
	Indeks Kualitas Layanan Data dan TIK di Kementerian Luar Negeri	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	Indeks					
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang efektif**												
	Sasaran Kegiatan: **Infrastruktur TIK dan Pusat Data yang Efisien**											
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pusat Data Kementerian Luar Negeri	98.90%	98.90%	98.90%	98.90%	98.90%	Persentase					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang efektif**													
	Sasaran Kegiatan: **Keamanan Informasi dan Siber yang Teruji**												
	Indeks Kapabilitas Penerapan Keamanan Informasi (Cyber Security Maturity)	45842	45873	45904	45934	45965	Indeks						
	Indeks Layanan Manajemen dan Fasilitas Persandian Diplomatik Kementerian Luar Negeri	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: **Sistem Informasi yang Andal**												

DRAFT

	Persentase Penyelesaian Peningkatan Layanan Aplikasi Publik dan Administrasi	1	1	1	1	1	Persentase
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Data yang Optimal						
	Indeks Layanan Data Digital Diplomatik Kementerian Luar Negeri	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	Indeks
Program: Dukungan Manajemen Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik							
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Pusat TIK KP yang Baik						
	Nilai Evaluasi AKIP Pusat TIK KP	79.85	79.90	79.95	80.00	80.05	Nilai
Program: Dukungan Manajemen Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel							
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Pusat TIK KP yang Optimal dan Akuntabel						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat TIK KP	93.92	94.00	94.20	94.30	94.50	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal**													
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Aset Pusat TIK KP yang Optimal**												
	Indeks Pengelolaan Aset Pusat TIK KP	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	Indels						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal**													
	Sasaran Kegiatan: **Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**												
	Persentase Pemenuhan Standar Kualitas SDM Pusat TIK KP	79.68%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	Persentase						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**													
Kegiatan: **Legislasi dan Litigasi**	**Sasaran Kegiatan:** **Pemberian Tanggapan Hukum yang Tepat**							Rp2,728,445	Rp2,018,000	Rp3,274,134	Rp3,928,961	Rp4,714,753	Biro Hukum
	Indeks efektivitas tanggapan hukum	3,71 (skala 4)	3,71 (skala 4)	3,71 (skala 4)	3,8 (skala 4)	3,8 (skala 4)	Indeks						Biro Hukum

DRAFT

	Indeks Reformasi Hukum	81 (baik)	82 (baik)	83 (baik)	84 (baik)	85 (baik)	Baik					Biro Hukum
	Sasaran Kegiatan: Pemahaman Kebijakan dan Program Kemenlu yang Optimal											Biro Hukum
	Indeks pemahaman responden di luar kemenlu terhadap kebijakan dan program kemenlu	3,86 (skala 4)	3,86 (skala 4)	3,86 (skala 4)	3,87 (skala 4)	3,87 (skala 4)	Indeks					Biro Hukum

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik**													
Kegiatan: Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	**Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel**							Rp11,000,000	Rp8,105,262	Rp13,412,555	Rp18,474,439	Rp23,995,605	Inspektorat Jenderal
	Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah I	3.3	3.31	3.32	3.33	3.34	Indeks						
	Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II	3.32	3.33	3.34	3.35	3.36	Indeks						
	Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pengawasan oleh Inspektorat WIlayah III	3.31	3.32	3.33	3.34	3.35	Indeks						
	Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pengawasan oleh Inspektorat WIlayah IV	3.3	3.31	3.32	3.33	3.34	Indeks						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri**													
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri												
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat WIlayah I	93	93.1	93.2	93.3	93.4	Persentase						

DRAFT

	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat WIlayah II	92	92.1	92.2	92.3	92.4	Persentase					
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III	88.28	88.38	88.48	88.58	88.68	Persentase					
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada WIlayah Kerja Inspektorat WIlayah IV	90	90.1	90.2	90.3	90.4	Persentase					

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini Terjadinya Risiko Permasalahan**													
	Sasaran Kegiatan: **Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini Terjadinya Risiko Permasalahan**												
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat WIlayah I	97	97.1	97.2	97.3	97.4	Persentase						
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat WIlayah II	97	97.1	97.2	97.3	97.4	Persentase						

DRAFT

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III	97	97.1	97.2	97.3	97.4	Persentase
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	Persentase

DRAFT

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I	96	96.1	96.2	96.3	96.4	Persentase
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II	96	96.1	96.2	96.3	96.4	Persentase
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada WIlayah Kerja Inspektorat Wilayah III	96	96.1	96.2	96.3	96.4	Persentase

DRAFT

	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	Persentase
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kebla Organisasi Inspektorat Jenderal yang Baik**							
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah I yang Baik**						

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I	80.35	80.36	80.37	80.38	80.39	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah II yang Baik												
	NIlai AKIP Inspektorat Wilayah II	80.1	80.11	80.12	80.13	80.14	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah III yang Baik												
	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III	80.1	80.11	80.12	80.13	80.14	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah IV yang Baik												
	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV	80.35	80.36	80.37	80.38	80.39	Nilai						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik**													
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	**Sasaran Kegiatan: Postur Diplomasi yang Memadai**							Rp7,248,180,802	Rp7,517,864,419	Rp9,201,409,504	Rp10,441,691,409	Rp12,530,029,686	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Persentase Penyempurnaan Peta Jalan Pengembangan Infrastruktur Diplomasi dalam rangka Pemenuhan Postur Diplomasi	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						Biro Perencanaan dan Organisasi

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Sistem Pengamanan Diplomatik yang Handal**												
	Persentase kerja sama keamanan PNA OI	70	70	70	70	70	Persentase						
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**													
	Sasaran Kegiatan: **Layanan Biro Umum yang Prima**												Biro Umum

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Umum	3.75	3.75	3.8	3.8	3.85	Indeks						Biro Umum
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal**													
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal**												Biro Umum
	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	Indeks						Biro Umum
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal**													
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri yang Optimal**												Biro Umum
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian Luar Negeri	71	71.5	72	72.5	73	Nilai						Biro Umum
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**													
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Biro Umum yang Baik**												Biro Umum
	Nilai AKIP Biro Umum	76.95	77.00	77.10	77.20	77.30	Nilai						Biro Umum
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**													

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran pada Biro Umum yang Optimal dan Akuntabel**											Biro Umum
	Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	98%	98%	98%	98%	98%	Persentase					Biro Umum
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal**												
	Sasaran Kegiatan: **Pembinaan Jabatan Fungsional Berbasis Sistem Merit yang Optimal**											Biro SDM

Program/ Kegiatan	**Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator**	**Target**					**Satuan**	**Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)**					**Unit Organisasi Pelaksana**
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
	Nilai Sistem Merit pada Aspek Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Kemenlu	345 (skala 400)	345 (skala 400)	345 (skala 400)	345 (skala 400)	345 (skala 400)	Persentase						Biro SDM
	Nilai Sistem Merit pada Aspek Manajemen Kinerja Pejabat Fungsional Kemenlu	345 (skala 400)	345 (skala 400)	345 (skala 400)	345 (skala 400)	345 (skala 400)	Indeks						Biro SDM
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**													
	Sasaran Kegiatan: **Layanan Pusbinjabfung yang Prima**												Pusbinjabfung
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusbinjabfung	3,63 (skala 4)	3,63 (skala 4)	3,63 (skala 4)	3,63 (skala 4)	3,63 (skala 4)	Indeks						Pusbinjabfung
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal**													

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Jabatan Fungsional yang Baik**											Pusbinjabfung
	Persentase Progres Rancangan Ketentuan tentang Jabatan Fungsional binaan Kementerian Luar Negeri yang telah disusun	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					Pusbinjabfung
	Persentase Pemahaman Responden tentang Jabatan Fungsional tertentu Binaan Kemenlu	80%	81%	82%	83%	84%	Persentase					Pusbinjabfung
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**												
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional yang Baik**											Pusbinjabfung
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	79 (BB)	79,50 (BB)	80 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	Nilai					Pusbinjabfung
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**												
	Pengelolaan Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional yang Optimal dan Akuntabel											Pusbinjabfung

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai IKPA Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	95	95.50	96	96.50	97	Nilai						Pusbinjabfung
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**													
	Sasaran Kegiatan: **Layanan BHAKP yang Prima**												Biro Hukum
	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum	3,71 (skala 4)	3,71 (skala 4)	3,71 (skala 4)	3,8 (skala 4)	3,8 (skala 4)	Indeks						Biro Hukum
	Sasaran Kegiatan: **Layanan BHAKP yang Prima**												Biro AKP
	Indeks Kepuasan Layanan Biro AKP	3,71 (skala 4)	3,71 (skala 4)	3,71 (skala 4)	3,8 (skala 4)	3,8 (skala 4)	Indeks						Biro AKP
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**													
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Arsip yang Berkualitas**												Biro AKP
	Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kemenlu	82 (A)	82 (A)	82 (A)	83 (A)	83 (A)	Persentase						Biro AKP
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kemenlu	82 (A)	82 (A)	82 (A)	83 (A)	83 (A)	Persentase						Biro AKP

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Pengelolaan Keamanan Diplomatik											Biro AKP
	Persentase rekomendasi keamanan diplomatik pada Perwakilan RI di luar negeri	90	90	90	90	90	Persentase					Biro AKP
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal**												
	Sasaran Kegiatan: Pemahaman Kebijakan dan Program Kemenlu yang Optimal											Biro Hukum
	Indeks pemahaman responden di luar Kemenlu terhadap kebijakan dan program Kemenlu	3,86 (Skala 4)	3,86 (Skala 4)	3,86 (Skala 4)	3.90 (Skala 4)	3.90 (Skala 4)	Indeks					Biro Hukum
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**												
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Biro Hukum yang baik											Biro Hukum
	Nilai evaluasi AKIP Biro Hukum	79,50 (BB)	79,50 (BB)	79,50 (BB)	80 (BB)	80 (BB)	Nilai					Biro Hukum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**													
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Biro Hukum yang optimal dan akuntabel												Biro Hukum
	Nilai Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum	97%	97%	97%	98%	98%	Nilai						Biro Hukum

DRAFT

Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**											
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan yang baik**										Biro AKP
	Nilai evaluasi AKIP Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan	79,50 (BB)	79,50 (BB)	79,50 (BB)	80 (BB)	80 (BB)	Nilai				Biro AKP
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**											
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Biro Administrasi yang optimal dan akuntabel**										Biro AKP
	Nilai Persentase Realisasi Anggaran Biro Administrasi	97%	97%	97%	98%	98%	Nilai				Biro AKP
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**											
	Sasaran Kegiatan: **Meningkatnya dukungan strategis kepada Pimpinan**										BDSP
	Indeks kepuasan Pimpinan Kemenlu atas dukungan strategis	3,7(Skala 4)	3,72(Skala 4)	3,73(Skala 4)	3,74(Skala 4)	3,75(Skala 4)	Indeks				BDSP
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan arahan Pimpinan yang Optimal**										BDSP
	Persentase tindak lanjut arahan Pimpinan Kemenlu yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase				BDSP

DRAFT

Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**												
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Biro Dukungan Strategis Pimpinan yang Baik**											BDSP
	Nilai evaluasi AKIP Biro Dukungan Strategis Pimpinan	79 (BB)	79,5 (BB)	80 (A)	80,5 (A)	81 (A)	Nilai					BDSP
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**												
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran pada Biro Dukungan Strategis Pimpinan yang Optimal dan Akuntabel**											BDSP
	Persentase Realisasi Anggaran Biro Dukungan Strategis Pimpinan	97%	97.25%	97.50%	97.75%	98%	Persentase					BDSP

Program/ Kegiatan	**Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator**	**Target**					**Satuan**	**Alokasi (dalam ribuan rupiah)**					**Unit Organisasi Pelaksana**
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel**													
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu yang Akuntabel**												Biro Keuangan
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	Opini						Biro Keuangan
	Persentase rekomendasi BPK atas temuan Lingkup Biro Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						Biro Keuangan

DRAFT

	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel											Biro Keuangan
	Nilai IKPA Kementerian Luar Negeri	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	Nilai					Biro Keuangan
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima**												
	Sasaran Kegiatan: Layanan Biro Keuangan yang Prima											Biro Keuangan
	Indeks Kepuasan Layanan Biro Keuangan	3,61 (skala 4)	3,65 (skala 4)	3,70 (skala 4)	3,75 (skala 4)	3,80 (skala 4)	Indeks					Biro Keuangan
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**												
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel											Biro Keuangan
	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	94	94	94	94	94	Nilai					Biro Keuangan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel**													
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan Kemenlu dan Perwakilan RI yang Optimal												Biro Keuangan
	Persentase pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Jenderal dan	85%	85%	85%	85%	85%	Persentase						Biro Keuangan

DRAFT

	Perwakilan RI yang sesuai dengan peraturan											
	Persentase jumlah kasus kerugian negara yang diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%	persentase					Biro Keuangan
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik**												
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Biro Keuangan yang Baik**											Biro Keuangan
	Nilai evaluasi AKIP Biro Keuangan	79,80 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai					Biro Keuangan
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel**												
	Sasaran Kegiatan: **Pengelolaan Anggaran Biro Keuangan yang Optimal dan Akuntabel**											Biro Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Biro Keuangan	97%	97%	97%	97%	97%	Persentase					Biro Keuangan
Program: Dukungan Manajemen **Sasaran Program: Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik**												
	Sasaran Kegiatan: **Tata Kelola Organisasi Perwakilan RI yang Baik**											Perwakilan RI
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan RI	75 (BB)	75,50 (BB)	76 (BB)	76,50 (BB)	77 (BB)	Nilai					Perwakilan RI

DRAFT

	Indeks Pengelolaan BMN Perwakilan RI	3.2	3.25	3.3	3.35	3.4	Indeks					Perwakilan RI
	Nilai IKPA Perwakilan RI	85	85	85	85	85	Nilai					Perwakilan RI

DRAFT

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan UU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 terhadap UU PI No.24/2000 yang memberikan makna baru terhadap jenis dan proses pengesahan suatu Perjanjian Internasional dalam pemberlakuannya di dalam hukum internasional. Perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal di dalam UU PI No. 24/2000 agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak nasional yang melaksanakan suatu Perjanjian Internasional, termasuk kriteria penetapan/pengesahan perjanjian internasional. Hal ini juga merupakan dukungan atas prioritas Kemenlu terkait reformasi birokrasi khususnya bidang pengesahan PI.	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan BHAKP	• Kemenkumham • Kemendag • Kemsetneg • BPHN	2025 - 2029
2.	Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999	Adanya perkembangan di tingkat domestik dan internasional diantaranya proses reformasi, meningkatnya peran pemerintah daerah, peran non-state actors dalam kerja sama luar negeri, adanya peran non-state	BHAKP dan Satker terkait lainnya	• Kemenkumham • Kemsetneg • Setkab • KemenPAN RB • BPHN	2025 - 2029

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Hubungan Luar Negeri	actors global, perkembangan teknologi informasi, isu nasionalisme serta proteksionisme, kepentingan nasional yang berhadapan dengan regionalisme serta peningkatan pemberian kerja sama teknis oleh Indonesia dan lain-lain. Urgensi atas perubahan terhadap UU Hublu dimaksudkan sebagai upaya untuk semakin menyempurnakan undang - undang tersebut agar dapat mengantisipasi dan mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi, khususnya untuk melengkapi kodifikasi praktik penyelenggaraan hubungan luar negeri oleh Pemerintah RI yang belum termuat dalam undang-undang sebelumnya. Sementara itu ketentuan-ketentuan yang masih relevan dalam UU Hublu akan tetap dipertahankan, dan apabila perlu diperkuat.			
3.	Rancangan UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam tentang	• Ratifikasi nasional untuk mengesahkan Persetujuan ZEE RI-Vietnam yang telah ditandatangani pada tahun 2022 • Memperkukuh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai	Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, dan BHAKP	• Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Kementerian Perhubungan	2025 - 2029

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif	amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). ● Memberlakukan (*entry into force*) batas laut wilayah kedua negara guna menjamin kepastian batas laut wilayah yang menjadi acuan kedua negara untuk melaksanakan kedaulatannya masing-masing sesuai UNCLOS 1982 dan peraturan nasional dalam wilayahnya masing-masing. ● Memperkuat hubungan baik dan kerja sama yang telah ada antara kedua negara dan membuka kerja sama di bidang lainnya.		● Kementerian Kelautan dan Perikanan ● Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ● Badan Informasi Geospasial ● Markas Besar TNI ● Markas Besar TNI – Angkatan Laut	
4.	Rancangan UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah RI-MY di Laut Sulawesi	● Ratifikasi nasional untuk mengesahkan Perjanjian Laut Wilayah di segmen Laut Sulawesi, yang telah ditandatangani pada tahun 2023 ● Memperkukuh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).	Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, dan BHAKP	● Kementerian Luar Negeri ● Kementerian Pertahanan ● Kementerian Perhubungan ● Kementerian Kelautan dan Perikanan ● Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2025 - 2029

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		● Memberlakukan (*entry into force*) batas laut wilayah kedua negara guna menjamin kepastian batas laut wilayah yang menjadi acuan kedua negara untuk melaksanakan kedaulatannya masing-masing sesuai UNCLOS 1982 dan peraturan nasional dalam wilayahnya masing-masing. ● Memperkuat hubungan baik dan kerja sama yang telah ada antara kedua negara dan membuka kerja sama di bidang lainnya.		● Badan Informasi Geospasial ● Markas Besar TNI ● Markas Besar TNI – Angkatan Laut	
5.	Rancangan UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah RI-MY di Selat Malaka Bagian Selatan	● Ratifikasi nasional untuk mengesahkan Perjanjian Laut Wilayah di segmen Selat Malaka bagian Selatan, yang telah ditandatangani pada tahun 2023 ● Memperkukuh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).	Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, dan BHAKP	● Kementerian Luar Negeri ● Kementerian Pertahanan ● Kementerian Perhubungan ● Kementerian Kelautan dan Perikanan ● Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ● Badan Informasi Geospasial	2025 - 2029

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		● Memberlakukan (*entry into force*) batas laut wilayah kedua negara guna menjamin kepastian batas laut wilayah yang menjadi acuan kedua negara untuk melaksanakan kedaulatannya masing-masing sesuai UNCLOS 1982 dan peraturan nasional dalam wilayahnya masing-masing. ● Memperkuat hubungan baik dan kerja sama yang telah ada antara kedua negara dan membuka kerja sama di bidang lainnya.		● Markas Besar TNI ● Markas Besar TNI – Angkatan Laut	
6.	RPP Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/ Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/ Dudanya	● Perubahan PP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu hak Duta Besar sebagai salah satu pejabat negara, yaitu tunjangan jabatan. ● PP Nomor 5/1996 belum mengatur mengenai besaran tunjangan jabatan Dubes, sehingga selama ini belum dapat diberikan kepada Dubes ● Perubahan PP ini akan menyebutkan besaran tunjangan Dubes, sehingga dabat diberikan kepada Para Dubes	Biro Keuangan	● Biro SDM ● Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan ● Deputi Bidang Perundang-undangan Setneg ● Kemenpan RB ● Ditjen PP Kemenkum	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7.	RPP tentang Kerja Sama Pembangunan Internasional	● Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI_ saat ini didasari dengan peraturan tentang aspek metode penyaluran dana/keuangan dari kegiatan KSPI dimaksud. ● Perlu diatur Peraturan Payung berdasarkan UU Hubungan Luar Negeri yang mengatur kebijakan, dan pelaksanaan KSPI oleh Pemerintah Indonesia.	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik c.q Dit.KSPI	● Kemkeu ● Kemsetneg ● KemPPN ● Kemkum ● Kementerian terkait lain.	2027
8.	RPerpres tentang Kebijakan Pemberian Hibah	● Dalam Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Pemberian Hibah akan diatur dengan Peraturan Presiden. ● Menteri Luar Negeri diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Presiden dimaksud.	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik c.q Dit.KSPI	● Kemkeu ● Kemsetneg ● KemPPN ● Kemkum	2026
9.	RPerpres tentang Organisasi Perwakilan RI	● Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 19 UU Hublu dan Pasal 59 Perpres 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri	Sekretariat Jenderal cq Biro Perencanaan dan Organisasi	● Kemenkum ● Kemsetneg ● Setkab ● KemenPAN RB ● Kemenkeu	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		• Perlunya penataan Perwakilan RI yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi • Perlunya penguatan posisi Kemlu sebagai koordinator Hublu berdasarkan UU Hublu dalam penataan pejabat atase di Perwakilan dan Badan/SILN di luar negeri • Melengkapi ketentuan mengenai penataan dan pengelolaan organisasi Perwakilan RI yang belum diatur dalam Keppres 108/2003		• Kementerian/Lembaga lainnya yang memiliki atase di Perwakilan RI	
10.	RPerpres Grand Design Diplomasi Ekonomi	Pelaksanaan Diplomasi yang efektif dalam pemanfaatan aset dan sumber daya ekonomi nasional diperlukan sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi nasional agar berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam perekonomian global. Dalam melaksanakan Diplomasi Ekonomi tersebut, diperlukan suatu grand design diplomasi ekonomi (GDDE) yang menjadi acuan bersama seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memuat penjabaran kerangka koordinasi hubungan luar negeri mengenai arah kebijakan, prioritas dan langkah strategis pelaksanaan diplomasi ekonomi dan dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri.	Sahli Diplomasi Ekonomi dengan didukung BPO, BDSP dan BHAKP	• Kemenko Perekonomian • Kemensetneg • Kemendag • Kemenkeu • Kemenkum • Bappenas	

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
11.	RPerpres Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di kawasan Pasifik (*Pacific Elevation)*	Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045 di berbagai sektor pembangunan nasional dan/atau internasional, diperlukan pelaksanaan diplomasi baik secara bilateral, regional, dan/atau multilateral terkhusus di kawasan pasifik. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (GDSKIP) yang menjadi acuan pemangku kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri	BSKLN cq Pusat SKK Aspasaf	• Kemenko • Bappenas • Kemensetneg • Kemenkum • Kemenkeu • Kemendag	
12.	RPerpres Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok	Urgensi pembentukan RPerpres ini adalah untuk mengakomodir upaya peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, terutama di bidang kerja sama ekonomi dan pelindungan warga negara Indonesia, melalui pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu	Sekretariat Jenderal cq Biro Perencanaan dan Organisasi	• Kemensetneg • Kemenkeu • KemenpanRB	2025
12.	RPerpres tentang Grand Design Strategy Kerja	Urgensi Perpres ini adalah belum adanya peraturan yang lex specialis terkait kebijakan	Direktorat Jenderal Informasi dan	• Kemensetneg • Bappenas • Kemenkeu	2027

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Sama Pembangunan Internasional	dan pengelolaan KSPI. Sementara PP No.48/2018 jo PP No.57/2019 mengenai Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing beserta Permenlu terkait, memiliki keterbatasan ruang lingkup penyaluran dana hibah dengan tujuan pembangunan dan kemanusiaan. Sementara itu, isu kontemporer yang mengemuka seperti bantuan militer maupun bantuan lainnya belum diatur.	Diplomasi Publik cq Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional		
13.	RPerpres tentang Diaspora Indonesia	• Peraturan Presiden ini akan memuat Grand Strategy Peningkatan Peran Strategis Diaspora Indonesia dalam Pembangunan Nasional, selain juga aturan-aturan dasar mengenai fasilitas bagi diaspora Indonesia. • Diharapkan, Peraturan Presiden ini akan memperkuat Grand Strategy tersebut sebagai blue print bagi K/L, mitra lain dan stakeholder untuk mengimplementasikan kebijakan terkait diaspora Indonesia.	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, c.q. Direktorat Diplomasi Publik		

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
14.	Rancangan Perubahan Perpres No 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional ASEAN	Untuk memberikan landasan hukum penataan mekanisme kerja dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Nasional ASEAN sesuai Perpres tentang ASEAN Charter dan Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029 guna mendukung pelaksanaan strategi kebijakan Indonesia pada kerja sama di tingkat ASEAN.	Ditjen KSA cq Setditjen KS ASEAN	Semua Kementerian	2025
15.	RPermenlu tentang Tata Cara Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	● Peraturan Menteri Luar Negeri ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, berupa Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu). ● Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pemberian Hibah, telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengganti PP 57/2019. ● Dalam RPP tersebut, didelegasikan pembuatan Peraturan Menteri Luar Negeri	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik cq Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional	● Kemensetneg ● Bappenas ● Kemenkeu ● Kemenkum	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.			
16.	RPermenlu tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	Untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan organisasi, penetapan jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan perlu lebih fleksibel, responsif, dan efisien dalam memenuhi tuntutan pencapaian prioritas kinerja.	Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan Organisasi	• KemenPANRB • Kemenkum	
17.	RPermenlu tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia	• Selain sebagai peraturan pelaksanaan dari Perpres Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan, perubahan Permenlu mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI ditujukan juga untuk memperbaiki tata kelola Perwakilan RI seperti prosedur dan instrumen hukum penambahan Perwakilan baru atau penambahan wilayah rangkapan pada suatu Perwakilan. • Akan mengatur penjabaran lebih detail mengenai pejabat pada Perwakilan RI dan substansi lain turunan dari Perpres Organisasi perwakilan RI	Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan Organisasi	• Kemensetneg • KemenPANRB • Kemenkeu • Kemenkum	2025-2029
18.	RPermenlu Perubahan Permenlu No. 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan	Perlunya pengaturan yang lebih detail dan komprehensif mengenai perpindahan Perwakilan dalam kondisi tertentu terutama	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik cq Direktorat		2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Rawan dan atau Perwakilan Berbahaya	kondisi darurat (case Khartoum/Port Sudan dan Pyongyang)	Keamanan Diplomatik		
18.	RPermenlu tentang Perencanaan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing	● Dalam rangka efektivitas dan efisiensi tahapan dan proses pemberian hibah, dilaksanakan proses perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing telah dimulai. ● RPP memandatkan bahwa adanya proses perencanaan Pemberian Hibah baik melalui Daftar Rencana Pemberian Hibah maupun di lu ● RPP tersebut memberikan kewenangan Menteri Luar Negeri untuk menilai usulan Pemberian Hibah dan menerbitkan DRPH. RPP juga mendelegasikan pengaturan mekanisme perencanaan Pemberian Hibah di luar DRPH melalui koordinasi oleh Menteri Luar Negeri. ● Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, terutama terkait upaya penyederhanaan mekanisme administrasi untuk memastikan kecepatan pemberian hibah, maka dipandang perlu untuk mengatur Perencanaan Pemberian Hibah yang mengatur mekanisme Pengajuan	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik cq Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional	● Kemensetneg ● Bappenas ● Kemenkeu ● Kemenkum	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melalui Daftar Rencana Pemberian Hibah dan Mekanisme Koordinasi Pemberian Hibah di Luar DRPH agar sesuai dengan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.			
19.	Permenlu tentang Pegawai Setempat	• Carry over 2024 • Perlunya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Setempat pasca berubahnya Perpres ADTLN • Perlunya meningkatkan perbaikan tata kelola dan manajemen Pegawai Setempat	Sekretaris Jenderal cq. Biro Sumber Daya Manusia	• Kemenkeu • KemenPANRB • Kemenkum	2025
20.	RPermenlu tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI	• Penguatan kelembagaan terkait pengarusutamaan gender Kemenlu; • Tindak lanjut atas UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; • Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kajian Surat Edaran Menlu No. 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI (SE Menlu PPTPS).	Sahli Bidang manajemen dan Pokja PUG Kemlu	• Kemenkum	
21.	RPermenlu tentang Sistem Pemerintahan	• Permenlu ini merupakan Peraturan dalam penerapan SPBE di Kemlu.	Sekretariat Jenderal cq. Pusat	• KemenPAN RB	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Berbasis Elektronik Kemenlu dan Perwakilan RI	● RPermenlu SPBE diharapkan dapat meningkatkan Nilai RB Kemlu dari Domain Kebijakan. ● RPermenlu SPBE akan menjadi dasar dalam kebijakan penerapan TIK di Kemlu dan Perwakilan	Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan		
22.	RPermenlu tentang Peta Jalan Standarisasi Arsitektur Infrastruktur TIK Kemenlu	● Tujuan Standardisasi Infrastruktur TIK Kemlu ini adalah untuk memastikan sistem TIK yang digunakan Kemlu memenuhi standard ketersediaan, keandalan, kemudahan pengelolaan, efisiensi, keamanan, skalabilitas, kepatuhan terhadap tata kelola dan regulasi yang tinggi	Sekretariat Jenderal cq. Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan	● KemenPAN RB ● Komdigi	2025
25.	RPermenlu tentang Tata Kelola Berita Diplomatik dalam Hubungan Luar Negeri	● Rancangan Permenlu ini merupakan kebijakan yang menggantikan Kepmenlu Nomor 28/B/KM/VII/2014/01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengelolaan Berita Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang dirasa perlu penyesuaian dengan kebijakan terkini dan dapat mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam hal-hal terkait pengelolaan pemberitaan. ● Draft memuat tentang pengelolaan informasi diplomatik; format berita diplomatik; kewenangan penandatanganan; tanda tangan elektronik; aplikasi pengelolaan berita diplomatik; arsitektur dan infrastruktur TIK	Sekretariat Jenderal cq. Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan	● BSSN ● Komdigi ● ANRI	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pendukung; media penyimpanan dan aplikasi pencarian; pemanfaatan informasi diplomatik; keamanan informasi, distribusi sistem sandi dan kriptografi; sistem monitoring dan evaluasi.			
26.	RPermenlu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	• Sebagai pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE Kemlu dan Perwakilan RI • Komitmen Kemlu dalam meningkatkan nilai Indeks SPBE	Sekretariat Jenderal cq. Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan	• KemenPAN RB	2026
27.	RPermenlu tentang Perubahan atas Permenlu Nomor 19 tahun 2020 tentang Tata Kelola Data Diplomasi	• Dalam rangka mewujudkan data kementerian yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kementerian Luar Negeri telah menyusun Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman. • Dalam Kurun waktu 2020-2024 terdapat aturan nasional yang bersinggungan dengan pelaksanaan kebijakan Satu Data	Sekretariat Jenderal cq. Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan	• BPS • Komdigi • Bappenas • KemenPAN RB	2026

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronis dan Satu Data Indonesia dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. ● Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan Tata Kelola Data Diplomasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Permenlu Tata Kelola Data Diplomasi agar selaras dengan aturan nasional.			
28.	RPermenlu tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar	● Pengembalian Pinjaman Resmi diubah menjadi paling lama 12 (dua belas) bulan maksimal agar masih dapat dipertanggungjawabkan dalam satu tahun anggaran. ● Sebagai upaya perbaikan terhadap pengembalian cicilan Pinjaman Resmi. ● Sebagai upaya penyederhanaan mekanisme pinjaman resmi.	Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan	Kemenkeu	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri				
29.	RPermenlu tentang Tata Kelola Berita Diplomatik dalam Hubungan Luar Negeri	Delegasi dari Peraturan Menteri Luar Negeri mengenai Tata Naskah Dinas	Sekretariat Jenderal cq. Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan		2025
30.	RPermenlu tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	• Terdapat beberapa perkembangan baik eksternal maupun internal di Kementerian Luar Negeri yang menuntut dilakukan penyesuaian terhadap materi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2015 Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. • Kurangnya pemahaman pegawai mengenai situasi benturan kepentingan yang menyebabkan rendahnya kesadaran pegawai akan adanya potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedinasan sehingga potensi situasi benturan kepentingan untuk terjadi sangat besar.	Inspektorat Jenderal cq Sekretariat Inspektorat Jenderal	• KemenPANRB • Kemenkum	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
31.	RPermenlu tentang Petunjuk Teknis Layanan Akses Aplikasi SIMKEU dan Nota Hasil Verifikasi Online	• Berdasarkan wawancara penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dibutuhkan pemenuhan aspek untuk ditetapkan. • Akses kepada aplikasi SIMKEU mensyaratkan adanya Perjanjian Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pengguna sehingga norma ini perlu diatur. • Urgensi diatur dalam bentuk Peraturan Menteri karena mengatur kementerian/lembaga lain.	Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan	• Kemenkeu • Kemenkum	2025
32.	RPermenlu tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Diplomat	• *Carry over* 2024 • Terdapat ketentuan nasional terbaru mengenai jabatan fungsional dan pengembangan kompetensinya (Permenpan RB No. 1 Tahun 2023)	Sekretariat Jenderal cq Pusat Pendidikan dan Pelatihan	• KemenPANRB • Kemenkum	2025
33.	RPermenlu tentang perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 tahun 2017 tentang Penerapan	ISO 3100:2009 menjadi landasan tahapan proses manajemen risiko pada Permenlu nomor 10 tahun 2017 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kemenlu telah mengalami perubahan dan direvisi menjadi	Sekretariat Jenderal cq BPO dan Inspektorat Jenderal		

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI	ISO 31000:2018. Mengingat ada revisi landasan ISO yang digunakan BPO berencana untuk melakukan revisi Permenlu manajemen risiko. Disamping itu juga diperlukan ada penambahan beberapa parameter dan tahapan proses pada Permenlu No. 10 tahun 2017 guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan sehingga lebih terstruktur, efisien dan adaptif dalam mengelola resiko yang semakin kompeks ke depan			
34.	RPermenlu tentang perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI	Perlu ada penambahan beberapa parameter dan tahapan proses pada Permenlu No. 2 tahun 2018 dan menyesuaikan dengan perubahan permenlu tentang manajemen risiko	Sekretariat Jenderal cq BPO dan Inspektorat Jenderal		

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
35.	RPermenlu tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	● *Carry over* 2024 ● Perlunya pengaturan mengenai struktur, mekanisme, dan tata kerja dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kemlu	Sekretaris Jenderal cq. Biro Umum	● LKPP ● KemenPANRB	2025
36.	RPermenlu tentang Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional	Sesuai amanat dari Pasal 60 PermenPANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, seluruh ketentuan mengenai jabatan fungsional wajib disesuaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan dimaksud diundangkan. Menindaklanjuti hal tersebut, beberapa peraturan mengenai jabatan fungsional binaan Kementerian Luar Negeri (JFD, JFPK, dan JFPID) perlu untuk segera disesuaikan, termasuk Permenlu mengenai pedoman penghitungan kebutuhan.	Sekretaris Jenderal cq. Pusbinjafung	● KemenPANRB ● BKN ● Kemenkum	2025
37.	RPermenlu tentang Pencabutan Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat	Sesuai amanat dari Pasal 60 PermenPANRB 1/2023 dan amanat delegatif dari Permenlu 6/2024 mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JFD, maka perlu disusun RPermenlu pencabutan Permenlu 7/2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis JFD. Selanjutnya, Kamus Kompetensi Teknis JFD akan diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri.	Sekretaris Jenderal cq. Pusbinjafung	● KemenPANRB ● Kemenkum	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	RPermenlu tentang Pencabutan Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat	Sesuai amanat dari Pasal 60 PermenPANRB 1/2023 dan amanat delegatif dari Permenlu 6/2024 mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JFD, maka perlu disusun RPermenlu pencabutan Permenlu 15/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi JFD. Selanjutnya, Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi JFD akan diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri.	Sekretaris Jenderal cq. Pusbinjafung	● KemenPANRB ● Kemenkum	2025
	RPermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri	Sesuai amanat dari Pasal 60 PermenPANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, seluruh ketentuan mengenai jabatan fungsional wajib disesuaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan dimaksud diundangkan. Menindaklanjuti hal tersebut, PermenPANRB 4/2018 tentang JFD, PermenPANRB 13/2018 tentang JFPK, dan PermenPANRB 14/2018 tentang JFPID perlu disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penyederhanaan serta penyelarasan regulasi bagi 3 (tiga) JF binaan Kemlu dan dengan mempertimbangkan muatan substansi	Sekretaris Jenderal cq. Pusbinjafung	● KemenPANRB ● Kemenkum	2025

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		ketentuan yang berlaku umum, maka 3 (tiga) PermenPANRB mengenai JF binaan Kementerian Luar Negeri akan disusun dalam 1 (satu) PermenPANRB mengenai jabatan fungsional di bidang hubungan luar negeri.			
	RPermenlu tentang Tata Cara Penerbitan Izin Diplomatik Kapal Laut Asing Tidak Berjadwal.	Kementerian Luar Negeri belum memiliki Permenlu khusus yang mengatur pemberian izin diplomatik dari Kemenlu bagi kapal asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Hal ini mengingat bahwa kapal laut asing tidak berjadwal yang akan masuk atau berlabuh di wilayah perairan Indonesia harus memiliki Izin Diplomatik dari Kemenlu c.q Direktorat Konsuler sehingga perlu menetapkan Permenlu tentang Tata Cara Penerbitan Izin Diplomatik Kapal Laut Asing Tidak Berjadwal. Selain *diplomatic clearance*, kapal laut asing juga harus memperoleh *security clearance* yang diterbitkan oleh Mabes TNI serta sailing permit yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan agar dapat masuk atau berlabuh di Perairan Indonesia.	Ditjen Protokol dan Konsuler cq. Dit. Konsuler	● Mabes TNI ● Kementerian Perhubungan	2027

DRAFT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Selama ini Dasar Hukum Dit. Konsuler dalam memberikan perizinan pelayaran adalah Permenlu No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenlu serta Perjanjian Kerja Sama antara Kemenlu, Mabes TNI dan Kemenhub mengenai pemberian Izin Melintas dan/atau Berlabuh (*Clearance and Approval for Indonesia Territory/CAIT*) bagi Kapal Asing tidak berjadwal di wilayah Indonesia			

DRAFT

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO